



**PENGARUH METODE EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP HASIL PEKERJAAN
DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS***

(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Temanggung)

TESIS

Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
pada Program Magister Teknik Sipil

Oleh :

DWI SUKARMEI

NIM L4A009015

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2011

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH METODE EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP HASIL PEKERJAAN DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*

(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Temanggung)

Disusun oleh :

DWI SUKARMEI

NIM L4A009015

Tesis ini disetujui untuk diseminarkan

Menyetujui Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. M.Agung Wibowo,MM,MSc,PhD

Jati Utomo D.Hatmoko,ST,MM,MSc,PhD

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Penggunaan sistem nilai dalam pengadaan barang/jasa diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah masih minimnya penggunaan sistem nilai (daftar simak dan *Passing Grade/Ambang Lulus*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengakibatkan masih banyaknya jumlah temuan. Objek yang diteliti adalah pelelangan barang/jasa dengan Pagu Anggaran dibawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa perbedaan sistem gugur dan sistem nilai pada suatu evaluasi penawaran, 2) menentukan faktor dominan *passing grade/ambang lulus* dan daftar simak pada proses penentuan pemenang pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan metode AHP, 3) memvalidasi hasil analisis pada pemangku kepentingan kegiatan pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Temanggung

Penelitian ini menggunakan kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatifnya digunakan pada saat mengukur relatif antara faktor-faktor yang mempengaruhi *passing grade/ambang lulus* dan daftar simak dari data primer. Sedangkan metode kuantitatif digunakan pada saat menggunakan data sekunder peserta penawaran. Kombinasi kedua metode digunakan pada saat validasi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) berbeda karakteristiknya dalam hal waktu evaluasi; biaya evaluasi; hasil evaluasi; keterperincian persyaratan; ketepatan memilih penyedia jasa; hasil pekerjaan; seleksi peserta; penentuan pemenang; jumlah temuan pemeriksa; dasar pedoman pelaksanaan di lapangan; pendapat penyedia jasa, pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang sistem gugur dan sistem nilai; dan batasan evaluasi. Rata-rata nilai skala likert dengan angka terkecil (2) terdapat pada data faktor keterperincian persyaratan, ketepatan dalam memilih penyedia jasa, jumlah temuan pemeriksa, pendapat penyedia barang/ jasa, pendapat pengguna anggaran, PPK, panitia pengadaan barang/jasa, dan batasan evaluasi. Sedangkan yang terbesar (4) terdapat pada faktor biaya evaluasi. Hasil validasi data menunjukkan bahwa sistem nilai masih mengedepankan faktor kemampuan finansial, pengalaman perusahaan, personil tenaga ahli minimal dan peralatan kerja minimal yang harus dimiliki pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) perbedaan karakteristik sistem nilai dengan sistem gugur adalah sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) mempunyai dampak yang lebih baik daripada sistem gugur dalam pelaksanaan pelelangan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; 2) faktor dominan yang mempengaruhi *passing grade/ambang lulus* dan daftar simak adalah faktor keuangan (55,1%), teknis (18,4%), administrasi (6,7%), pernyataan minat (6,7%), pakta integritas (6,5%), dan kualifikasi (6,7%); 3) validasi data menunjukkan bahwa masih adanya penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan. Saran penelitian adalah 1) penerapan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) perlu pemeriksaan kecocokan antara yang tertulis di dokumen administrasi dengan pelaksanaan di lapangan, 2) telaah faktor penentu pemenang lelang juga harus mempertimbangkan pengalaman pelaksana pekerjaan, tidak hanya administrasi belaka, 3) penelitian tesis yang akan datang agar lebih fokus dalam hal penerapan metode evaluasi penawaran dengan sistem Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS)/ *Built Operator Transfer (BOT)*.

Kata kunci: sistem gugur, sistem nilai, daftar simak, *passing grade/ambang lulus*, *analytical hierarchy process (AHP)*

Abstract

The government procurement of goods and services is expected to be effective and efficient and meet the principles of healthy competition, transparency, openness, and fairness for all parties involved. By implementing scoring system it is hoped that the principles will be realized in the government goods/services procurement. The set of problems in this research is the minimum use of Scoring System (Scrutinizing List and Passing Grade) in the Goods/Services bid. This leads to the many findings of less-than-minimum-score projects in Temanggung Regency by the Auditing Team. The object being researched is the goods and services auction of budget ceiling below five billion rupiahs.

The objectives of the research are: 1) to analyze the difference between elimination system and scoring system in a bid evaluation, 2) to determine the factor most dominantly affecting passing grade and scrutinizing list within the process of choosing the winner for the contracting work, using AHP method, 3) to validate the analysis result with the help of the stakeholders of the goods/services procurement in Temanggung Regency.

The methods used are qualitative and quantitative. The qualitative method is used to relatively measure the factors affecting passing grade and the scrutinizing list from the primary data. On the other hand, the quantitative method is used to analyze the secondary data and the bid documents. The combination of the two methods is used to validate the research result.

The result shows that the elimination and scoring systems are different in terms of time, cost evaluation, evaluation result, detail of qualifications, accuracy in choosing the service provider, result of contract work, participants selection, process of determining the winner of the contract work, number of case found by auditors, basic guidelines in conducting the project, opinions of the service providers, opinions of the budget user, opinions of the project leader, and opinions of the contract work committee about the two systems, and evaluation limitations. Factors obtaining the lowest average of likert scale (2) are detail of qualification, accuracy in choosing the service provider, number of case found by auditors, opinions of the service providers, opinions of the budget users, opinions of the project leader, and opinions of the contract work committee about the two systems, and evaluation limitations. One factor has the highest average of likert scale (4), that is evaluation cost. Secondly, the research result shows that the most dominant factor affecting passing grade is the financial one (55,1%). The data validation tells that the scoring system stresses the importance on the company's financial strength, experience, the number of minimum expert personnel employed and the number of minimum work tools owned by the goods/service providers.

This research concludes that 1) the characteristic difference between elimination system and scoring system is that scoring system proves to give better impact towards the bidding process and the contract working, 2) the dominant factors affecting passing grade and scrutinizing list are finance (55,1%), technical (18,4%), administrative (6,7%), interest statement (6,7%), pact of integrity (6,5%), and qualification (6,7%). Data validation shows that there are still abuses on the contract work. The research suggestions are 1) the application of scoring system requires further validation on what is written on the document and what are found in real possession of the company attending the contract bid, 2) the company's experience in conducting contract work, not merely administrative matters, should also be considered as an important factor in determining the winner of the contract work, 3) the theses succeeding this one should focus on the application of bid evaluation method using Built Operator Transfer System (BOT).

Keywords: elimination system, scoring system, scrutinizing list, passing grade, analytical hierarchy process (AHP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat taufiq dan hidayah-Nya dapat terselesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Metode Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Hasil Pekerjaan Dengan Pendekatan *Analytical Hierarchy Process*” dengan maksimal, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan peluang, bantuan dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto PH,MES., Rektor Universitas Diponegoro Semarang .
2. Dr.Ir. Bambang Riyanto, DEA., Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang .
3. Ir.M.Agung Wibowo, MM,MSc,PhD., Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Jati Utomo Dwi Hatmoko,ST,MM,MSc,PhD. Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

Atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan jasa dari semua pihak yang disebutkan diatas, penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik yang telah dilimpahkan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca budiman.

Semarang, 19 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
Abstrak.....	iii
<i>Abstract</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
a. Tujuan Penelitian	4
b. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Batasan Masalah	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Pengadaan Barang / Jasa	7
2.2. Kedudukan Pengadaan	7
2.3. Perbandingan Sistem Gugur, Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Selama Umur Ekonomis	9
2.4. Daftar Simak.....	12
2.5. Nilai Ambang Lulus (<i>Passing Grade</i>).....	14
2.6. Interaksi <i>Stakeholder</i> (Pemangku Kepentingan)	19
a. Negara.....	19
b. Sektor Swasta	19
c. Masyarakat.....	20
2.7. Konsep Analisis Multi Kriteria (AMK).....	21
2.8. Prinsip Dasar AHP	22
a. Perbandingan Berpasangan.....	23
b. Penyusunan <i>Pairwise Matrix</i>	24
c. Uji Konsistensi.....	24
d. Pembobotan	26
e. Proses Analisis Hirarki atau Skoring.....	27
2.9. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Metode Penelitian	30
3.2. Tahapan Penelitian	30
3.3. Sumber Data	32
a. Data Primer	32
b. Data Sekunder	32

3.4. Rancangan Penelitian	33
a. Lokasi Penelitian	33
b. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
c. Definisi Operasional Variabel	34
d. Hasil yang Diharapkan	36
BAB IV DATA DAN ANALISIS	37
4.1. Deskripsi Responden Penelitian	37
a. Pendidikan Responden	37
b. Pengalaman Responden	39
c. Status Responden	40
1). Penyedia Barang/Jasa	40
2). Pengguna Anggaran	42
3). Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa	42
4). Pejabat Pembuat Komitmen	42
5). Pengguna Bangunan	43
4.2. Persepsi <i>Stakeholder</i> pada perbandingan Sistem Gugur dan Sistem Nilai	43
4.3. Analisis Hirarki Metode Evaluasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	51
a. <i>Decomposition</i>	50
b. Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison)	55
c. Menentukan Prioritas Pilihan (Synthesis of Priority)	55
d. Rasio Konsistensi (Consistency Ratio)	56
BAB V PEMBAHASAN	60
5.1. Perbedaan Karakteristik Sistem Gugur dan Sistem Nilai	60
a. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Waktu Evaluasi	61
b. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Biaya Evaluasi	62
c. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Hasil Evaluasi	63
d. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Rincian Persyaratan	64
e. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Ketepatan Memilih Penyedia Jasa	64
f. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Hasil Pekerjaan	65
g. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Seleksi Peserta Penawaran Barang/Jasa	65
h. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Penentuan Pemenang	66
i. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Jumlah Temuan Pemeriksa BPK/BPKP/Kejaksaan/PPK/ Bawasda)	66
j. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Dasar Pedoman Pelaksanaan di Lapangan	68
k. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Pendapat Penyedia Jasa	68
l. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa	69

m. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dalam Batasan Evaluasi.....	69
5.2. Faktor Dominan yang Mempengaruhi <i>Passing Grade</i> /Ambang Lulus dan Daftar Simak.....	74
a. Faktor Keuangan.....	75
b. Faktor Teknis.....	75
c. Faktor Administrasi.....	76
d. Faktor Pernyataan Minat.....	78
e. Faktor Pakta Integritas.....	78
f. Faktor Kualifikasi.....	78
5.3. Hasil Pemvalidasian Data Hasil Analisis pada Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>).....	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	81
6.1. Kesimpulan.....	81
6.2. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa	10
Tabel 2.2. Skala Penilaian Antar Kriteria.....	23
Tabel 2.3. Matriks Perbandingan Berpasangan	23
Tabel 2.4. Nilai Random Index (RI).....	24
Tabel 4.1. Pendidikan Responden	37
Tabel 4.2. Pengalaman Responden.....	39
Tabel 4.3. Asosiasi Penyedia Jasa dan Jumlah Anggotanya	40
Tabel 4.4. Daftar Responden Penyedia Barang/Jasa di Lokasi Penelitian.....	42
Tabel 4.5. Perbandingan Faktor-Faktor Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai.....	43
Tabel 4.6. Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan	44
Tabel 4.7. Pendapat Pengguna Bangunan/Pemilik Bangunan (Responden).....	48
Tabel 4.8. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di DPU, RSUD, BLH di Kabupaten Temanggung 2006-2009.....	49
Tabel 4.9. Faktor-Faktor Kriteria dan Sub Kriteria Model AHP Sistem Penilaian Lelang Barang/Jasa.....	51
Tabel 4.10. Perangkingan Kriteria.....	55
Tabel 4.11. Matriks yang Telah Dinormalisasi.....	56
Tabel 4.12. Penentuan Weighted Sum Vector.....	56
Tabel 5.1. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai.....	60
Tabel 5.2. Perbandingan Sistem Gugur dan Sistem Nilai.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perbandingan Jumlah Paket Pengadaan Konstruksi dengan Jumlah Temuan Tim Audit/ Mendapatkan Nilai Kurang	2
Gambar 2.1. Kedudukan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Proyek Pembangunan (Sumber: DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2005)	8
Gambar 2.2. Perencanaan Pengadaan (Sumber: DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2005).....	9
Gambar 2.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004 s.d 2009	12
Gambar 2.4. Skema Proses Analisis Hirarki	27
Gambar 2.5. Alur Kerangka Berpikir Penelitian.....	28
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian.....	31
Gambar 4.1. Pendidikan Responden.....	38
Gambar 4.2. Masa Kerja Responden.....	40
Gambar 4.3. Asosiasi Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Temanggung.....	41
Gambar 4.4. Simpangan Baku Faktor-Faktor yang Diperbandingkan.....	44
Gambar 4.5. Rata-Rata Skala Likert Faktor-Faktor yang Diperbandingkan.....	45
Gambar 4.6. Faktor-Faktor Sistem Gugur Dibandingkan Sistem Nilai.....	46
Gambar 4.7. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 s.d 2009.....	50
Gambar 4.8. Jumlah Temuan/Mendapat Nilai Kurang Tahun 2006 s.d. 2009.....	50
Gambar 4.9. Model AHP Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.....	53
Gambar 4.10. Model AHP Metode Evaluasi Lelang Barang/Jasa dengan <i>Decision Analyst</i>	54
Gambar 4.11. Matriks Perbandingan Berpasangan Model AHP di Lokasi Penelitian.....	58
Gambar 4.12. Analisis Sensitifitas Model AHP.....	59
Gambar 5.1. Perbandingan Sistem Gugur dan Sistem Nilai.....	72
Gambar 5.2. Bobot Faktor-Faktor Kriteria.....	74
Gambar 5.3. Bobot Sub Kriteria Faktor Keuangan	75
Gambar 5.4. Bobot Sub Kriteria Faktor Teknis	76
Gambar 5.5. Bobot Sub Kriteria Faktor Administrasi	77

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	Contoh Daftar Simak.....	85
LAMPIRAN B.	Contoh Penilaian <i>Passing Grade</i> /Ambang Lulus.....	86
LAMPIRAN C.	Hasil Simulasi Data: Persepsi Perbedaan Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai.....	88
LAMPIRAN D.	Daftar Temuan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.....	90
LAMPIRAN E.	Kuesioner Penelitian.....	105
LAMPIRAN F.	Foto Responden.....	120
LAMPIRAN G.	Data Hasil Kuesioner.....	126
LAMPIRAN H.	Grafik Hasil Kuesioner.....	133
LAMPIRAN I.	Responden Penelitian.....	140
LAMPIRAN J.	<i>Focus Group Discussion</i>	141
LAMPIRAN K.	Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan.....	144
LAMPIRAN L.	Contoh Formulir Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan Barang/ Jasa.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

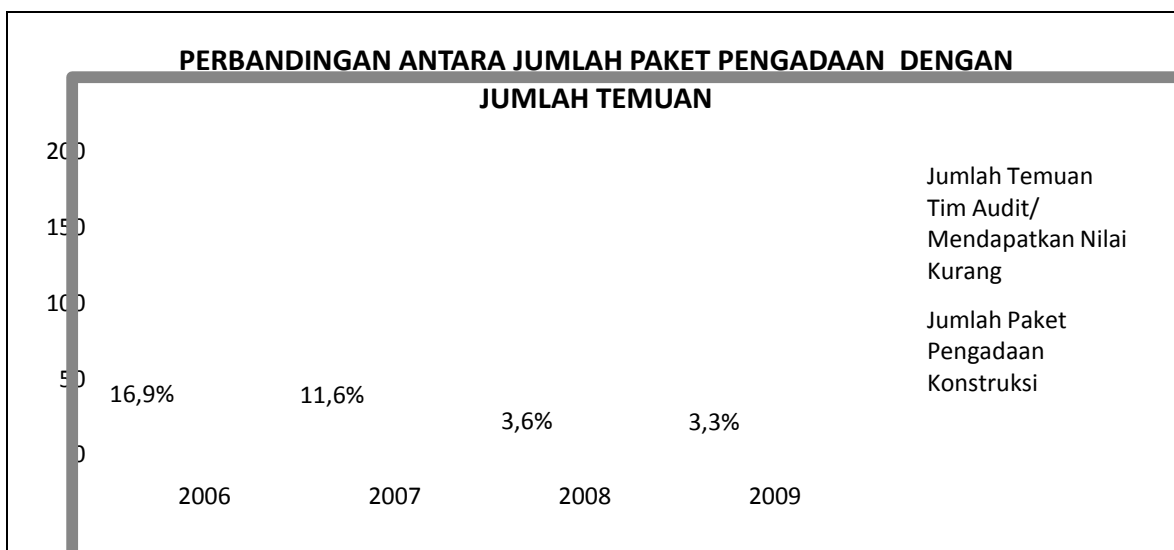
1.1. Latar Belakang

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu suatu pedoman pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah. Selain itu agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Prinsip yang pertama adalah efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang kedua adalah efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip ketiga adalah terbuka dan bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Prinsip keempat adalah transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Prinsip kelima adalah adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Prinsip keenam adalah akuntabel, berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

Menurut Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Kegiatan di Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pekerjaan dengan Pagu Anggaran dibawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tahun 2006-2009, tim audit masih menemukan proyek yang mendapatkan nilai D/E dari proses sistem gugur (harga terendah) atau yang belum menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Pada tahun 2006 dari 136 paket kegiatan, jumlah kegagalan mencapai 23 paket. Pada tahun 2007 dari 173 paket pekerjaan terdapat 20 paket yang mendapat nilai kurang. Pada tahun 2008 setelah menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dari 140 paket kegiatan hanya ada 5 yang gagal konstruksi dimulai dari pelaksanaan lelang yang kurang baik. Pada tahun 2009 dari 121 paket pekerjaan hanya 4 (empat) paket yang gagal. Jumlah temuan tim audit/ yang mendapatkan nilai kurang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Perbandingan Jumlah Paket dengan Jumlah Temuan

Sumber: Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab. Temanggung, 2010

Salah satu alasan penyusunan latar belakang ini adalah belum terjadinya persaingan yang sehat, pengadaan sangat tidak efisien, prosedur sangat birokratik dan berbelit, hampir semua prinsip dasar tidak bisa diwujudkan (transparan, efisien, efektif, persaingan, adil/ diskriminatif, akuntabel), terjadinya konflik antara pelaku dalam pelaksanaan, juga beratnya tantangan kedepan dalam pasar bebas. Sebagai upaya untuk mengantisipasi tidak

efisiennya pelaksanaan pembangunan dimulai dari proses lelang, penilaian efisiensi suatu pembangunan infrastruktur menurut jenis kontraknya dapat dilakukan dengan metode AHP (Rufaidah, 2009).

Evaluasi dokumen penawaran yang sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Penawaran ada tiga macam, yaitu evaluasi penawaran dengan sistem gugur, evaluasi penawaran dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dan evaluasi penawaran dengan sistem umur ekonomis. Evaluasi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dapat diterapkan pada pelelangan pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang menggunakan alat berat atau untuk pengadaan barang yang memiliki spesifikasi teknik dan kualitas barang tinggi yang sepadan dengan harganya dan dalam jumlah terbatas.

Evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem nilai (*passing grade*/ambang lulus) sangat baik bila metode pengambilan keputusannya memakai AHP (*Analytic Hierarchy Process*), karena metode AHP dapat menentukan kriteria dan bobot setiap unsur penilaian yang akan digunakan. Penilaian masing-masing penyedia barang dilakukan dengan skoring menggunakan skala likert dan hasilnya cukup signifikan dan dapat menunjukkan bahwa barang yang diminta sudah mengacu pada spesifikasi tertentu (Suliantoro, 2008).

AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dapat dipakai sebagai alat yang cukup komprehensif untuk melakukan evaluasi metode pengadaan solusi *e-Commerce*. Dengan memanfaatkan mekanisme evaluasi yang diusulkan oleh penelitian ini, perusahaan yang melaksanakan implementasi sistem berbasis *cybermedia* ini dapat meminimalkan risiko bisnis khususnya untuk tinjauan aspek metode pengadaannya (Widodo, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi untuk pengadaan barang/jasa baik kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun kepada Penyedia Barang/Jasa, masih belum menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/ PRT/ M/2007 Tentang Standar dan Pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya dalam penggunaan Sistem *Passing Grade*/ambang lulus dan daftar simak. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum efektif secara maksimal. Ketidakefektifan ini juga disebabkan oleh masih maraknya

Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), konflik dalam pelaksanaan pengadaan, keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh panitia pengadaan pelelangan barang/jasa pemerintah serta masih banyaknya penyedia jasa yang kurang memperhatikan sisa kemampuan keuangan, pengalaman perusahaan, personil dan peralatan. Oleh karena itulah semangat mewujudkan *Good Governance* pada proses pengadaan barang/jasa menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.

Penerapan Daftar Simak dan sistem *passing grade*/ambang lulus sejauh ini belum pernah diuji keandalannya terhadap perwujudan *Good Governance*. Sehingga amat penting bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mengukur faktor-faktor penting penentu *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak pada pelaksanaan penentuan pemenang pada jasa pemborongan. Perubahan sistem gugur menjadi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) telah membuat perubahan yang cukup signifikan di Kabupaten Temanggung paling tidak dalam empat tahun terakhir. Maka perlu ditelaah lebih dalam mengenai penerapan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dan sistem nilai/daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus sehingga berpengaruh bagi hasil evaluasi penawaran.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perbedaan karakteristik sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) pada suatu evaluasi penawaran pada penentuan pemenang lelang barang/jasa dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan .
2. Menentukan faktor dominan yang mempengaruhi *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak pada proses penentuan pemenang pekerjaan jasa pemborongan dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
3. Menvalidasi hasil analisis pada pemangku kepentingan (*stakeholder*) kegiatan pengadaan barang dan jasa .

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat untuk mengukur keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem nilai (daftar simak *dan passing grade*/ambang lulus) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pengaruh yang diukur mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
2. Penelitian ini menggunakan data jenis konstruksi pengairan, jalan, cipta karya, dan jembatan yang dihasilkan di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
3. Responden yang terlibat adalah pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan langsung dengan proses penentuan pemenang jasa pemborongan seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa
4. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data implementasi sistem gugur dan sistem nilai (sistem *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak) selama 4 tahun terakhir di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Sistem Gugur diterapkan pada tahun 2006-2007 sedangkan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) diterapkan pada tahun 2008-2009 dengan jenis pekerjaan jalan, jembatan, cipta karya dan pengairan .

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 6 bab, dengan uraian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat latar belakang pengambilan tema penelitian, permasalahan yang ada di lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung, maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini, pembatasan ruang lingkup masalah yang ada agar penelitian lebih terfokus, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Memuat landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah pelelangan dengan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus), analisis multi kriteria dan *analytical hierarchy process* (AHP)

BAB III METODE PENELITIAN : Terdiri dari alur logika pelaksanaan penelitian, jenis-jenis data dan cara pengambilannya serta proses pengolahan dan perhitungannya secara matematis maupun statistik.

BAB IV DATA DAN ANALISIS : Menampilkan data hasil kuesioner dari para responden juga analisisnya menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process*.

BAB V PEMBAHASAN : Berisi bahasan data hasil penelitian sehubungan dengan tujuan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN : Memberikan ringkasan hasil penelitian serta hal-hal yang perlu dilaksanakan di masa mendatang demi perbaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengadaan Barang / Jasa

Menurut Konsep Dasar dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dimulai sejak adanya pasar, ketika orang dapat membeli dan atau menjual barang. Pasar adalah tempat terjadinya proses tawar-menawar antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual. Proses selanjutnya adalah proses transaksi jual beli. Setelah tercapai kesepakatan harga antara kedua pihak, yang terjadi kemudian adalah proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Apabila barang yang akan dibeli, jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna barang/ jasa menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Hal ini merupakan asal usul munculnya dokumen pembelian. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran (Wibowo: 2002).

Perkembangan selanjutnya adalah pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

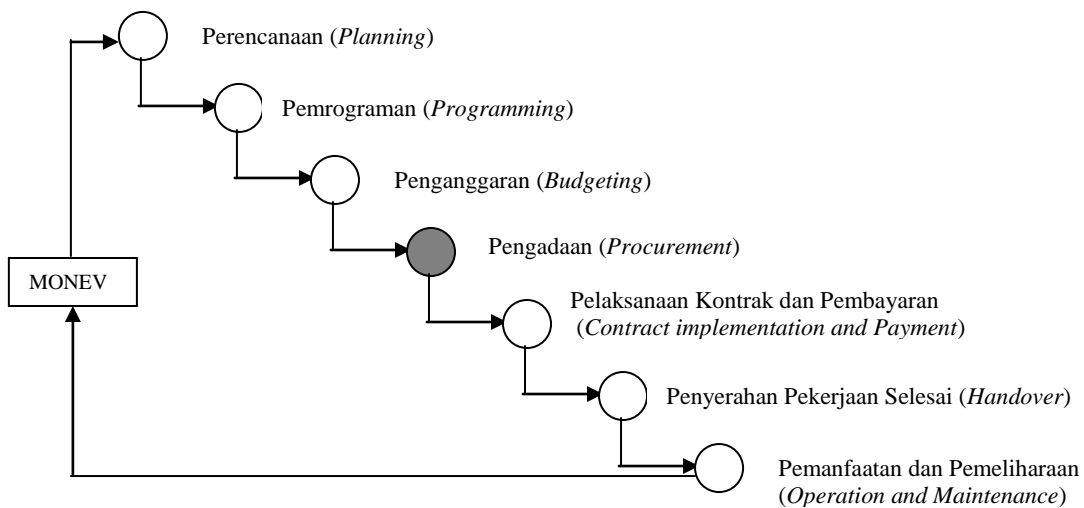
Rangkaian kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dilakukan dengan menggunakan metode dan proses tertentu, supaya dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kualitas. Upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.

2.2. Kedudukan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai moral yang baik. Perilaku yang harus ditampilkan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan antara lain berupa saling menghormati, bertindak secara

profesional, tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi /kelompok, serta tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara sepihak atau bersama-sama

Pengadaan (*procurement*) merupakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan pekerjaan biasanya dituangkan dalam berita acara penjelasan lelang pengadaan (*aanwijzing*). Kedudukan pengadaan dalam proyek pembangunan diilustrasikan dalam Gambar 2.1. dibawah ini:



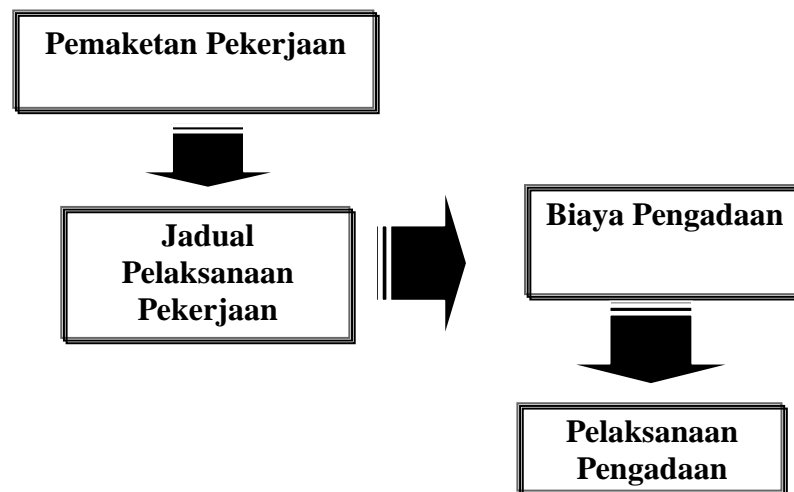
Gambar 2. 1. Kedudukan Pengadaan Barang/ Jasa dalam Proyek Pembangunan

Sumber : DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan :2005

Suatu kegiatan pengadaan barang/jasa diawali dengan perencanaan (pemaketan) yang matang sesuai dengan klasifikasi sub bidang pekerjaan dan pagu (biaya) yang tersedia. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan kenyataan di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini melibatkan dinas teknis terkait, Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan kecamatan tempat proyek akan dikerjakan.

Sebelumnya, panitia menyusun jadwal pengadaan barang/jasa yang mencakup waktu pendaftaran, pembukaan penawaran, pengumuman pemenang lelang, serta masa sanggah (bagi penyedia jasa yang tidak menerima hasil keputusan pemenang lelang). Setelah perencanaan sesuai dengan aturan-aturan dan biaya yang ada maka dilanjutkan pengadaan. Pengadaan harus mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini memberi suatu pedoman bagi penyedia barang/jasa agar bisa melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan panitia maupun aturan-aturan lain yang berlaku. Penyedia jasa yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan di tempat pendaftaran lelang yang telah disediakan oleh dinas yang terkait. Gambar 2.2. tentang Perencanaan Pengadaan memberi ilustrasi skematis tentang hal ini.



Gambar 2. 2. Perencanaan Pengadaan

Sumber: DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan: 2005

2.3. Perbandingan Sistem Gugur, Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

Menurut pasal 49 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya dapat dipilih salah satu dari tiga metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang. Metode evaluasi ini meliputi sistem gugur, sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Pada penelitian ini yang dibahas hanya sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) saja.

Perpres 54 Tahun 2010 memberikan definisi tentang sistem gugur, sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus), dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Contoh Penilaian *Passing Grade*/ambang lulus terdapat pada Lampiran B.

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Dibawah ini adalah Form buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung 2006-2009 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Selengkapnya formulir Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Nama Kegiatan/TA :

Nilai Kontrak :

Pelaksana :

Alamat :

No.	FAKTOR PENILAIAN	VARIABEL PENILAIAN	NILAI
1	2	3	4
1.	Mutu Pekerjaan	a. Kualitas (standar mutu) Meliputi mutu konstruksi yang dihasilkan dengan standar teknis yang ditentukan.	
		b. Kuantitas(RAB) Ketepatan volume/ over prestasi yang dilaksanakan	
2	Ketepatan Waktu	Kecepatan pelaksanaan tanpa mengurangi Kualitas pekerjaan	

No.	FAKTOR PENILAIAN	VARIABEL PENILAIAN	NILAI
1	2	3	4
3	Metodologi Kerja	a. Personil Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, termasuk tenaga teknik/ pelaksana	
		b. Peralatan Jumlah dan kinerja alat	
		c. Sistem Kerja Sistematika dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan termasuk di dalamnya kemampuan rekayasa teknis	
4.	Ketepatan Administrasi	Meliputi: kelengkapan penyampaian administrasi dari pelaporan	
5.	Antisipasi Penanganan Masalah	Meliputi: Ketepatan dan kecepatan penanganan masalah yang muncul, termasuk komunikasi dengan pengguna jasa serta pendekatan dengan masyarakat sekitar	
		TOTAL NILAI	
		RATA-RATA NILAI	
		KESIMPULAN PENILAIAN (A/B/C/D/E)	
<p>Keterangan: Gradasi Nilai : Baik sekali (A) = 91-100 Baik (B) = 81-90 Cukup (C) = 61-80 Kurang (D) = 41-60 Jelek Sekali (E) = 0-40</p>			

Temanggung,.....

Mengetahui/ Menyetujui
PENGUNA ANGGARAN

Penilai
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
NIP

.....
NIP.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung, 2006-2009

2.4. Daftar Simak

Hardjowijono dan Muhammad (2008) menyatakan bahwa Daftar Simak adalah kumpulan buku yang digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan disusunnya Daftar Simak di bidang pengadaan barang/jasa, dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrumen bagi segenap lapisan dan kekuatan masyarakat, agar dapat secara aktif berperan serta mencegah merajalelanya korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (Hardjowijono & Muhammad, 2008). Masyarakat selanjutnya dapat melakukan fungsinya sebagai “peniup peluit” (*whistleblower*) atau semacam “*watchdog*” (anjing pengawas) yang akan segera memberikan alarm atau upaya pencegahan dan pengungkapan penyimpangan di bidang pengadaan barang/ jasa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

Pengadaan pelelangan barang/jasa rawan terhadap pemerasan dalam jabatan: penyipuan, gratifikasi, benturan-benturan kepentingan dan penggelapan. Tindak pidana korupsi masih didominasi oleh kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan kejadian tersebut ditemukan pada lembaga pemerintah dan pemerintahan di daerah baik kabupaten maupun kota. Hal ini dapat dilihat pada tampilan grafik pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004 s.d. 2009

Sumber: KPK dalam Seminar “Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi” di UKSW Salatiga, 2010

Dari berbagai tindak perkara korupsi di Indonesia tahun 2004 s/d 2009 terdapat jenis perkara dari mulai pengadaan barang/jasa, perijinan, penyuapan, pungutan, dan penyalahgunaan anggaran. Temuan perkara pengadaan barang/jasa pada tahun 2004 s/d 2009 merupakan tindak pidana yang paling besar jumlahnya sebanyak 70 perkara, dibandingkan dengan jenis perkara perijinan hanya 10 perkara, penyuapan 38 perkara, pungutan 12 perkara, dan penyalahgunaan anggaran 26 perkara .

Daftar Simak pengadaan barang/ jasa ini dapat digunakan oleh berbagai komponen masyarakat dalam upaya mencegah dan mengungkapkan praktik korupsi di bidang pengadaan barang/ jasa, baik yang terjadi di tingkat nasional maupun regional dan lokal, baik yang tergolong kecil maupun yang besar. Daftar simak ini diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat (*public awareness*) yang maksimal bagi masyarakat, disamping dapat pula memberikan pengetahuan praktis tentang modus-modus operandi korupsi di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah (Kurniawan, 2003). Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 349/KPTS/M/2004 Daftar Simak disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada pengguna jasa dalam pengendalian pelaksanaan kontrak agar tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil proyek yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Faktor-faktor yang ada dalam daftar simak dokumen kualifikasi antara lain :

1. Surat Minat
2. Pakta Integritas
3. Isian Penilaian Kualifikasi yang terdiri dari:
 - a. administrasi umum
 - b. ijin usaha
 - c. landasan pendirian perusahaan
 - d. pengurus perusahaan yang terdiri dari komisaris (untuk PT) dan direksi/penanggung jawab/pengurus perusahaan
 - e. data keuangan terdiri dari susunan kepemilikan saham (untuk PT) dan susunan persero (untuk CV atau firma), pajak, neraca perusahaan terakhir
 - f. data personalia terdiri dari tenaga ahli/teknis yang diperlukan
 - g. data peralatan
 - h. pengalaman perusahaan nilai tiga paket tertinggi, pengalaman di bidang sub bidang yang sesuai
 - i. data pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Daftar macam kumpulan daftar simak:

1. Panitia Pengadaan
2. Penetapan Sistem Pengadaan
3. Prakualifikasi
4. Pasca Kualifikasi
5. Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi
6. Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi
7. Pelelangan Terbatas
8. Pemilihan Langsung
9. Penunjukan Langsung
10. Dokumen Kontrak .

Contoh Formulir Daftar Simak seperti terlampir pada Lampiran A.

2.5. Nilai Ambang Lulus (*Passing Grade*)

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, nilai ambang lulus (*Passing Grade*) adalah nilai batas yang digunakan sebagai instrumen penilaian rekanan yang ikut pada lelang kegiatan pengadaan barang/jasa. Komponen nilai *passing grade*/ambang lulus terdiri dari:

1. Penilaian Keuangan, terdiri dari: Dukungan Bank (penyedia barang/jasa harus mendapatkan dukungan bank pemerintah minimal 10%), Sisa Kemampuan Keuangan (penyedia barang/jasa harus masih mempunyai sisa keuangan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut)

Faktor keuangan penyedia barang/jasa harus didukung minimal 10% dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari bank umum. Faktor keuangan dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

- a. Evaluasi Harga Penawaran

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran./ HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

- b. Evaluasi Kewajaran Harga

- 1) Harga penawaran dinilai terlalu rendah apabila:

- a) Hasil evaluasi yang mengindikasikan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan, karena penawar akan menderita kerugian yang

lebih besar dibandingkan dengan keuntungan. Indikasi kerugian diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan, keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa harga satuan dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.

b) Terhadap penawaran dengan indikasi seperti butir a). dilakukan klarifikasi. Apabila jawaban penawar dapat diterima oleh panitia pengadaan, maka jaminan pelaksanaan tidak perlu dinaikkan.

c) Apabila dari hasil klarifikasi, harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang, maka peserta lelang harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara dan penawar diblack list selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pelelangan pada instansi pemerintah.

- 2) Diperhitungkan preferensi harga dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = \frac{100}{100 + KP} \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dikali Preferensi)

HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

HEA hanya untuk menentukan ranking penawaran, tidak mengubah harga penawaran.

- 3) Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia pengadaan dilakukan klarifikasi.

2. Penilaian Teknis, terdiri dari: Kemampuan Dasar (Penyedia barang/jasa harus mempunyai Kemampuan Dasar yang lebih besar dari nilai paket yang dilelangkan), Pengalaman Perusahaan (penyedia barang/jasa harus mempunyai pengalaman

pekerjaan pada bidang dan sub bidang yang sama dengan yang dilelangkan, nilai kontrak yang lebih tinggi, dan berstatus sebagai penyedia jasa), Personil (penyedia barang/jasa harus mempunyai tenaga inti yang diperlukan), Peralatan (penyedia barang/jasa harus mempunyai peralatan yang diperlukan) dan Metode Pelaksanaan atau Manajemen Mutu. Metode Pelaksanaan digunakan dengan pagu anggaran kurang dari Rp.2.500.000.000 atau Pekerjaan Kecil sedangkan Pekerjaan Non Kecil dengan pagu anggaran di atas Rp. 2.500.000.000 menggunakan Manajemen Mutu).

Faktor teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Sedangkan evaluasi teknis meliputi:

a) Metode pelaksanaan/ manajemen mutu,

Metode pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila:

- memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk menyelesaikan pekerjaan
- metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan
- yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan/manajemen mutu adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

b) Jadwal pelaksanaan

Jadwal waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan.

c) Spesifikasi teknis

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Jenis pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak boleh kurang kualitasnya dari ketentuan dokumen lelang.

d) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

e) Personil inti

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

f) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

g) Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang

Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan daftar kuantitas dan analisa harga satuan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan perlu dilakukan klarifikasi. Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga.

3. Penilaian Administrasi, terdiri dari: Data Administrasi Umum, Ijin Usaha, Landasan Hukum pendirian perusahaan, data keuangan, data personil tenaga ahli/teknis, data peralatan, data pengalaman, data pekerjaan yang sedang dilakukan .
4. Penilaian Surat Minat berisi pernyataan bahwa penyedia jasa berminat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa.
5. Penilaian Pakta Integritas, berisi ikrar untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Penilaian Kualifikasi, berisi dokumen-dokumen persyaratan yang sesuai dengan pengadaan barang/jasa.

Nilai ambang lulus dibagi menjadi 2 jenis karakteristik pekerjaan yaitu:

- a. Nilai 75 untuk pekerjaan yang tidak kompleks (ditentukan panitia)
- b. Nilai 60 untuk pekerjaan yang kompleks (ditentukan panitia)

Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP). Sisa Kemampuan Paket (SKP) ditentukan sesuai dengan karakteristik penyedia jasa usaha. Untuk penyedia jasa usaha kecil $KP = 3$, sedangkan untuk jasa bukan usaha kecil nilai $KP = 8$ atau $KP = 1,2 N$.

Nilai SKP = $KP - (\text{jumlah paket yang sedang dikerjakan})$

Keterangan:

KP = kemampuan menangani paket pekerjaan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian administrasi (lulus/ gugur)
2. Penilaian keuangan (nilai = 10)
 - a. Dukungan bank (DB)

Penyedia jasa yang tidak menyerahkan dukungan bank sekurang-kurangnya 10% dari nilai paket yang akan dilelangkan tidak akan mendapat nilai.
 - b. Sisa kemampuan keuangan (SKK)

Nilai 10 untuk usaha kecil
Nilai 7,5 untuk bukan usaha kecil
3. Penilaian teknis
Nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5
Penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan.
 - a. Kemampuan Dasar (KD)
 - b. Pengalaman perusahaan
 - c. Personil
 - d. Peralatan
 - e. Manajemen Mutu atau Metode Pelaksanaan
4. Ambang Lulus (*Passing Grade*)

Panitia pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus. Bagi penyedia jasa yang memenuhi nilai ambang lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP).
5. Sisa Kemampuan Paket (SKP)

Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3
Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 8 atau KP = 1,2 N

Keterangan:

KP = kemampuan menangani paket pekerjaan

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Bagi penyedia jasa yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi. Contoh Formulir Kualifikasi dan Penilaian *Passing Grade/Ambang Lulus* terdapat pada lampiran B

2.6. Interaksi Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

a. Negara

Pilar pertama Negara (*state*) dimaknai sebagai atau merupakan pemerintah (termasuk di dalamnya lembaga eksekutif dan legislatif). Kata negara menurut Suseno (1996) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis; kedua, negara sebagai lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dengan demikian menguasai wilayah itu. Artinya negara dimaknai sebagai pusat pemersatu masyarakat atau warga negaranya serta mempunyai fungsi dasar dan hakiki sebagai pembuat ketetapan, aturan-aturan kelakuan yang mengikat warga masyarakatnya.

Oleh karena itu, salah satu tugas utama negara di masa yang akan datang dan paling penting adalah penciptaan suatu lingkungan politik yang kondusif bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainability human development*) dengan meredefinisi peranan pemerintah di dalam integrasi sosial, ekonomi serta proteksi lingkungannya. Sementara itu dalam posisi lain, negara menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pengaturan (*regulating*) bagaimana cara melayani masyarakat dan fungsi pengajaran supaya lebih memberdayakan masyarakat (*empowering*).

b. Sektor Swasta

Pilar kedua adalah sektor swasta (*private sector*). Sektor ini telah lama memainkan peran yang penting dalam pembangunan melalui pendekatan pasar. Menurut Widodo (2001), sektor swasta sangat berkaitan dengan upaya penciptaan kondisi dimana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas sektor swasta dalam suatu bingkai kerja "*incentive and reward*" (insentif dan penghargaan) secara ekonomi bagi individu maupun organisasi. Sementara dalam perspektif ekonomi hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh W.J Stanton dalam Swasta (1988), bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.

Mandar (2003) menyatakan bahwa dalam interaksinya sebagai pilar pemerintahan (*governance*), sektor ini menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. keberhasilan kegiatan usaha didasarkan pada keunggulan dari operasi yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif dalam iklim ekonomi dan keinginan pasar yang terus berubah
2. setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha mempunyai tanggungjawab moral untuk menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan persaingan tidak adil
3. setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha harus mematuhi asas-asas untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) perusahaan, termasuk pemilik/ pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat umum
4. setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha akan mematuhi asas dan praktek dari *good corporate citizenship* (kewarganegaraan yang bekerjasama dengan baik), antara lain dengan melindungi lingkungan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat di sekitarnya.

c. Masyarakat

Pilar ketiga adalah Masyarakat Sipil yang selanjutnya diterjemahkan menjadi Masyarakat Madani, yang semakin mendapat tempat dalam wacana politik Indonesia. Harus diakui bahwa pemahaman atas terminologi tersebut masih terus berkembang dan karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan. Namun hal itu sangat wajar, mengingat hal serupa juga terjadi pada negara-negara yang sudah lama mengenal dan menggunakan terminologi tersebut, baik dalam wacana ilmiah maupun keseharian, seperti disampaikan oleh Hikam (1996) bahwa justru dengan keragaman dalam pemahaman ini, sintesa-sintesa baru dan gagasan-gagasan yang masih orisinal diharapkan muncul, sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang lebih baik untuk konteks Indonesia.

Sementara menurut Henningsen dalam Hikam (1996), masyarakat madani (*civil society*) secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.

Hal ini menyiratkan keharusan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingannya di depan umum. Dalam diri masyarakat madani telah

menyiratkan kemandirian dan kematangan politis, sehingga ia tidak perlu sepenuhnya tunduk pada negara atau hanya sebagai alat bagi kelas tertentu saja.

Justru masyarakat madani dalam pengertian ini merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensi negara. Pada saat yang sama mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflective forces*) dalam masyarakat yang dapat mencegah atau mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi sosial modern.

Dengan demikian, *civil society* (masyarakat sipil) mengandaikan pula sebuah *political society* (masyarakat politis) di dalamnya. Oleh karena itu, pandangan filosofis Hannah Arendt dalam Hikam (1996) *civil society* yang reflektif tersebut mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan keberadaan ruang publik yang bebas (*a free public sphere*).

Kedua elemen inilah, esensi dari *civil society*, karena disanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna dapat benar-benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah secara normatif, individu-individu dalam posisinya yang setara dapat melakukan interaksi wacana (*discursive transactions*) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Secara teoritis, *civil society* dapat diartikan sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik.

2.7. Konsep Analisis Multi Kriteria (AMK)

Pendekatan AMK dalam analisis pengambilan keputusan dikembangkan sebagai jawaban atas semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan untuk menentukan sebuah kebijakan, dimana banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan bermacam pihak yang harus diakomodasikan. Teknik AMK umumnya mengaplikasikan analisis numerik terhadap suatu matriks kinerja dalam dua tahapan, yaitu:

1. Skoring; besarnya preferensi terhadap suatu alternatif (pilihan) terhadap kriteria tertentu. Dalam hal ini skor yang lebih tinggi dari suatu alternatif menunjukkan preferensi yang lebih tinggi terhadap alternatif tersebut.
2. Pembobotan; pemberian suatu bobot yang ditetapkan untuk setiap kriteria yang menyatakan penilaian relatif antar kriteria.

Untuk menyusun bobot relatif antar kriteria perlu dilakukan survey terhadap *stakeholder* atau aktor yang terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan dalam

proses pengadaan. Survey dilakukan untuk memperoleh matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) sesuai persepsi responden dari setiap kriteria perencanaan yang diajukan. Hasil wawancara dapat diterjemahkan kedalam bentuk matriks perbandingan berpasangan yang diperlihatkan untuk kemudian dapat dilakukan proses pembobotan relatif antar kriteria.

2.8. Prinsip Dasar AHP

Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* atau Proses Hirarki Analitik pada awalnya dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli Matematika dari Universitas Pittsburg Amerika Serikat awal tahun 1970-an. Metode *AHP* merupakan suatu perangkat untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang sulit. Metode ini bekerja berdasarkan kombinasi input berbagai pertimbangan dari para pembuat keputusan yang didasarkan pada informasi tentang elemen-elemen pendukung keputusan tersebut, yaitu untuk menentukan suatu set pengukuran prioritas dalam rangka evaluasi terhadap berbagai alternatif yang akan diambil dalam suatu produk keputusan.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode *AHP*, terdapat beberapa prinsip dasar dari metode *AHP* yang harus dipahami yaitu sebagai berikut (Saaty, 1994):

1. *Decomposition* (prinsip menyusun hirarki).
2. *Synthesis of Priority* (penyusunan dan penetapan prioritas).
3. *Logical Consistency* (prinsip konsistensi logika).

Prinsip *Decomposition* menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara hirarkis, yaitu memecah persoalan menjadi elemen-elemen yang terpisah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, elemen-elemen tersebut dipecahkan lagi sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan.

Penyusunan dan penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya dengan melakukan perbandingan secara berpasangan terhadap elemen-elemen tersebut. Konsistensi logis yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis.

a. Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*)

Kelebihan dari metode *AHP* adalah kemampuan yang dimilikinya untuk menggabungkan unsur-unsur kualitatif dan kuantitatif. Kuantifikasi dari hal-hal yang bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan persepsi perbandingan yang diskalakan secara berpasangan (*pairwise comparison scale*). Seseorang yang akan memberikan persepsi tersebut harus mengerti secara menyeluruh mengenai variabel-variabel yang diperbandingkan dan relevansinya terhadap tujuan yang dimaksudkan. Pertanyaan yang diajukan dalam melakukan perbandingan adalah :

1. Variabel mana yang lebih penting dan,
2. Berapa kali lebih penting.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat dengan mudah, logis dan akurat memberikan persepsi perbandingan antara dua hal. Dalam melakukan perbandingan secara berpasangan, digunakan skala perbandingan (skala fundamental) yang diturunkan berdasarkan riset psikologis atas kemampuan individu dalam membuat suatu perbandingan secara berpasangan terhadap beberapa elemen yang akan dibandingkan (Saaty, 1994). Skala perbandingan tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Skala Penilaian Antar Kriteria

Perbandingan nilai relatif antara kriteria i dan kriteria j (X_{ij})	Definisi Penilaian	Penjelasan
1	Sama penting	Dua kriteria (i dan j) memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam memenuhi tujuan
3	Relatif lebih penting	Kriteria i sedikit lebih penting dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
5	Lebih penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan yang cukup besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
7	Sangat penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan sangat besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
9	Jauh lebih penting	Kriteria i memiliki tingkat kepentingan jauh lebih besar dibandingkan kriteria j dalam memenuhi tujuan
2, 4, 6, 8	Nilai antara	Penilaian diantara nilai relatif lainnya

Sumber : Saaty (1994)

b. Penyusunan *Pairwise Matrix*

Proses perhitungan matematis dalam metode *AHP* dilakukan dengan menggunakan suatu matrik. Apabila dalam suatu sub sistem operasi terdapat n kriteria operasi yaitu A_1, A_2, \dots, A_n , maka hasil perbandingan dari elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matrik A berukuran $n \times n$ dengan bentuk seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria	A_1	A_2	A_n
A_1	1	A_{21}	A_{1n}
A_2	A_{12}	1	A_{2n}
.....	1
A_n	A_{1n}	A_{2n}	1

Sumber : Saaty, 1994

Pengisian nilai a_{ij} menggunakan aturan sebagai berikut (Saaty, 1994) :

- a. Jika $a_{ij} = \infty$, maka $a_{ji} = 0$
- b. Jika antara elemen operasi A_i dengan A_j mempunyai tingkat kepentingan yang sama maka nilai $a_{ij} = a_{ji} = 1$
- c. Nilai $a_{ij} = 1$ untuk $i = j$ (diagonal matrik memiliki nilai 1)

Dari matrik perbandingan berpasangan tersebut di atas, dilakukan pembobotan parsial dengan langkah sebagai berikut :

- 1. Menjumlahkan nilai setiap kolom dalam matrik perbandingan berpasangan.
- 2. Membagi nilai a_{ij} pada setiap kolom dengan jumlah nilai pada kolom bersangkutan sehingga diperoleh matrik yang dinormalisasi.
- 3. Menjumlahkan semua nilai setiap baris dari matrik yang telah dinormalisasi dan membaginya dengan jumlah elemen tiap baris, yang merupakan nilai bobot parsial.

c. Uji Konsistensi

Perbandingan berpasangan dari masing-masing elemen dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, kepentingan atau perasaan. Dalam penilaian perbandingan berpasangan sering terjadi ketidakkonsistenan dari preferensi yang diberikan oleh pengambil keputusan. Dalam metode *AHP*, konsistensi dari penilaian berpasangan tersebut dievaluasi dengan menghitung *Consistency Ratio (CR)*.

Apabila nilai *CR* lebih kecil atau sama dengan 10%, maka hasil penilaian tersebut dikatakan konsisten.

Formulasi yang digunakan dalam menghitung *CR* (Saaty, 1994) adalah sebagai berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (2.1)$$

Keterangan :

- CR : *Consistency Ratio*
 CI : *Consistency Index*
 RI : *Random Consistency Index*

Nilai dari *Consistency Index* diperoleh dengan rumus (Saaty, 1994) sebagai berikut :

$$CI = \frac{\lambda \max - 1}{(n - 1)} \quad (2.2)$$

Keterangan :

- CI : *Consistency Index*
 $\lambda \max$: Nilai maksimum dari *eigenvalue*
 n : Ukuran matrik

Apabila *CI* bernilai nol, berarti matrik konsisten. Batas tidak konsisten diukur dengan menggunakan nilai pembangkit *random (RI)*. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika pertimbangan numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 9 akan diperoleh nilai rata-rata konsistensi untuk matrik dengan ukuran yang berbeda seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4. Nilai Random Index (RI)

OM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,58

Sumber: Saaty (1994)

Keterangan : OM = Orde Matrik, RI = Random Index

AHP mendeskripsikan suatu pendekatan terstruktur dalam mengambil keputusan sebagai suatu pilihan umum diantara sejumlah alternatif yang dianggap mampu memenuhi serangkaian tujuan. Bobot relatif antar kriteria diperoleh dari *pairwise comparison* hasil persepsi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Inti dari *AHP* adalah pada metode untuk mengkonversi perkiraan subyektif dari tingkat kepentingan relatif ke dalam suatu set skor atau bobot total.

Metode ini pertama kali dikemukakan oleh Saaty, input dasar untuk *AHP* adalah jawaban para pengambil keputusan terhadap serangkaian pertanyaan yang dalam bentuk umum dapat diekspresikan sebagai berikut: “Seberapa penting kriteria A relatif terhadap kriteria B?”. Kondisi ini menyatakan adanya perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan dengan memberikan suatu skala penilaian yang menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat kepentingan antara dua kriteria, yang memberikan skala penilaian yang lazim digunakan untuk membandingkan tingkat kepentingan antara dua variabel. Dari hasil perbandingan berpasangan tersebut akan didapatkan suatu matriks perbandingan berpasangan.

Dalam metode dasar yang dikembangkan oleh Saaty (1994) untuk mengidentifikasi bobot suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar matriks dan menghitung bobot sebagai elemen dari suatu *eigenvector* yang diasosiasikan dengan maksimum *eigenvector* dari suatu matriks. Prosedur estimasinya relatif kompleks, dengan alternatif yang lebih pintas adalah sebagai berikut :

1. Menghitung rata-rata geometrik dari setiap baris dalam matriks.
2. Menjumlahkan seluruh rata-rata geometrik yang dihasilkan pada langkah pertama.
3. Menormalisasi setiap rata-rata geometrik dengan membaginya dengan total seluruh rata-rata geometrik yang dihitung pada langkah kedua.

Bobot relatif antar kriteria dan skor yang dihitung dengan perbandingan berpasangan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan *linear additive model* (model penjumlahan linear), dimana semua alternatif memiliki skor terbobotkan.

d. Pembobotan

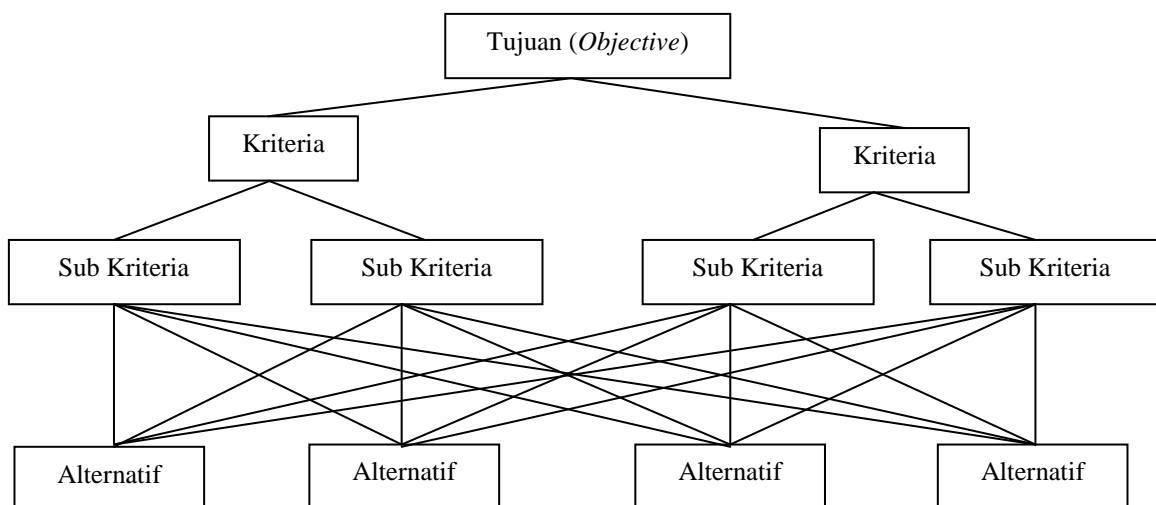
Untuk menyusun bobot antar kriteria perlu dilakukan survei terhadap *stakeholders* (pemangku kepentingan) yang terlibat dan berkepentingan dengan proses pelelangan jasa pemborongan di lokasi studi. Setelah dilakukan survei, didapat data untuk memperoleh

matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) sesuai persepsi responden dari setiap kriteria perencanaan yang diajukan.

Hasil wawancara dapat diterjemahkan kedalam bentuk matriks perbandingan berpasangan dan selanjutnya dapat dilakukan proses pembobotan. Penilaian bobot atau skoring alternatif terhadap kriteria umumnya dilakukan dalam skala antara 0 sampai 10 atau angka yang sifatnya numeris yang mewakili proporsi tingkat kepentingannya. Penilaian ini cenderung bersifat lebih subjektif tetapi sifat kuantitatifnya yang digunakan menjadi deskripsi dari persoalan yang akan dianalisis.

e. Proses Analisis Hirarki atau Skoring

Proses pengambilan keputusan dengan model *Analytical Hierarchy Process (AHP)* mendeskripsikan suatu pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan. Pilihan di antara sejumlah alternatif dengan model *AHP*, dianggap mampu memenuhi serangkaian tujuan dalam pengambilan keputusan. Pada intinya *AHP* membutuhkan dua masukan, yakni pembobotan (*weighting*) dan skoring (*scoring*). Pembobotan diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan hasil persepsi *stakeholders* (pemangku kepentingan). Sedangkan skoring untuk jumlah alternatif yang paling cocok dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* (penilaian ahli). Porsi penilaian (*judgment*) dalam proses skoring dapat diminimalkan jika variabel alternatif diusahakan merupakan beberapa data kuantitatif yang dapat diperbandingkan secara langsung. Skema proses AHP terlihat pada Gambar 2.4.

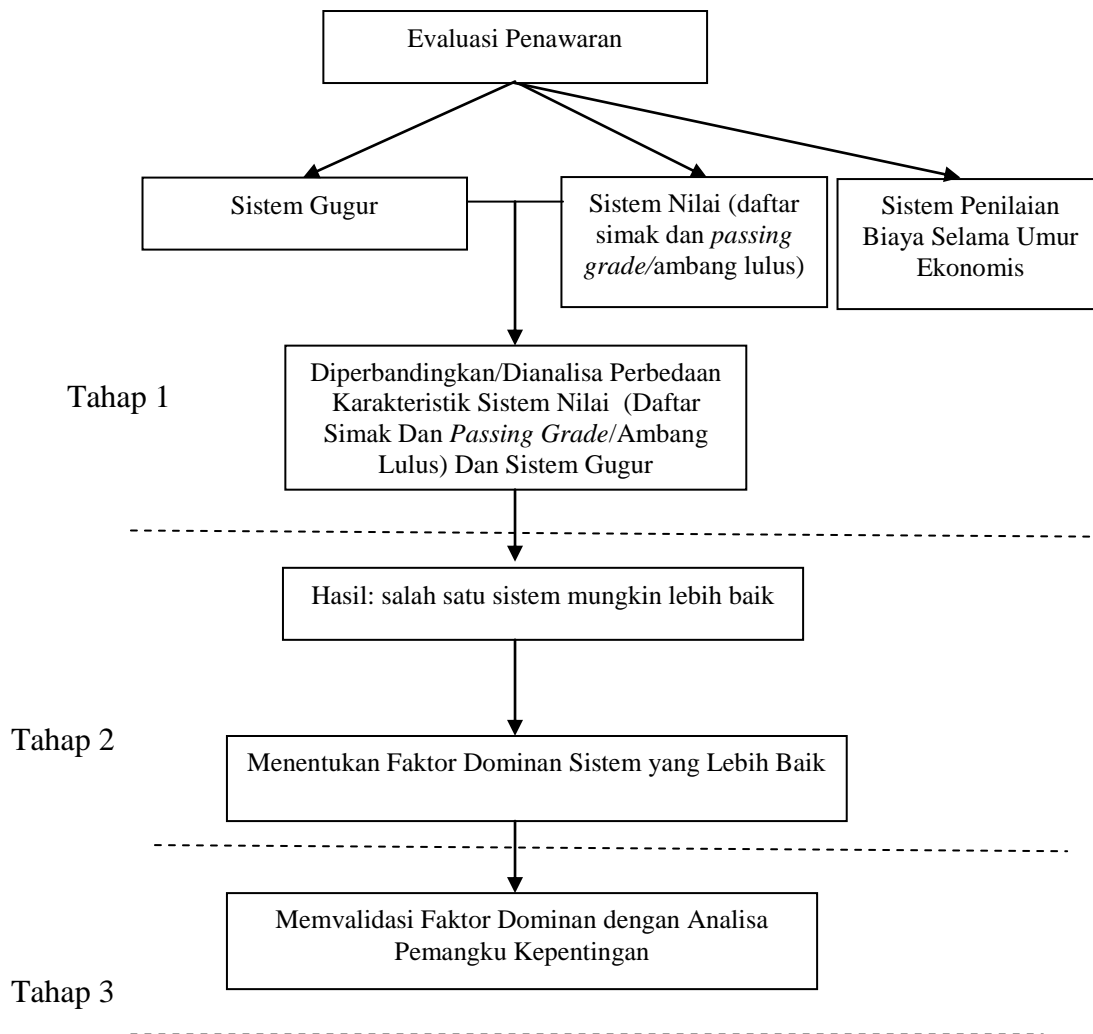


Gambar 2.4. Skema Proses Analisis Hirarki

Pembobotan diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan hasil persepsi pemangku kepentingan (*stakeholders*) Inti dari *AHP* adalah metode untuk mengkonversi perkiraan subjektif dari tingkat kepentingan relatif ke dalam suatu set skor atau bobot total.

2.9. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu sistem gugur dan sistem nilai (*passing grade/ambang lulus*). Sebagaimana tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu menganalisa perbedaan karakteristik sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*), menentukan faktor dominan yang mempengaruhi *passing grade* dan ambang lulus dengan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* dan memvalidasi hasil analisa maka alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.5. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

Metode evaluasi penawaran yang akan diteliti adalah sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Kedua sistem ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Guna melihat perbandingan karakteristik antara kedua sistem perlu penguraian sistem tersebut kedalam kriteria dan sub kriteria. Salah satu sistem akan terbukti lebih baik daripada lainnya. Sistem yang lebih baik ini perlu dianalisa faktor-faktor dominannya dengan *Analytical Hierarchy Process* guna mengetahui faktor-faktor yang membuat sistem ini secara keseluruhan lebih baik daripada sistem yang lainnya. Supaya mendapatkan data yang dapat diandalkan maka faktor dominan yang telah dianalisa perlu divalidasi lebih lanjut dengan *Forum Group Discussion*. Hasil penelitian dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatifnya digunakan pada saat mengukur relatif antara faktor-faktor yang mempengaruhi *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak dari data primer. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melaksanakan ranking hierarki dan menghitung pembobotan setiap kriteria. Kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif digunakan pada saat validasi hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil analisis AHP dan hasil interview terhadap para pemangku kepentingan di lokasi penelitian.

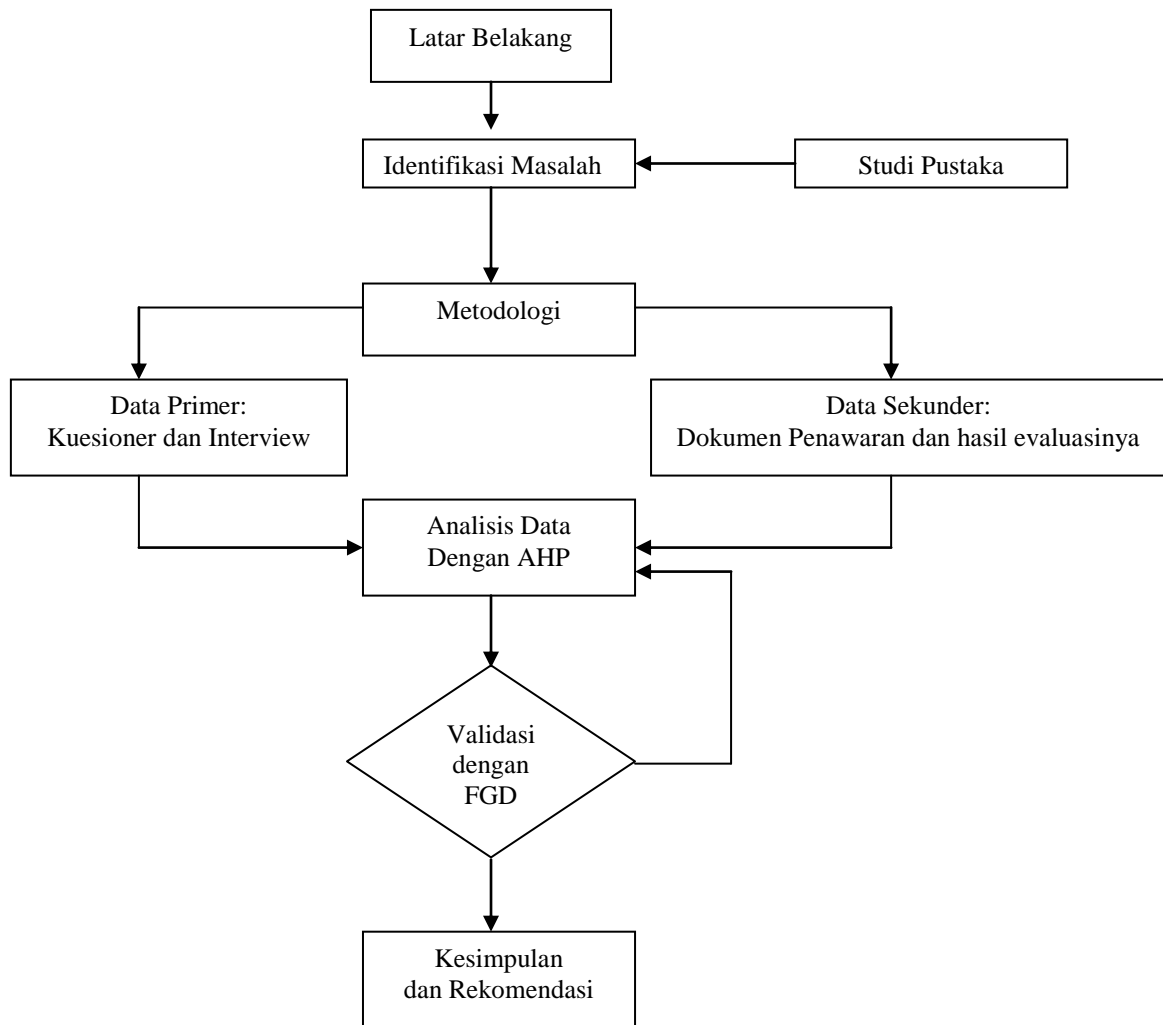
3.2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

Tahap I : Tahapan ini merupakan tahap pendahuluan untuk merumuskan kriteria dan sub kriteria dari faktor-faktor yang mempengaruhi sistem evaluasi penawaran yang diteliti yaitu Sistem Gugur dan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) yang diperoleh dari data primer (kuesioner dan interview)

Tahap II: Tahapan ini merupakan tahapan formulasi kriteria dan sub kriteria dominan yang dibentuk dari metode AHP untuk memperoleh faktor yang menentukan sistem evaluasi penawaran yaitu Sistem Gugur dan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

Tahap III: Tahapan Validasi dari hasil analisis AHP yaitu dengan diskusi kelompok yang terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*) untuk menguji kembali apakah kriteria dan sub kriteria yang dominan dalam sistem evaluasi penawaran yang diteliti konsisten dengan model yang dibangun (Model AHP). *Stakeholder* (pemangku kepentingan) yang dilibatkan adalah orang-orang yang pernah dan atau sedang terlibat pada proses evaluasi penawaran di lokasi studi seperti Pejabat Pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia jasa, dan akademisi terkait. Ketiga tahap di atas, digambarkan dalam suatu skema tahapan yang lebih detil seperti disajikan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

Analisis data dengan AHP yang dimaksud adalah pengujian variabel yang mendukung *Passing Grade* (ambang lulus) yaitu Faktor Keuangan, Teknis, Administrasi, Pernyataan Minat, Pakta Integritas dan Kualifikasi. Metode Analisis dengan kuesioner AHP berupa perbandingan berpasangan.

Validasi hasil AHP dilakukan dengan menggali informasi kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) tentang perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) meliputi variabel-variabel

1. Waktu Evaluasi
2. Biaya Evaluasi
3. Hasil Evaluasi
4. Keterperincian Persyaratan
5. Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa

6. Hasil Pekerjaan
7. Seleksi Peserta
8. Penentuan Pemenang
9. Jumlah temuan pemeriksa (BPK/BPKP/PPK/Pengguna Anggaran/Kejaksaaan/
Banwas Daerah)
10. Dasar Pedoman Pelaksanaan di Lapangan
11. Pendapat Penyedia Jasa
12. Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa
13. Batasan Evaluasi

3.3. Sumber Data

Terdapat dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuesioner yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) pada proses evaluasi penentuan pemenang lelang jasa pemborongan di Kabupaten Temanggung, serta dilengkapi hasil interview kepada *stakeholder*/ pemangku kepentingan yaitu kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Bangunan di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan antara lain:

1. Data penyedia jasa/ barang (termasuk konsultan pengawas/perencanaan) Pemerintah Kabupaten Temanggung pada instansi Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
2. Data jumlah kegiatan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung pada instansi Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
3. Data penyedia barang/ jasa yang terkena permasalahan dari tim pemeriksa (BPK/BPKP/PPK/Pengguna Anggaran/Kejaksaaan/Banwas Daerah).

3.4. Rancangan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah jajaran instansi Kabupaten Temanggung yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

b. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2008) berpendapat bahwa *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah para pihak terkait proses pengadaan barang jasa. Adapun detail responden adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang Jasa pemerintah, dan Penyedia Jasa yang terlibat dalam proses lelang pekerjaan dua tahun terakhir di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Pengumpulan Data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, asosiasi penyedia jasa dan pengguna bangunan. Pengambilan data juga dilakukan dengan studi pustaka dari dokumen terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada dua tahun terakhir sejak diterapkannya sistem *passing grade/ambang lulus* dan daftar simak.

2) Pengolahan Data dan Analisis Model

Data primer diolah dengan tabulasi dan pengkodean data supaya lebih efektif untuk analisa selanjutnya. Matrik hasil tabulasi kemudian disimulasikan dengan alat bantu software AHP *Expert Choice Decision Analyst*. Untuk mendapatkan korelasi data *passing grade/ambang lulus* dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan (pasca lelang) digunakan alat bantu analisis statistik menggunakan SPSS. Tahapan Analisis AHP pada penelitian ini meliputi tahap identifikasi faktor pemenang lelang dari daftar simak dan nilai *passing grade/ambang lulus*, dilanjutkan penyusunan hirarki faktor penilaian lelang. Untuk mengukur kecenderungan faktor digunakan kuesioner. Tahapan analisis berikutnya adalah

mengukur nilai geometrik dari variabel yang diteliti (faktor-faktor pemenang lelang) kemudian dilakukan analisis prioritas *Eigen Vektor* dengan program bantu AHP dengan nilai toleransi 0,01. Sintesis model diperoleh rangking bobot faktor-faktor pemenang lelang dan diuji konsistensinya (CR) dengan toleransi $\leq 0,01$. Faktor yang mempengaruhi pemenang lelang diurutkan menurut bobot tertinggi sampai terendah.

c. Definisi Operasional Variabel

1) Waktu Evaluasi

Waktu evaluasi dalam penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengoreksi penawaran dari penyedia barang/jasa. Waktu evaluasi disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Biaya Evaluasi

Biaya evaluasi dalam penelitian ini adalah biaya yang diperlukan dalam mengevaluasi penawaran. Biaya evaluasi ada dua macam yaitu yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan yang dibiayai penyedia barang/jasa. Biaya evaluasi penawaran di kantor dibiayai oleh panitia pengadaan barang/jasa sedangkan biaya verifikasi lapangan ditanggung oleh penyedia barang/jasa.

3) Hasil Evaluasi

Yang dimaksud hasil evaluasi dalam penelitian ini adalah hasil dari proses evaluasi penawaran yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa terhadap penawaran dari penyedia barang/jasa. Hasil evaluasi berupa penetapan calon pemenang pelelangan beserta nilai bobot/ambang lulusnya.

4) Keterperincian Persyaratan

Yang dimaksud dalam keterperincian persyaratan dalam penelitian ini adalah jumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa. Persyaratan ini tercantum dalam Rencana Kerja Syarat.

5) Ketepatan dalam Memilih Penyedia Jasa

Ketepatan dalam memilih penyedia jasa dalam penelitian ini adalah tingkat keakuratan panitia pengadaan barang/jasa dalam memilih penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan.

6) Hasil Pekerjaan

Hasil Pekerjaan dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan penyedia barang/jasa di lapangan yang dinilai berdasarkan form penilaian kinerja penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran.

7) Seleksi Peserta

Yang dimaksud seleksi peserta dalam penelitian ini adalah penentuan terhadap siapa saja yang berhak menjadi peserta penawaran barang/jasa yang masuk dalam mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa.

8) Penentuan Pemenang

Yang dimaksud penentuan pemenang dalam penelitian ini adalah proses seleksi yang dilakukan oleh panitia barang/ jasa dalam menetapkan pemenang penawaran dan menentukan bobot ambang lulusnya.

9) Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK)

Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK) dalam penelitian ini adalah jumlah permasalahan yang ditemukan oleh tim pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK) setelah pekerjaan selesai.

10) Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan

Yang dimaksud dasar pedoman pelaksanaan di lapangan adalah syarat-syarat yang telah dipenuhi penyedia barang/jasa sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

11) Pendapat Penyedia Jasa

Pendapat penyedia jasa adalah opini penyedia jasa terhadap sistem yang dipergunakan dalam evaluasi penawaran. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua yaitu sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dan sistem gugur.

12) Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pendapat pengguna anggaran, PPK, panitia pengadaan barang jasa dalam penelitian ini adalah opini pengguna anggaran, PPK, panitia pengadaan barang/jasa terhadap sistem yang dipergunakan dalam evaluasi penawaran. Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dan sistem gugur.

13) Batasan Evaluasi

Batasan evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batasan harga terendah serta ambang lulus untuk semua penawaran dari penyedia barang/jasa.

d. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

- 1) Hasil analisis persepsi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang perbedaan karakteristik antara sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) pada penawaran lelang jasa konstruksi dengan kualitas konstruksi yang dihasilkan di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2) Diketuainya faktor-faktor dominan yang mempengaruhi *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak pada proses penentuan pemenang pekerjaan jasa pemborongan dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* sehingga dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan sistem pelelangan di masa mendatang
- 3) Memberikan keyakinan terhadap hasil penelitian terhadap persepsi dengan pihak-pihak terkait seperti akademisi, penyedia barang/jasa, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan barang/jasa dan masyarakat umum tentang hirarki pengambilan keputusan pemenang lelang dari dua sistem yang berbeda yaitu sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

BAB IV DATA DAN ANALISIS

4.1. Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini meliputi para penyedia barang/jasa, pengguna anggaran, panitia pengadaan barang/ jasa, pejabat pembuat komitmen, dan masyarakat pengguna bangunan. Responden penelitian ini diambil menggunakan *purposive sampling*. Responden mewakili *stakeholder*/pemangku kepentingan yaitu pengguna anggaran, panitia pengadaan barang/jasa, penyedia jasa, pejabat pembuat komitmen dan masyarakat. Pada penelitian ini telah diambil responden sebanyak sebelas orang dengan perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

a. Pendidikan Responden

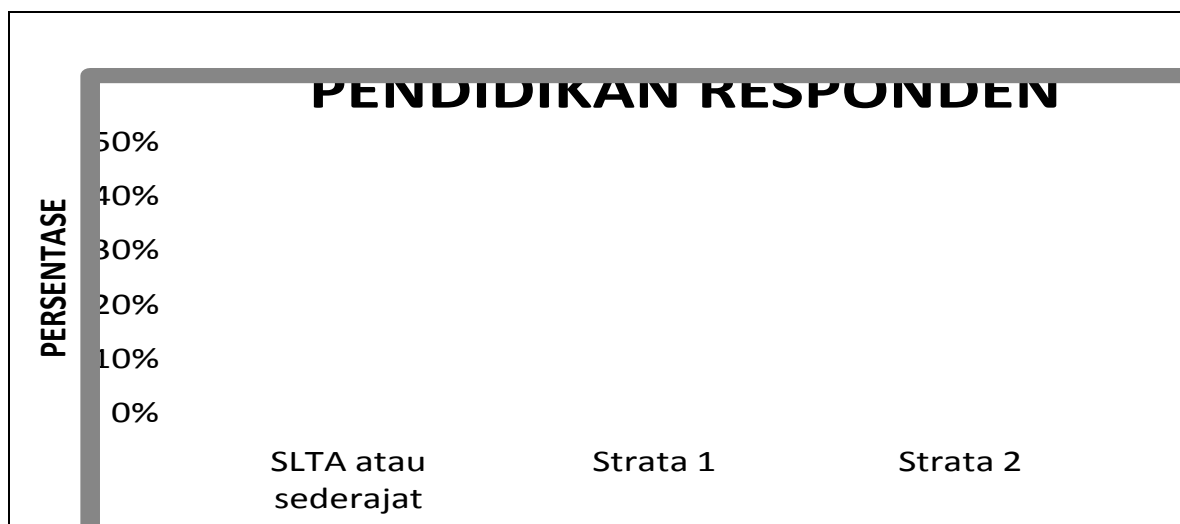
Berdasarkan tingkat pendidikannya, ada 5 (lima) responden berpendidikan SLTA dan atau sederajat, 4 (empat) responden berpendidikan Strata 1 (S1) dan 2 (dua) orang berpendidikan Strata 2 (S2). Tabel 4.1. memuat secara lebih jelas mengenai responden dan pengelompokan tingkat pendidikannya.

Tabel 4.1. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Responden	Jumlah	Jabatan Responden
1.	SLTA atau sederajat	5	Direktur Utama PT Bumi Mas Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama CV Aditya selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama CV Handayani selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama CV Asta Ghina selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama Surya Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)

No.	Pendidikan Responden	Jumlah	Jabatan Responden
2.	Strata 1	4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung selaku pengguna anggaran
			Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen
			Direktur Utama Architama selaku penyedia jasa/barang (Konsultan Perencanaan/ Pengawas)
			Direktur Utama PT Manggung Mas Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
3.	Strata 2	2	Kepala Bidang selaku Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen
			Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Selaku Pengguna Bangunan

Dari tabel diatas terdapat 5 responden sebagai direktur penyedia barang/jasa selaku responden berijazah SLTA atau sederajat. Meskipun latar belakang pendidikan responden hanya SLTA atau sederajat tapi sudah sangat berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa dengan masa kerja minimal 18 tahun. Jadi pengisian kuesioner dengan responden direktur yang berijazah SLTA atau sederajat masih layak karena para responden ini sangat menguasai materi dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner, karena materi pertanyaan dalam kuesioner sudah merupakan hal yang ditemui sehari-hari bagi responden. Tabel 4.1. dapat dituangkan dalam bentuk grafik seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Pendidikan Responden

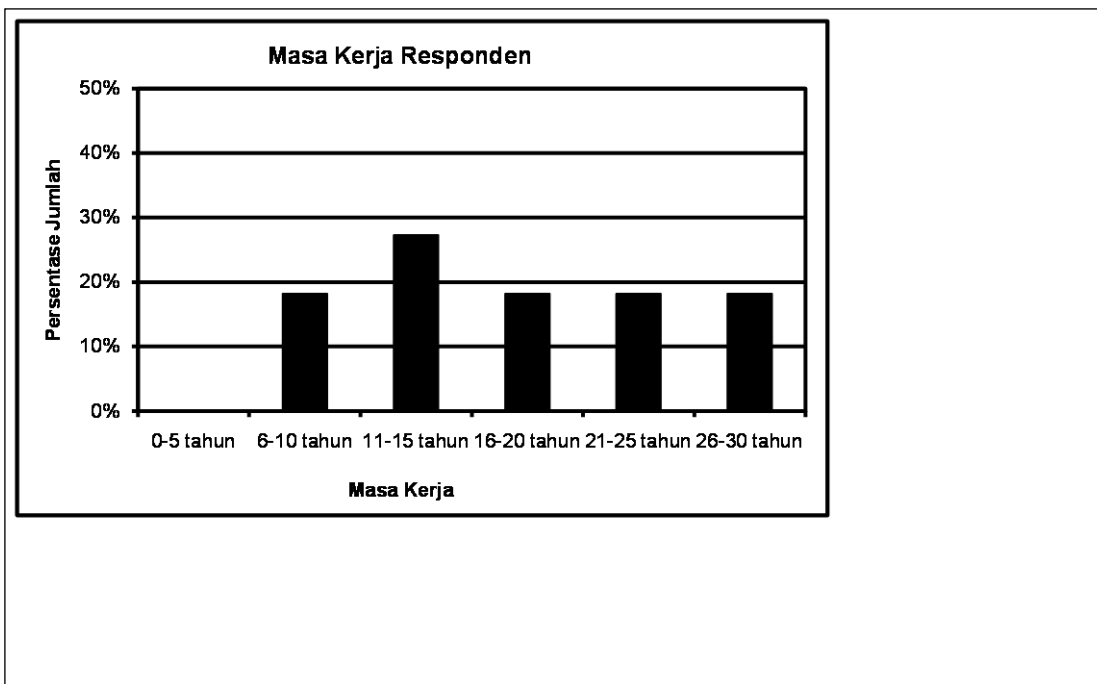
b. Pengalaman Responden

Pengalaman kerja responden minimal 7 (tujuh) tahun dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan rata-rata 18 tahun. Tabel 4.2. menampilkan pengelompokan responden berdasarkan lama pengalaman kerjanya.

Tabel 4.2. Pengalaman Responden

No.	Masa Kerja	Jumlah	Jabatan Responden
1.	0-5 tahun	0	-
2.	6-10 tahun	2	Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Selaku Pengguna Bangunan
			Direktur Utama CV. Architama selaku penyedia jasa/barang (Konsultan Perencanaan/ Pengawas)
3.	11-15 tahun	3	Kepala Bidang selaku Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen
			Direktur Utama PT Manggung Mas Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen
4.	16-20 tahun	2	Direktur Utama CV. Astagina selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama CV. Surya Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
5.	21-25 tahun	2	Direktur Utama CV. Aditya selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
			Direktur Utama CV. Handayani selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)
6.	26-30 tahun	2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung selaku pengguna anggaran
			Direktur Utama PT. Bumi Mas Perdana selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)

Gambar 4.2. memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang perbedaan responden berdasarkan masa kerjanya. Dimulai dari responden yang memiliki masa kerja paling singkat (7 tahun) sampai dengan responden dengan masa kerja paling lama (30 tahun).



Gambar 4.2. Masa Kerja Responden

c. Status Responden

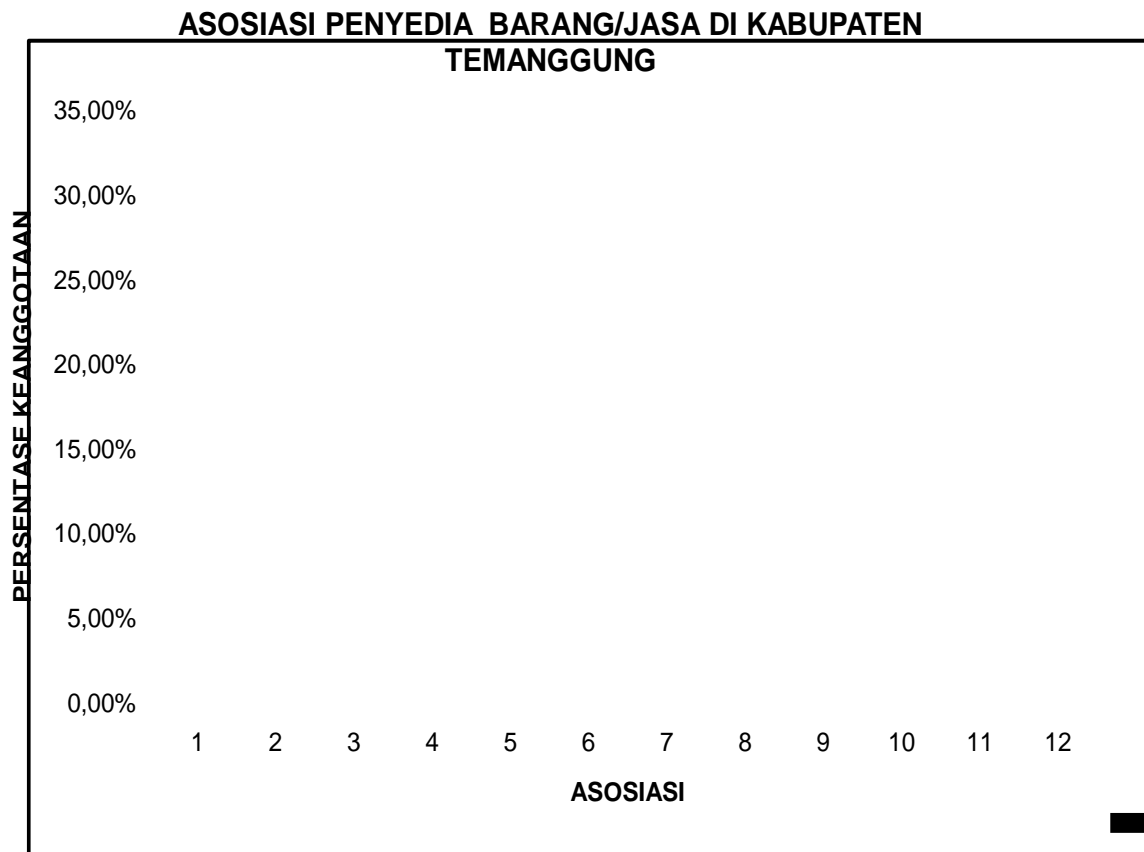
1) Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah di Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung, terdapat sebelas asosiasi penyedia barang/jasa pemerintah dengan 213 anggota. Menurut Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2010 disebutkan bahwa asosiasi yang ada di Kabupaten Temanggung adalah seperti yang tercantum pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Asosiasi Penyedia Jasa dan Jumlah Anggotanya

NO.	ASOSIASI	JUMLAH ANGGOTA
1.	ASKUMINDO	5 anggota
2.	KONSULTAN PERENCANAAN/ PENGAWASAN	7 anggota
3.	GAPEKNAS	9 anggota
4.	ASKAPPINDO	10 anggota
5.	HIPKI	10 anggota
6.	AKSI	12 anggota
7.	AKSINDO	16 anggota
8.	GAPEKSINDO	18 anggota
9.	GABPEKNAS	19 anggota
10.	APAKSINDO	22 anggota
11.	ASPEKINDO	25 anggota
12.	GAPENSI	67 anggota

Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan oleh 7 (tujuh) perusahaan yaitu CV. Verio, CV. Binar Prasasti, CV. Dinamika, CV. Dwi Pertiwi, CV. Karsa Nusantara, CV. Architama, CV. Yudha Perkasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3. tentang grafik asosiasi penyedia jasa beserta jumlah anggotanya dibawah ini.



Gambar 4.3. Asosiasi Penyedia Barang/Jasa di Kab.Temanggung

Keterangan:

- 1 = ASKUMINDO
- 2 = KONSULTAN PERENCANAAN/PENGAWASAN
- 3 = GAPEKNAS
- 4 = ASKAPPINDO
- 5 = HIPKI
- 6 = AKSI
- 7 = AKSINDO
- 8 = GAPEKSINDO

- 9 = GABPEKNAS
- 10 = APAKSINDO
- 11 = ASPEKINDO
- 12 = GAPENSI

Penelitian ini hanya mengambil 7 (tujuh) penyedia jasa sebagai responden, dengan rincian 6 (enam) penyedia jasa sebagai kontraktor dan 1 (satu) penyedia jasa sebagai konsultan perencanaan/ pengawas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. Daftar Responden Penyedia Barang/Jasa.

Tabel 4. 4. Daftar Responden Penyedia Barang/Jasa di Lokasi Penelitian

No	Jenis Penyedia Jasa	Jumlah	Jabatan Responden
1.	Kontraktor	6	Direktur Utama PT Bumi Mas Perdana
			Direktur Utama PT Manggung Mas Perdana
			Direktur Utama CV Aditya
			Direktur Utama CV Handayani
			Direktur Utama CV Asta Ghina
			Direktur Utama CV Surya Perdana
2.	Konsultan Perencanaan/ Pengawasan	1	Direktur Utama CV Architama

2) Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini jumlahnya 1 (satu) orang yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

3) Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa

Ada 2 (dua) Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang merupakan responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

4) Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan responden penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Responden tersebut juga berperan sebagai Panitia Pengadaan Barang/ Jasa.

5) Pengguna Bangunan

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Wonobojo merupakan satu-satunya responden penelitian yang mewakili Pengguna Bangunan, yang dimintai keterangannya mengenai perubahan pokok pada hasil pembangunan selama 4 tahun terakhir ini yang dikerjakan penyedia jasa.

4.2. Persepsi Stakeholder Terhadap Perbandingan Sistem Gugur dan Sistem Nilai

Pergantian sistem gugur menjadi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) ternyata menimbulkan perubahan bagi kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung. Beberapa parameter perbandingan diujikan pada responden penelitian ini. Parameter perbandingan tersebut meliputi waktu evaluasi, biaya evaluasi, hasil evaluasi, keterperincian persyaratan, ketepatan dalam memilih penyedia jasa, hasil pekerjaan, seleksi peserta yang mengikuti pengadaan, penentuan pemenang, jumlah temuan pemeriksa, dasar pedoman pelaksanaan lapangan, batasan evaluasi dan pendapat penyedia jasa dan pengguna anggaran secara umum terhadap pelaksanaan kedua sistem ini.

Tabel 4.5. Perbandingan faktor-faktor Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) Dari Responden

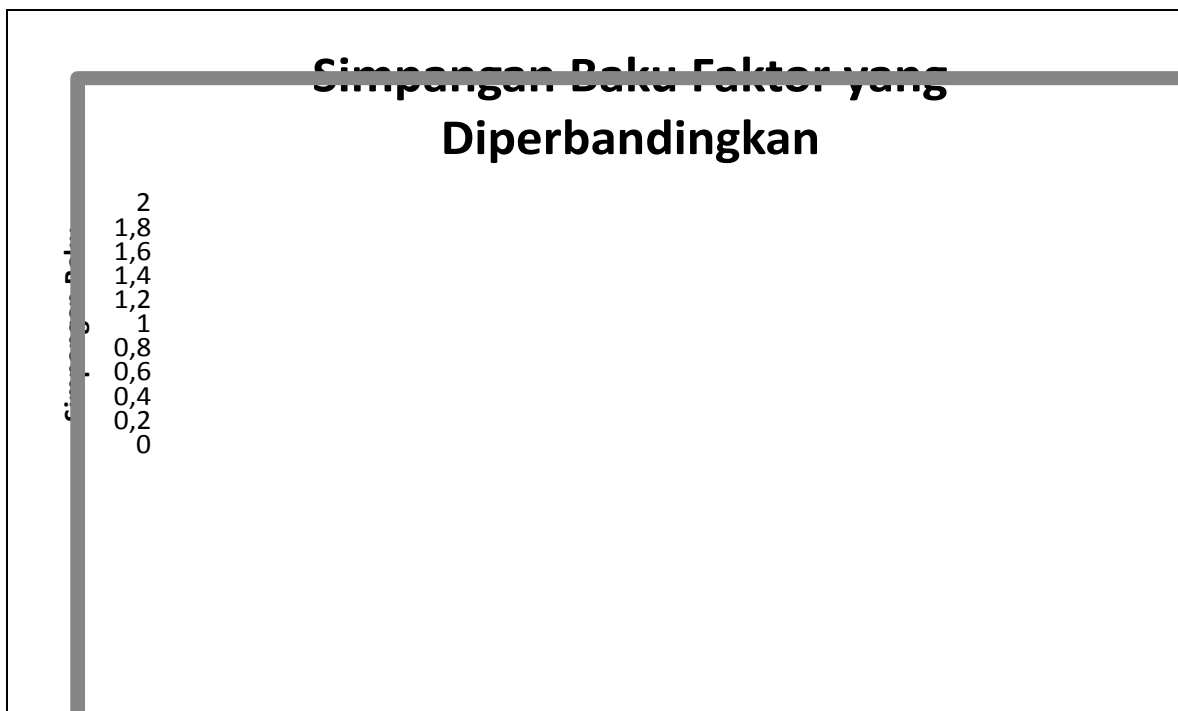
Faktor yang diperbandingkan	Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Jauh Lebih baik
Nilai	1	2	3	4	5
Waktu Evaluasi				√	
Biaya Evaluasi				√	
Hasil Evaluasi		√			
Keterperincian Persyaratan		√			
Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa		√			
Hasil Pekerjaan		√			
Seleksi Peserta		√			
Penentuan Pemenang		√			
Jumlah temuan pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan/PPK)		√			
Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan		√			
Pendapat Penyedia Jasa		√			
Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa		√			
Batasan Evaluasi		√			

Untuk menguji persebaran data maka dilakukan penghitungan standar deviasi. Semakin kecil angka standar deviasi maka semakin homogen data yang diperoleh. Dari perhitungan diperoleh simpangan baku sebagai berikut:

Tabel 4.6. Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan

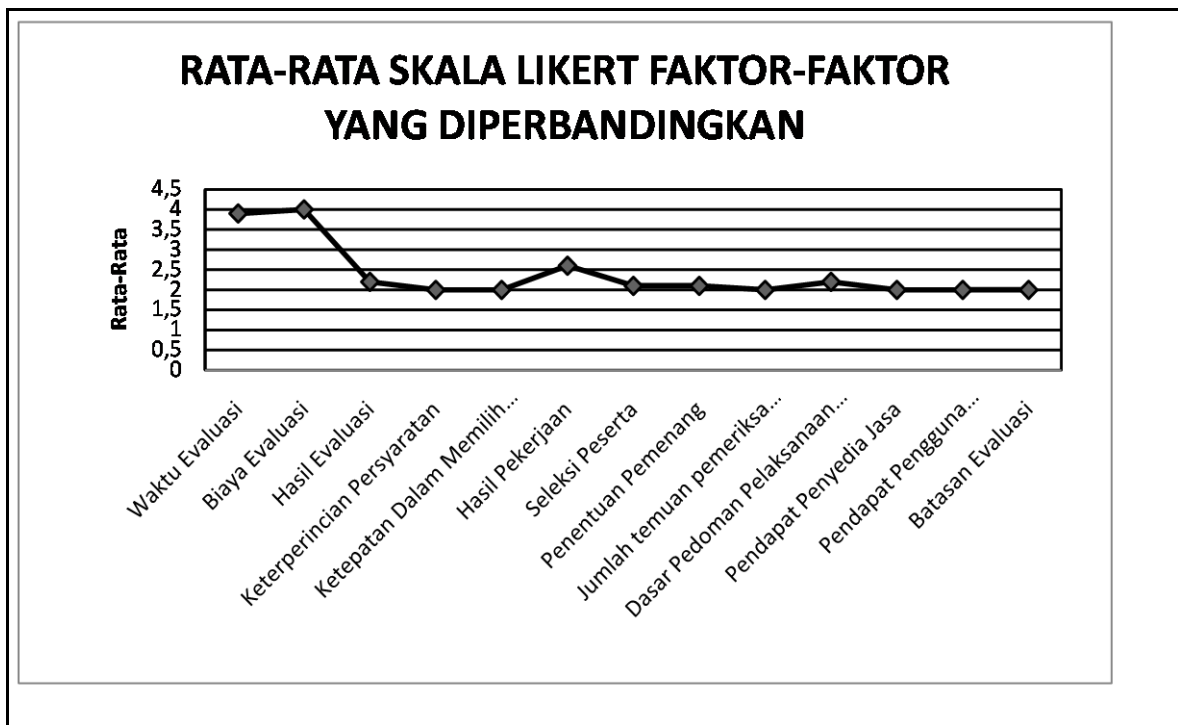
No.	Faktor	Simpangan Baku	Rata-Rata
1.	Waktu evaluasi	1,18	3,9
2.	Biaya Evaluasi	1,22	4
3.	Hasil evaluasi	1,15	2,2
4.	Keterperincian persyaratan	1,22	2
5.	Ketepatan dalam memilih penyedia jasa	1,22	2
6.	Hasil pekerjaan	1,11	2,6
7.	Seleksi peserta	1,18	2,1
8.	Penentuan pemenang	1,18	2,1
9.	Jumlah temuan pemeriksa	1,22	2
10.	Dasar pedoman pelaksanaan lapangan	1,15	2,2
11.	Pendapat penyedia barang/jasa	1,45	2
12.	Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa	1,87	2
13.	Batasan evaluasi	1,18	2

Dari perhitungan diatas dapat ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.4. dibawah ini.



Gambar 4.4. Simpangan Baku Faktor-Faktor yang Diperbandingkan

Dari Gambar 4.4. terlihat bahwa simpangan baku faktor-faktor sistem gugur yang diperbandingkan dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) semuanya memiliki nilai kecil (antara 1 s.d 2) sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data tiga belas faktor ini relatif homogen. Nilai simpangan baku terkecil terdapat pada faktor hasil pekerjaan (1,11) dan yang terbesar terdapat pada faktor pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (1,87).

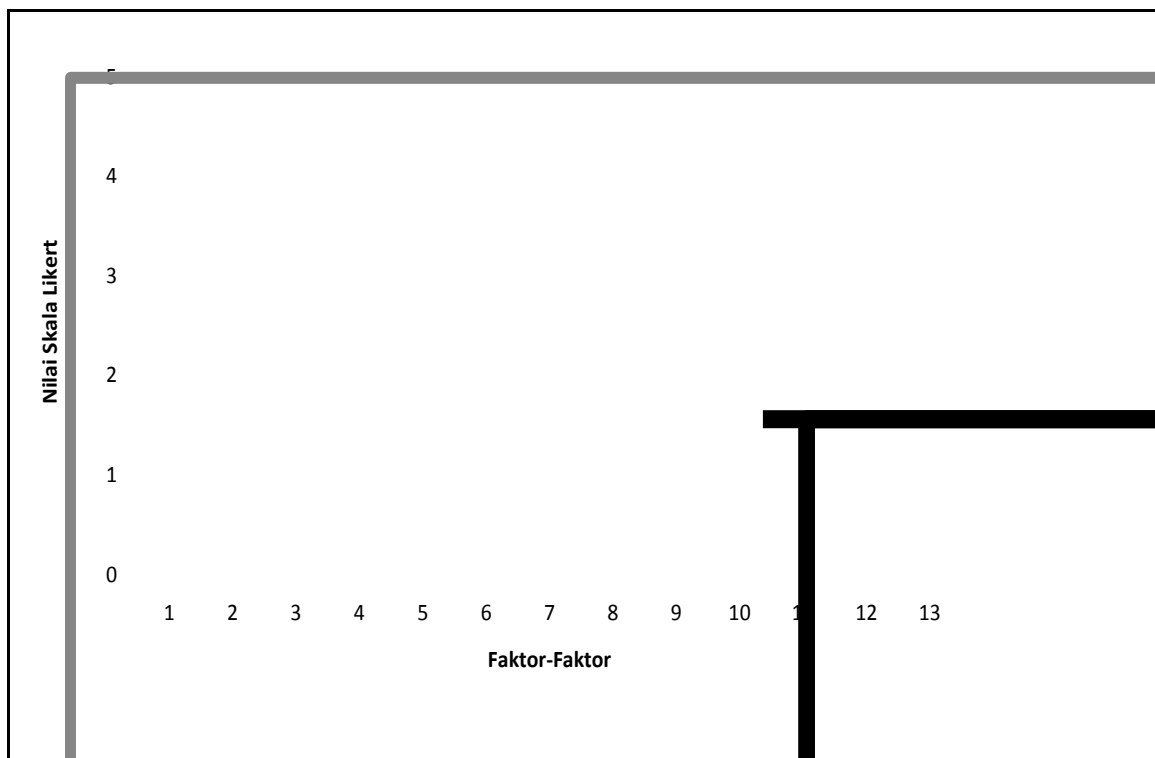


Gambar 4.5. Rata-Rata Skala Likert Faktor yang Diperbandingkan

Gambar 4.5. memperlihatkan rata-rata skala likert perbandingan faktor sistem gugur terhadap sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Faktor Waktu Evaluasi dan Biaya Evaluasi memiliki rata-rata tertinggi yaitu 3,9 untuk faktor waktu evaluasi dan 4 untuk faktor biaya evaluasi. Artinya kedua faktor ini merupakan faktor sistem gugur yang relatif lebih baik bila dibandingkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Kesebelas faktor lainnya memiliki rata-rata antara 2 sampai dengan 2,6 yang artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa sistem gugur kurang baik atau relatif sama dibandingkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dalam sebelas faktor ini.

Dari Tabel 4.5. terlihat bahwa ada 11 (sebelas) faktor sistem gugur yang menurut responden kurang baik bila dibandingkan sistem nilai (Daftar Simak dan *Passing Grade*/ambang lulus) yaitu: hasil evaluasi; keterperincian persyaratan; hasil pekerjaan; ketepatan memilih penyedia jasa; seleksi peserta; penentuan pemenang; jumlah temuan pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan/PPK); dasar pedoman pelaksanaan lapangan; pendapat penyedia jasa tentang sistem gugur dibandingkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus); pendapat pengguna anggaran, PPK, Panitia Penerima Pekerjaan tentang sistem gugur dibandingkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus); dan batasan evaluasi. Faktor sistem gugur yang lebih baik daripada sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) adalah biaya evaluasi dan waktu evaluasi. Gambar 4.6. memperlihatkan perbandingan faktor sistem gugur terhadap sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dalam bentuk grafik.

**FAKTOR-FAKTOR SISTEM GUGUR DIBANDINGKAN SISTEM NILAI
(DAFTAR SIMAK DAN *PASSING GRADE*/AMBANG LULUS)**



Gambar 4.6. Faktor-Faktor Sistem Gugur Dibandingkan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

Keterangan:

Faktor-Faktor:

1 = Waktu Evaluasi

2 = Biaya Evaluasi

3 = Hasil Pekerjaan

4 = Rincian Persyaratan

5 = Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa

6 = Penentuan Pemenang

7 = Pendapat Penyedia Jasa

8 = Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa

9 = Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan)

10 = Seleksi Peserta

11 = Hasil Evaluasi

12 = Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan

13 = Batasan Evaluasi

Bobot:

4 = Faktor Sistem Gugur Lebih Baik daripada Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

3 = Faktor Sistem Gugur Sedikit Lebih Baik daripada Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

2 = Faktor Sistem Gugur Relatif Sama Dengan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

1 = Faktor Sistem Gugur Kurang Baik dibandingkan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

Tabel 4.7. memberikan rangkuman mengenai pendapat responden dari pengguna bangunan tentang perbedaan sistem gugur dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

Tabel. 4.7. Pendapat Pengguna Bangunan/ Pemilik Bangunan (Responden)

Responden : PNS –Wakil Kepala SMP 1 Negeri Wonobojo Kab.Temanggung

No	Pertanyaan	Pendapat pengguna/pemilik bangunan Tentang hasil pembangunan selama tahun 2006-2009		
		Tahun 2006-2007	Tahun 2008-2009	Keterangan
1.	Mulai Pekerjaan	Mei s/d Juni	Juni s/d Juli	Tahun 2008 s/d 2009 agak terlambat
2	Jangka Waktu Pelaksanaan	4 Bulan	4 Bulan	-
3	Hasil Pekerjaan	Kurang Baik	Cukup baik daripada tahun 2006 s.d 2007	-
4	Masalah Temuan Proyek	Banyak Temuan	Ada Sedikit Penurunan daripada tahun 2006 s.d 2007	BPK/BPKP/ KEJAKSAAN /PPK/ BAWASDA
5	Perencanaan Proyek	Cukup	Lebih Baik daripada tahun 2006 s.d 2007	-
6	Biaya Proyek	Murah	Mahal	Secara umum bahwa proyek dengan biaya mahal
7.	Secara Umum Pendapat anda tentang pelaksanaan penyedia barang/jasa	Cukup Baik	Lebih Baik daripada tahun 2006 s.d 2007	-
8.	Secara Umum Pendapat anda tentang Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan barang/jasa/PPK	Cukup Baik	Lebih Baik daripada tahun 2006 s.d 2007	

Catatan: Jumlah responden (Pengguna Bangunan/Pemilik Gedung) 1 (satu) Orang

Sumber: Analisis, 2011

Responden dari Pengguna Bangunan/Pemilik Gedung berpendapat bahwa terdapat peningkatan dalam hal pengelolaan proyek dengan lebih baik pada tahun 2008-2009 dibandingkan dengan tahun 2006-2007. Namun responden juga berpendapat bahwa masih

ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar lebih baik yaitu dalam hal waktu mulai pelaksanaan proyek agar dilaksanakan lebih awal.

Secara umum responden menilai bahwa sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik daripada sistem gugur. Indikasi paling nyata adalah perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Berdasarkan data kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2006-2007 saat menggunakan sistem gugur jumlah proyek yang bermasalah sebanyak 43. Sedangkan pada tahun 2008-2009 menurun drastis menjadi 9 kasus. Selengkapnya jumlah kegiatan pengadaan yang dimaksud disajikan pada Tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di DPU, RSUD, BLH di Kabupaten Temanggung 2006-2009

No	Bidang Kegiatan	Sistem Gugur		Sistem Nilai	
		2006	2007	2008	2009
1	Pengairan	41	54	45	40
2	Jalan	65	86	75	64
3	Cipta Karya	20	25	15	11
4	Jembatan	10	8	5	6
5	Jumlah Paket	136	173	140	121
6	Jumlah Permasalahan	23	20	5	4
	Jumlah Permasalahan Per Sistem	43		9	
	Proporsi Per tahun	16,9%	11,6%	3,6%	3,3%

Sumber: DPU, RSUD, BLH Kabupaten Temanggung, 2010

Secara lebih jelas data diatas dapat ditampilkan dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 4.7. dibawah ini. Dari grafik kita dapat mengetahui bahwa jumlah paket pengadaan jalan selalu menempati proporsi yang paling besar dibanding paket pengadaan dalam bidang pengairan, cipta karya dan jembatan. Jumlah paket terbesar kedua adalah di bidang pengairan, diikuti cipta karya dan jembatan sebagai bidang yang mendapat jumlah paket pengadaan yang paling sedikit.



Gambar 4.7. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006 s.d 2009

Sumber: DPU, RSUD, BLH Kabupaten Temanggung, 2010

Dari jumlah paket pengadaan tersebut, terdapat jumlah temuan dari BPK atau yang mendapat nilai kurang seperti yang terlihat pada Gambar 4.8 dibawah ini. Pada tahun 2006 terdapat 16,9% dari seluruh jumlah paket yang ada mendapat nilai kurang D atau E. Jumlah ini menurun pada tahun 2007 menjadi hanya 11,6%. Penurunan drastis mulai terjadi pada saat diberlakukannya sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) yaitu pada tahun 2008 menjadi hanya 3,6%. Pada tahun 2009 yang mendapat nilai kurang menurun lagi menjadi sebesar 3,3% dari jumlah paket yang ada.



Gambar 4. 8. Jumlah Temuan/ Mendapat Nilai Kurang Tahun 2006 s.d 2009

Sumber: DPU, RSUD, BLH Kabupaten Temanggung, 2010

Menurunnya jumlah permasalahan atau kasus penyediaan barang/jasa hingga sepertiga dari jumlah semula, menurut responden berdasarkan Tabel 4.8 diindikasikan oleh adanya sistem penilaian yang lebih baik. Proses penentuan pemenang dilakukan dengan standar tertentu dan syarat tertentu seperti disajikan pada Formulir Daftar Simak dan Penilaian *Passing Grade*/ ambang lulus (Lampiran A dan B).

4.3. Analisis Hirarki Metode Evaluasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

Tahapan *Analytic Hierarchy Process* yang dilakukan adalah:

a. *Decomposition*

Decomposition adalah memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut. Pada tahap *decomposition*, dilakukan identifikasi faktor pemenang lelang dari daftar simak dan nilai *passing grade*/ambang lulus, dilanjutkan penyusunan hierarki faktor penilaian lelang. Analisis hierarki proses dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses evaluasi pada pengadaan barang/jasa di lokasi studi. Alat untuk mengukurnya digunakan kuesioner AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Variabel AHP disusun berdasarkan tingkatan yaitu *Goal* atau tujuan kemudian kriteria model AHP terdiri dari *Passing Grade*/ambang lulus dan Daftar Simak. Sub Kriteria disusun berdasarkan faktor-faktor yang ada pada sistem penilaian lelang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 /PRT/M/2007 seperti disajikan pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.8. Sebagai Alternatif ditentukan dua metode yang dibandingkan yaitu Sistem Gugur dan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

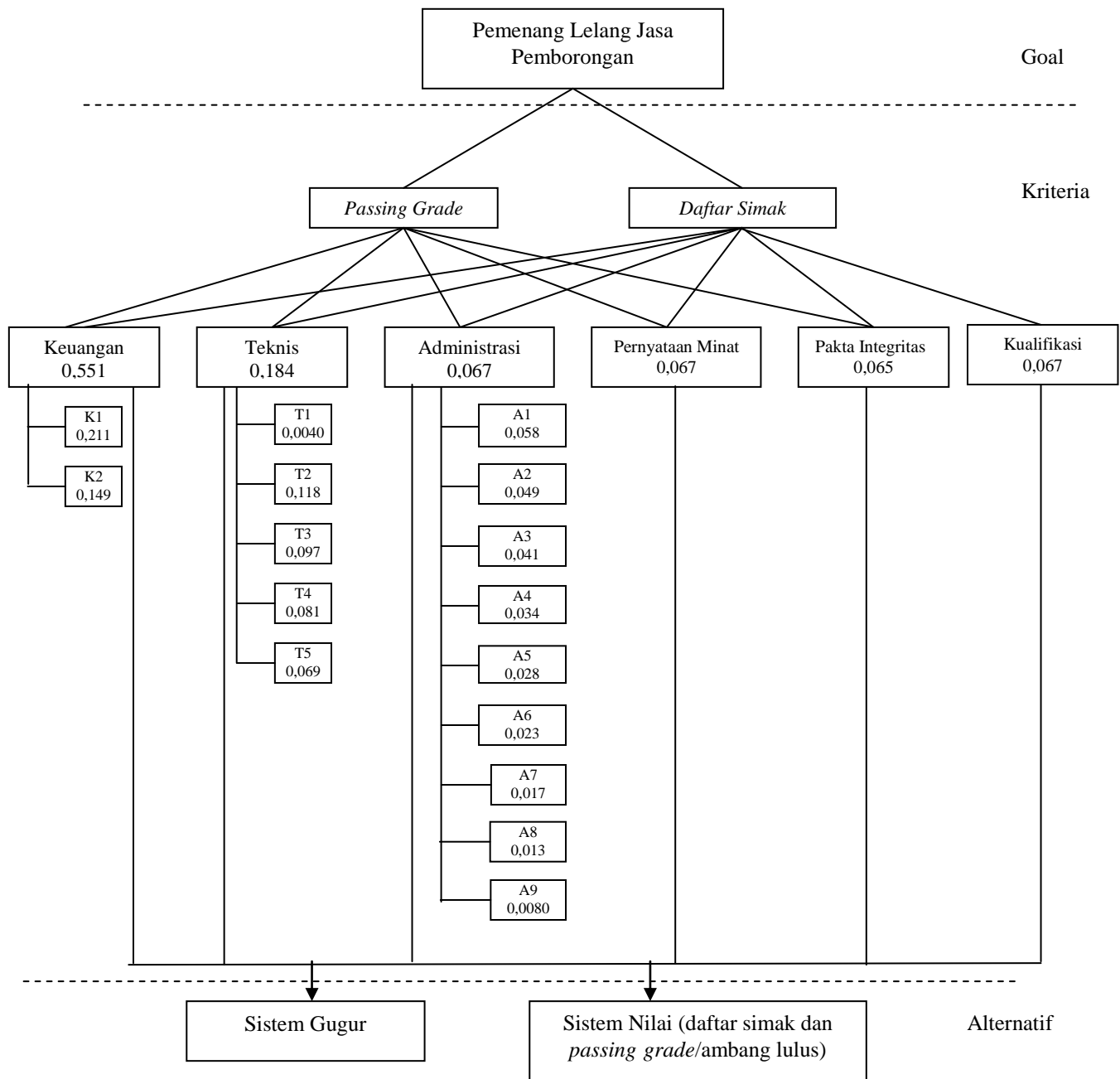
Tabel 4.9. Faktor-Faktor Kriteria dan Sub Kriteria Model AHP Sistem Penilaian Lelang Barang/Jasa

Faktor	Kode	Keterangan
Keuangan	K1	Adanya Dukungan Bank
	K2	Sisa Kemampuan Keuangan
Teknis	T1	Kemampuan Dasar
	T2	Pengalaman Perusahaan
	T3	Personil (Tenaga inti yang diperlukan)
	T4	Peralatan Yang Dimiliki (Minimal yang dimiliki)
	T5	Metode Pelaksanaan/Manajemen Mutu yang Diusulkan

Faktor	Kode	Keterangan
Administrasi	A1	Data Administrasi Umum
	A2	Ijin Usaha
	A3	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	A4	Adanya Pengurus Perusahaan
	A5	Data Keuangan: Susunan Pemilik Saham, Pajak, Neraca Perusahaan Terakhir Diketahui Akuntan Publik
	A6	Data Personil Tenaga Ahli/Teknis yang Diperlukan
	A7	Data Peralatan Yang Dimiliki
	A8	Data Pengalaman Perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir
	A9	Data Pekerjaan Yang Sedang Dilakukan
Pernyataan Minat	-	
Pakta Integritas	-	
Kualifikasi	-	

Sumber: Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 43/PRT/M/2007, Observasi dan Wawancara

Model AHP ditunjukkan dalam Gambar 4.8. *Goal* atau tujuan adalah level tertinggi dalam susunan hierarki model AHP. Tujuan dalam model AHP penelitian ini adalah Penentuan Pemenang Pelelangan Barang/Jasa. Penentuan pemenang lelang barang/jasa dilakukan dengan melihat poin-poin penilaian yang tercantum dalam *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak yang merupakan kriteria susunan hierarki ini. Kedua kriteria ini dipecah menjadi 6 (enam) sub kriteria yaitu keuangan, teknis, administrasi, pernyataan minat, pakta integritas dan kualifikasi. Sub kriteria keuangan ditetapkan dengan adanya dukungan bank, dan sisa kemampuan keuangan. Sub kriteria teknis mencakup kemampuan dasar, pengalaman perusahaan, personil, peralatan yang dimiliki, dan metode pelaksanaan yang diusulkan. Administrasi meliputi data administrasi umum, ijin usaha, landasan hukum pendirian perusahaan, adanya pengurus perusahaan, data keuangan, data personil tenaga ahli/ teknis yang diperlukan, data peralatan yang dimiliki, data pengalaman perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir, dan data pekerjaan yang sedang dilakukan. Sub kriteria pakta integritas dan kualifikasi tidak dipecah lagi. Alternatif model AHP ini ada dua yaitu sistem nilai dan sistem gugur.



Gambar 4.9. Model AHP Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Keterangan:

K1 = Adanya Dukungan Bank

K2 = Sisa Kemampuan Keuangan

T1 = Kemampuan Dasar

T2 = Pengalaman Perusahaan

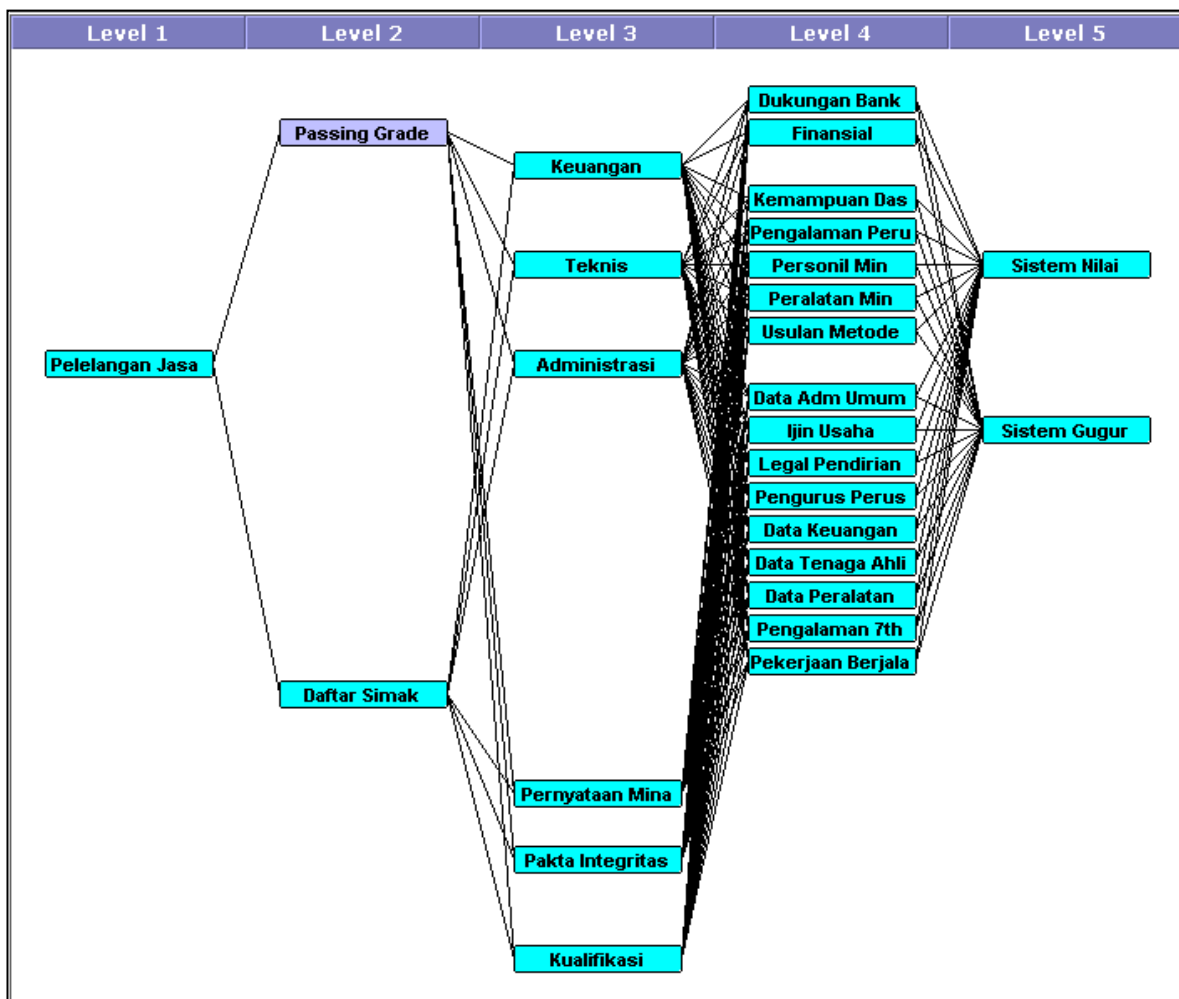
T3 = Personil (Tenaga Inti yang Diperlukan)

T4 = Peralatan yang Dimiliki (Minimal yang Dimiliki)

T5 = Metode Pelaksanaan/ Manajemen Mutu yang Diusulkan

- A1 = Data Administrasi Umum
- A2 = Ijin Usaha
- A3 = Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
- A4 = Adanya Pengurus Perusahaan
- A5 = Data Keuangan
- A6 = Data Personil Tenaga Ahli/ Teknis yang Diperlukan
- A7 = Data Peralatan yang Dimiliki
- A8 = Data Pengalaman Perusahaan 7 (Tujuh) Tahun Terakhir
- A9 = Data Pekerjaan yang Sedang Dilakukan

Dengan menggunakan alat bantu *Decision Analyst*, maka model AHP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 /PRT/M/2007 dibentuk sebagaimana disajikan pada Gambar 4.10. berikut.



Gambar 4.10. Model AHP Metode Evaluasi Lelang Barang/Jasa dengan *Decision Analyst*

b. Perbandingan Berpasangan (*Pairwise Comparison*)

Pairwise Comparison yaitu pengambil keputusan membandingkan dua alternatif yang berbeda dengan menggunakan sebuah skala yang bervariasi dari ‘*equally important*’ atau sama penting sampai dengan ‘*extremely more important*’ atau jauh lebih penting. Penilaian dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap kriteria evaluasi yaitu memberikan angka numerik dari 1 hingga 9 sebagai patokan dalam pertimbangan penilaian. Angka numerik tersebut berdasarkan angka penilaian yang disusun Thomas L. Saaty sebagai skala untuk penilaian perbandingan berpasangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan kuesioner, diperoleh kriteria dan subkriteria penilaian yang kemudian dihitung bobotnya. Berikut Perhitungan Pembobotan untuk Kriteria dan sub Kriteria yang berbentuk matriks A yang berisi nilai A_{ij} dan A_{ji} .

Tabel 4.10. Perangkingan Kriteria

Kriteria	<i>Keuangan</i>	<i>Teknis</i>	<i>Adm</i>	<i>Pminat</i>	<i>Pintegritas</i>	<i>Kualifikasi</i>
Keuangan	1	7	7	7	7	7
Teknis	0,143	1	3	3	4	3
Adm	0,143	0,333	1	1	1	1
Pminat	0,143	0,333	1	1	1	1
Pintegritas	0,143	0,250	1	1	1	1
Kualifikasi	0,143	0,333	1	1	1	1

c. Menentukan Prioritas Pilihan (*Synthesis of Priority*)

Synthesis of priority yaitu menentukan prioritas atas alternatif-alternatif yang telah diperbandingkan pada *pairwise comparison*. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung Nilai Evaluasi Prioritas dengan cara melakukan pembobotan parsial yang meliputi:

- a. Mengkalkulasikan nilai faktor dalam kolom tabel
Untuk mengkalkulasi nilai faktor dalam tabel digunakan skala 1 s.d 9 yang diperoleh dari kuesioner.
- b. Membagi tiap nilai faktor dalam kolom dengan nilai total kalkulasi per kolomnya
- c. Menghitung nilai rata-rata baris dengan mengkalkulasikan nilai faktor per barisnya dibagi 6 (enam). Maka didapat hasil berikut ini.

Tabel 4. 11. Matriks yang telah Dinormalisasi

Kriteria	Keuangan	Teknis	Adm	Pminat	Pintegritas	Kualifikasi	Rata-Rata
Keuangan	0,583	0,757	0,500	0,500	0,467	0,500	0,551
Teknis	0,083	0,108	0,214	0,214	0,267	0,214	0,184
Adm	0,083	0,036	0,071	0,071	0,067	0,071	0,067
P.minat	0,083	0,036	0,071	0,071	0,067	0,071	0,067
P.integritas	0,083	0,027	0,071	0,071	0,067	0,071	0,065
Kualifikasi	0,083	0,036	0,071	0,071	0,067	0,071	0,067

Kesimpulan: Dari hasil nilai rata-rata baris diatas diketahui bahwa faktor keuangan memiliki nilai tertinggi, yaitu Faktor Keuangan 0,551 namun belum bisa ditetapkan sebagai nilai kriteria yang dipilih sebelum menentukan tingkat rasio konsistensinya.

d. Rasio Konsistensi (CR/ Consistency Ratio)

Consistency Ratio, yaitu mengevaluasi tingkat konsistensi penilaian yang diberikan oleh responden pada tahap *pairwise comparison*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Menentukan *Weighted Sum Vector*, yaitu mengalikan hasil dari nilai rata-rata baris dengan tiap nilai faktor pada tabel *Pairwise comparison*. Tabel 4.12 memperlihatkan hal ini dengan lebih jelas.

Tabel 4 12. Penentuan *Weighted Sum Vector*

Kriteria	<i>Keuangan</i>	<i>Teknis</i>	<i>Adm</i>	<i>Pminat</i>	<i>Pintegritas</i>	<i>Kualifikasi</i>
<i>Keuangan</i>	1	7	7	7	7	7
<i>Teknis</i>	0,143	1	3	3	4	3
<i>Adm</i>	0,143	0,333	1	1	1	1
<i>Pminat</i>	0,143	0,333	1	1	1	1
<i>Pintegritas</i>	0,143	0,250	1	1	1	1
<i>Kualifikasi</i>	0,143	0,333	1	1	1	1
Total	1,715	9,249	14	14	15	14

Pembobotan (*Weighted Sum Vector*)

1. Keuangan : $(0,551*1) + (0,184*7) + (0,067*7) + (0,067*7) + (0,065*7) + (0,067*7)$
 $= 3,693404$
2. Teknis : $(0,551*0,143) + (0,184*1) + (0,067*3) + (0,067*3) + (0,065*4) + (0,067*3) =$
 $1,123728$

3. Administrasi : $(0,551*0,143) + (0,184*0,333) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1) + (0,067*1) = 0,405311$
4. Pernyataan Minat: $(0,551*0,143) + (0,184*0,333) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1) + (0,067*1) = 0,405311$
5. Pakta Integritas : $(0,551*0,143) + (0,184*0,250) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1) + (0,067*1) = 0,39008$
6. Kualifikasi: $(0,551*0,143) + (0,184*0,333) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1) + (0,067*1) = 0,405311$

- 2) Menentukan nilai *consistency vector* dengan cara membagi nilai *weighted sum vector* dengan nilai rata-rata hasil *Consistency Vector*:

Keuangan	= 3,693404/ 0,551	= 6,701886
Teknis	= 1,123728/ 0,184	= 6,123718
Administrasi	= 0,405311/ 0,067	= 6,074523
Perny.Minat	= 0,405311/ 0,067	= 6,074523
Pakt.Integritas	= 0,39008/ 0,065	= 5,980307
Kualifikasi	= 0,405311/ 0,067	= 6,074523

- 3) Menghitung nilai *Consistency Index* (CI) dan lamda pada rumus CI sebagai berikut.

$$\text{CI} = \frac{\lambda - n}{n - 1} \quad (4.1)$$

Dimana :

Nilai lamda λ merupakan nilai rata-rata dari *Consistency Vector*

λ = total nilai *consistency vector*/ jumlah studi kasus proyek(n)

$$\begin{aligned} \text{Jadi } \lambda &= (6,701886 + 6,123718 + 6,074523 + 6,074523 + 5,980307 + 6,074523)/6 \\ &= 6,17158 \end{aligned}$$

Jadi nilai *Consistency Index* adalah:

$$\text{CI} = (6,17158 - 6) / (6-1) = 0,034316$$

- 4) Nilai CR (*Consistency Ratio*) didapat dari hasil rumus berikut ini :

$$\text{CR} = \frac{\text{CI}}{\text{RI}} \quad (4.2)$$

RI (*Random Index*) adalah sebuah fungsi langsung dari jumlah alternatif faktor resiko yang sedang dipertimbangkan dari masing-masing studi kasus proyek.

Perkiraan RI dapat dilihat melalui tabel 2.4. yang menetapkan bahwa dengan $N = 6$ maka nilai $RI = 1,24$

Jadi pada kasus ini nilai *Consistency Ratio* (CR) adalah:

$$CR = 0,034316 / 1,24$$

$$CR = 0,027674$$

Untuk nilai $CR \leq 0,10$ maka dasar pengambilan keputusan secara relatif bisa dikatakan “Konsisten”

5) Kesimpulan

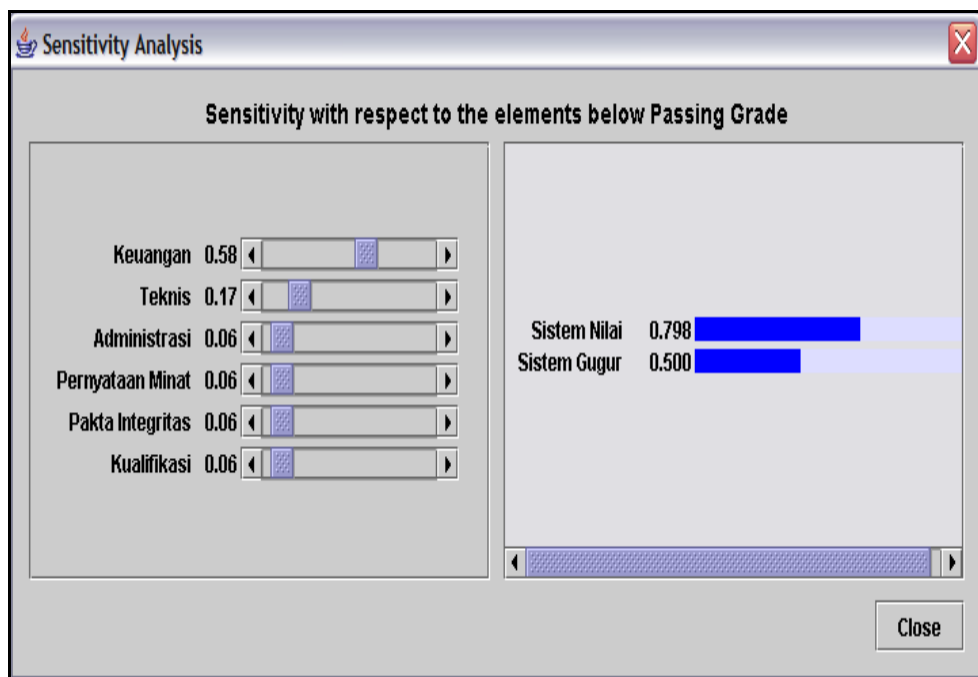
Jadi dapat disimpulkan bahwa Kriteria keuangan terhadap objective pelelangan jasa memiliki bobot tertinggi yaitu 0,551 dengan *Inconsistency Ratio* 0,027674

Perhitungan menggunakan *Decision Analyst*, dari 11 responden didapat perbandingan tingkat kepentingan terhadap faktor-faktor pendukung keputusan sebagaimana model AHP Gambar 4.9. Dari 6 faktor utama diperoleh Matrik perbandingan sebagaimana disajikan Gambar 4.11. Nilai *Inconsistency Ratio* yang diperoleh adalah $0,028 < 0,10$ sehingga model dianggap cukup konsisten (bisa diterima) sebagai model hierarki keputusan.

	A	B	C	D	E	F	Weight
A. Keuangan	1.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.575
B. Teknis	1/7	1.0	3.0	3.0	4.0	3.0	0.174
C. Administrasi	1/7	1/3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.063
D. Pernyataan Minat	1/7	1/3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.063
E. Pakta Integritas	1/7	1/4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.061
F. Kualifikasi	1/7	1/3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.063

Gambar 4.11. Matrik Perbandingan Berpasangan Model AHP di lokasi penelitian (Sumber: Analisis, 2011)

Bobot prioritas faktor tertinggi adalah faktor keuangan (0,575) dan terendah faktor Pakta integritas (0,061) Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan peserta lelang menjadi faktor dominan bagi kepesertaan. Sedangkan Kualifikasi adalah faktor paling rendah bobotnya namun harus tetap dipenuhi oleh peserta lelang. Pada tahap selanjutnya dilakukan Analisis Sensitifitas untuk menguji seberapa besar pengaruh perubahan pada tiap faktor secara ekstrim (sangat besar ataupun sangat kecil perubahannya).



Gambar 4.12. Analisis Sensitifitas Model AHP (Sumber: Analisis, 2011)

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Perbedaan Karakteristik Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade/Ambang Lulus*)

Sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) berbeda secara karakteristik. Berdasarkan hasil analisis data responden, perbedaan ini mencakup perbedaan dalam lamanya waktu evaluasi; biaya yang harus dikeluarkan untuk evaluasi; hasil evaluasi; keterperincian persyaratan dalam dokumen penawaran; ketepatan dalam memilih penyedia jasa; hasil pekerjaan; seleksi peserta pengadaan barang/jasa; penentuan pemenang; jumlah temuan pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan/PPK/Bawasda); dasar pedoman pelaksanaan di lapangan; pendapat penyedia barang/jasa, pendapat pengguna anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengenai prosedur pengadaan barang/jasa; dan batasan evaluasi penawaran. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.1. dibawah ini. Faktor pembeda dalam tabel ini disusun berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan responden tentang pengalaman di bidang pelaksanaan pelelangan menggunakan sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*).

Tabel 5.1. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade/Ambang Lulus*)

No	Pembeda	Sistem Gugur	Sistem Nilai (Daftar Simak Dan <i>Passing Grade/Ambang Lulus</i>)
		Tahun 2006- 2007	Tahun 2008 –2009
1	Waktu Evaluasi	Lebih Cepat (1 hari/ surat penawaran)	Lama (2 hari/ surat penawaran)
2	Biaya Evaluasi	Lebih Murah (sedikit item koreksinya)	Lebih Mahal (lebih banyak item koreksinya)
3	Hasil Evaluasi	Kurang baik (semua penawaran masuk)	Lebih baik (lebih terseleksi)
4	Rincian Persyaratan	Lebih sedikit (17 item)	Lebih banyak (28item)
5	Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa	Kurang Tepat (Kurang Jelas Dokumennya)	Lebih Tepat (Lebih Jelas Dokumennya)
6	Hasil Pekerjaan	Relatif Sama (Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa)	Relatif Sama (Penilaian Kinerja Penyedia Barang/ Jasa)

No	Pembeda	Sistem Gugur	Sistem Nilai (Daftar Simak Dan <i>Passing Grade</i> /Ambang Lulus)
		Tahun 2006- 2007	Tahun 2008 –2009
7	Seleksi Peserta	Kurang Ketat (8-10 Penyedia Jasa/Barang)	Lebih Ketat (5-6 Penyedia Jasa/Barang)
8	Penentuan Pemenang	Relatif Lebih sulit (Tidak ada ambang lulus)	Relatif lebih mudah karena jelas nilainya (Ada ambang lulus)
9	Jumlah temuan pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan)	Lebih banyak (36 Paket)	Lebih sedikit/ menurun (6 Paket)
10	Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan	Kurang Lengkap (RKS kurang lengkap)	Lebih Lengkap (RKS ada lengkap)
11	Pendapat Penyedia Jasa	Cukup baik (Proses Pelelangannya)	Lebih baik (Proses Pelelangannya)
12	Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Penerima Pekerjaan	Cukup baik (hasil pelelangan dan pekerjaan)	Lebih baik (hasil pelelangan dan pekerjaan)
13	Batasan Evaluasi	Tidak ada (kurang jelas/ langsung gugur)	Ada nilai ambang lulus

Jumlah responden 11.

Sumber: Analisis, 2011

a. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Waktu Evaluasi

Dari hasil wawancara dengan responden, evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur membutuhkan waktu setengah hari kerja untuk evaluasi setiap 1 (satu) surat penawaran. Sehingga dalam satu hari kerja dimungkinkan untuk mengevaluasi 2 (dua) surat penawaran. Sebaliknya, sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) membutuhkan waktu evaluasi selama 2 (dua) hari kerja untuk mengevaluasi 1 (satu) surat penawaran. Sehingga dalam satu hari kerja belum mampu untuk menyelesaikan satu surat penawaran.

Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) memerlukan waktu evaluasi yang lebih lama daripada sistem gugur karena dalam sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) digunakan *passing grade*/ambang lulus. Ambang lulus ini berisi 25 (duapuluh lima) item evaluasi. Setiap item berisi bobot nilai ambang lulus dari 60-90. Bobot nilai ditentukan oleh panitia berdasarkan Rencana Kerja Syarat (RKS) disertai dengan bukti nyata pada penyedia jasa. Kecermatan panitia diperlukan untuk

memeriksa persyaratan yang dimaksud. Rincinya dokumen yang harus diisi membuat panitia penerima pekerjaan memerlukan waktu evaluasi yang agak lama.

Sistem gugur memerlukan waktu evaluasi yang lebih pendek daripada sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) karena tidak menggunakan ambang lulus. Item yang diisi hanya pernyataan ada atau tidak ada tentang persyaratan yang dimaksud pada CV atau PT penawar pelelangan, sehingga lebih cepat dalam pengisian. Menurut responden, meskipun sistem gugur lebih cepat dalam pelaksanaan evaluasinya namun berdampak kurang baik terhadap proses pelelangan pengadaan barang/jasa hingga waktu pelaksanaan, serta kurang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip kedua yaitu efektif, yang berarti pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebaiknya proses pelelangan pengadaan barang/jasa tetap menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus), tapi jadwal waktu evaluasinya dibuat dengan lebih efektif sehingga waktu evaluasi penawaran sama cepatnya dengan waktu evaluasi sistem gugur. Hal ini menjadi catatan bagi penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan barang jasa agar sistem nilai lebih cepat dalam hal evaluasi penawaran

b. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Biaya Evaluasi

Menurut hasil wawancara dengan responden biaya evaluasi menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih besar karena waktu evaluasi yang diperlukan lebih lama, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk ATK (Alat Tulis Kantor), perjalanan dinas, makan minum dan penggandaan/fotokopi lebih banyak. Sistem gugur memerlukan waktu evaluasi lebih pendek sehingga biaya yang dikeluarkan untuk ATK (Alat Tulis Kantor), perjalanan dinas, makan minum dan penggandaan/fotokopi lebih sedikit.

Sedangkan bagi penyedia barang/jasa, biaya evaluasi menggunakan sistem gugur lebih murah karena pelelangan menggunakan sistem gugur lebih cepat dalam hal penentuan calon pemenang lelang. Semakin lama waktu untuk menunggu pengumuman pemenang lelang berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan penyedia jasa guna membiayai ATK (Alat Tulis Kantor), perjalanan dinas, makan minum dan penggandaan/fotokopi.

Segi pembiayaan sistem nilai ini kurang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip pertama yaitu prinsip efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) perlu lebih efisien dalam hal ATK, perjalanan dinas, makan minum dan penggandaan/fotokopi supaya biaya evaluasi dapat ditekan seminimal mungkin, dan supaya biaya evaluasi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dapat kurang lebih sama dengan sistem gugur.

c. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Hasil Evaluasi

Menurut responden hasil evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik karena menggunakan daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus. Daftar simak berisi item seleksi yang lebih terperinci karena ada nilai bobot/ ambang lulus. Kapasitas penyedia jasa dapat terlihat lebih jelas dalam sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Penyedia jasa yang memiliki personil dan peralatan yang lebih lengkap akan mendapatkan nilai yang lebih besar daripada penyedia jasa yang personil dan peralatannya kurang lengkap. Jadi yang terpilih sebagai pemenang pengadaan barang/jasa adalah benar-benar yang telah memiliki kapasitas terbaik dalam melaksanakan pekerjaan.

Evaluasi menggunakan sistem gugur hanya berisi pernyataan ada atau tidak ada mengenai item yang dipersyaratkan. Sehingga tidak ada perbedaan bobot pada penyedia jasa yang memiliki personil atau peralatan yang lebih lengkap daripada penyedia jasa lainnya. Aspek yang dilihat hanya ada atau tidaknya personil atau peralatan yang dipersyaratkan. Pada akhirnya sistem gugur kurang terperinci dalam mengevaluasi kapasitas penyedia jasa, sehingga kurang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip keempat yaitu transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

d. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade/Ambang Lulus*) Dalam Rincian Persyaratan

Menurut hasil pengumpulan data dari responden sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) memerlukan jumlah persyaratan sebanyak 25 item. Tiap item ini mengharuskan penyedia jasa mendapat bobot ambang lulus minimal 60 (tergantung panitia pengadaan barang/jasa yang menentukan). Bobot nilai yang diperoleh penyedia jasa tergantung dari kelengkapan dan kapasitas penyedia jasa sesuai dengan Rencana Kerja Syarat (RKS). Sedangkan sistem gugur hanya mempersyaratkan 17 item, yang masing-masing item hanya berisi ada atau tidaknya persyaratan yang harus dimiliki penyedia jasa, tanpa pembobotan masing-masing item, sehingga terkesan kurang mendalam terhadap rencana pelaksanaan pekerjaan dan kurang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip ketiga yaitu terbuka dan bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

e. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade/Ambang Lulus*) Dalam Ketepatan Memilih Penyedia Jasa

Menurut responden sistem gugur berkemungkinan lebih besar kesalahannya dalam memilih penyedia jasa karena item dalam evaluasi tidak mendetail/ terperinci. Sedangkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) resiko kesalahan dalam memilih penyedia jasa lebih kecil karena per item evaluasi dihitung dan dinilai bobotnya. Pemenang surat penawaran yang dievaluasi menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*) adalah penyedia jasa yang benar-benar mempunyai faktor-faktor yang dibutuhkan di lapangan. Faktor-faktor ini antara lain meliputi keuangan, peralatan, personil, manajemen mutu/metode pelaksanaan, pengalaman pekerjaan. Faktor peralatan, personil, manajemen mutu/metode pelaksanaan yang dimiliki pemenang lelang pastilah yang paling lengkap. Juga kemampuan keuangan pemenang lelang adalah yang paling kuat dan pengalaman pekerjaannya lebih lama dibanding penyedia jasa lainnya. Sehingga peserta penawaran dengan kapasitas yang terbaik yang akan memenangkan pelelangan.

Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip keenam yaitu akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

f. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Hasil Pekerjaan

Menurut responden hasil pekerjaan menggunakan sistem gugur kurang baik dan menurut penilaian kinerja penyedia jasa banyak yang mendapatkan nilai kurang (D atau E). karena tidak ada pedoman yang terperinci. Hasil pekerjaan di lapangan menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik menurut penilaian kinerja penyedia jasa karena lebih terperinci/ mendetail

Evaluasi sistem gugur kurang terperinci sehingga pengetahuan mengenai kapasitas pelaksanaan pekerjaan dari penyedia jasa kurang mendalam. Akibatnya pemenang penawaran barang/jasa dalam pelaksanaan di lapangan hasil pekerjaannya kurang memuaskan. Ini terlihat dari banyaknya temuan pada hasil pekerjaan atau mendapatkan nilai kurang dari badan pemeriksa.

Setelah diterapkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) pada pengadaan barang/jasa data menunjukkan adanya penurunan tingkat kesalahan/mendapatkan nilai kurang (D atau E). Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip keenam yaitu akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

g. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Seleksi Peserta Penawaran Barang/Jasa

Menurut data hasil kuesioner dan wawancara dengan responden diketahui bahwa sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih ketat dalam seleksi peserta penawaran barang/jasa. Hal ini terlihat dari jumlah peserta penawaran barang/ jasa

menggunakan sistem gugur berkisar antara 8 sampai dengan 10 penawar dari penyedia barang/jasa. Hal ini karena tidak ada ambang lulus/*passing grade* sehingga semua penawaran berkemungkinan besar untuk masuk/ikut evaluasi. Jumlah peserta penawaran barang/jasa menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) berkisar antara 5 sampai 6 penyedia jasa. Jumlah yang lebih sedikit ini karena adanya ambang lulus yang harus dipatuhi penawar dari penyedia jasa, sehingga hanya penyedia jasa yang lolos ambang lulus yang bisa mengikuti penawaran. Penerapan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) ini sendiri secara tidak langsung membuat seleksi menjadi lebih ketat bagi penawar penyedia jasa/barang.

Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip ketiga yaitu terbuka dan bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

h. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Penentuan Pemenang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dalam Penentuan pemenang dengan sistem gugur hanya berpedoman pada penawaran terendah setelah penawaran itu terkoreksi. Sedangkan penentuan pemenang dalam sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) menggunakan ambang lulus dan harga terendah setelah terkoreksi. Sehingga penentuan pemenang menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih disukai oleh penyedia barang/jasa dan panitia lelang.

Ambang lulus ini sudah sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Republik Indonesia dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip kelima yaitu adil/tidak diskriminatif, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Responden berpendapat bahwa sistem gugur

dalam penentuan pemenang lebih sulit untuk dilaksanakan, sehingga responden lebih banyak memilih sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

i. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK/BPKP/Kejaksaan/PPK/Bawasda)

Kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung berdasarkan catatan/temuan BPK/BPKP/PPK/Pengguna Anggaran/Kejaksaan/BAWASDA menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan jumlah temuan semakin menurun. Menurut data survey pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 pada Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup, pengadaan barang/jasa menggunakan sistem gugur jumlah paket pekerjaan mencapai 136 untuk tahun 2006 dengan jumlah temuan /permasalahan mencapai 23 paket dan jumlah paket pekerjaan untuk tahun 2007 adalah sejumlah 173 dengan jumlah temuan/permasalahan mencapai 23 paket. Dengan menggunakan sistem gugur ini terdapat berbagai kelemahan dan kelebihan seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.1 Perbedaan sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).

Menurut data survey tahun 2008-2009 pada kegiatan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) tahun 2008 terdapat 140 paket pekerjaan dengan jumlah temuan/ permasalahan mencapai 5 Paket dan pada tahun 2009 terdapat jumlah pekerjaan 121 paket dengan jumlah temuan/permasalahan mencapai 4 paket. Penggunaan Sistem Nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan seperti tampak pada Tabel 5.1. diatas.

Pada saat awal diterapkannya sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2008 terjadi suatu masa transisi yang menyebabkan Panitia dan Penyedia Barang/Jasa lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu peraturan evaluasi penawaran, yang selama ini belum pernah dilakukan pada saat menerapkan sistem gugur. Hasil yang telah dicapai pada waktu digantinya penerapan sistem gugur menjadi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) menunjukkan terjadinya penurunan jumlah permasalahan/temuan dalam pelaksanaan pekerjaan dari 12% untuk tahun 2006-2007

menjadi 3,3% untuk tahun 2008-2009. Penjelasan lebih rinci mengenai nama paket temuan Tim Audit/ mendapatkan nilai kurang dapat dilihat pada Lampiran D.

Penerapan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) diharapkan sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip keenam yaitu akuntabel, yang berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa.

j. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan

Pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) di dalamnya terdapat pedoman dasar pelaksanaan di lapangan yang lebih rinci misalnya mengenai jumlah peralatan dan tenaga inti yang dibutuhkan di lapangan termasuk syarat-syarat yang harus dimiliki antara lain peralatan dan tenaga inti (tahun alat dan SKA/SKT). Pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem gugur masih kurang memperhatikan syarat-syarat minimal yang dibutuhkan di lapangan. Praktek sistem gugur ini kurang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 prinsip keenam yaitu akuntabel, berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/ jasa. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dipandang dari segi dasar pedoman pelaksanaan di lapangan atau lokasi proyek, sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik dari pada sistem gugur .

k. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Pendapat Penyedia Jasa

Menurut pendapat sebagian penyedia pengadaan barang/jasa, sistem gugur lebih cepat dalam hal waktu evaluasi penawaran dibandingkan dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Hal ini karena sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dalam hal evaluasi lebih mendalam atau lebih mendetail. Sistem gugur juga memerlukan biaya yang lebih sedikit daripada sistem nilai (daftar simak dan

passing grade/ambang lulus). Meskipun demikian Penyedia Jasa /Barang secara keseluruhan memandang sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik dibandingkan dengan sistem gugur dalam hal evaluasi penawaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 yakni efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

l. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Menurut pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa sistem gugur lebih cepat dalam hal waktu evaluasi penawaran dibandingkan dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus). Hal ini karena sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dalam hal evaluasi lebih mendalam atau lebih mendetail. Meskipun demikian Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa secara keseluruhan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dipandang lebih baik dibandingkan dengan sistem gugur dalam hal evaluasi penawaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan pekerjaan karena sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

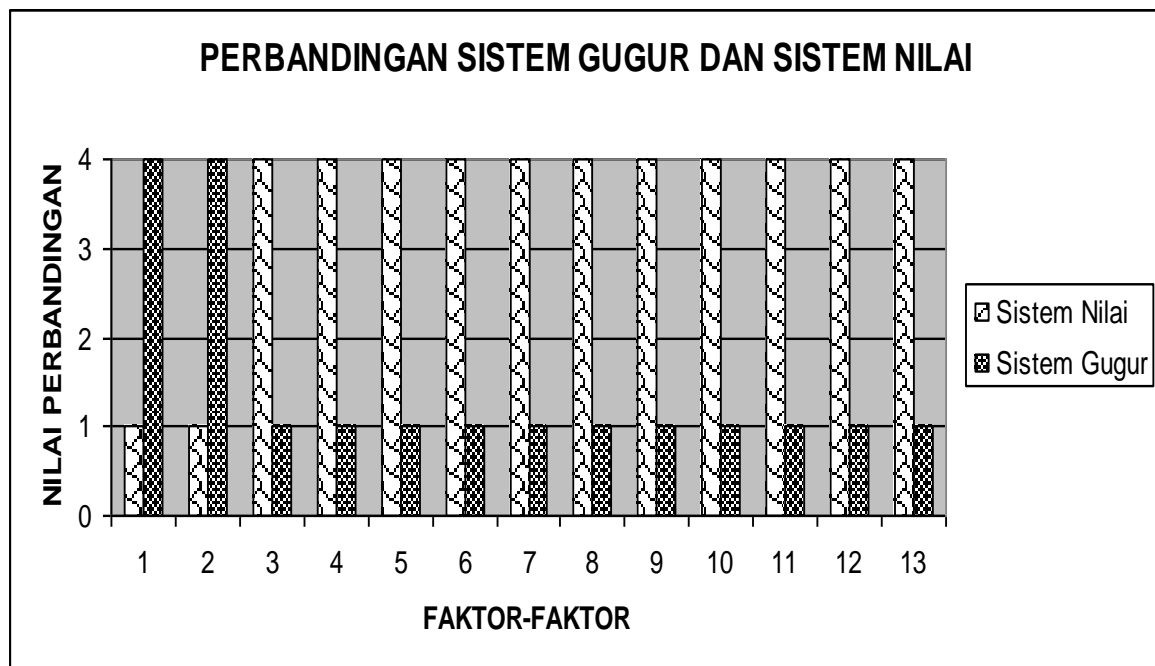
m. Perbedaan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus) Dalam Batasan Evaluasi

Batasan evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa dengan sistem gugur hanya menyampaikan harga terendah setelah koreksi aritmatik dan tidak ada batas ambang lulus. Sebaliknya pengadaan barang/jasa dengan menerapkan sistem nilai menggunakan ambang lulus yang dikaitkan dengan harga penawaran yang terendah setelah dikoreksi aritmatiknya.

Para responden baik penyedia jasa maupun panitia pengadaan barang/jasa menyatakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar dari pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 yakni efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Secara lengkap, perbedaan sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dapat diringkas pada Tabel 5.2.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem gugur lebih unggul daripada sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dalam hal waktu evaluasi dan biaya evaluasi. Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih unggul daripada sistem gugur dalam 11 (sebelas) hal yaitu dalam keterperincian persyaratan, ketepatan dalam memilih penyedia jasa, hasil evaluasi, hasil pekerjaan, seleksi peserta, penentuan pemenang, jumlah temuan pemeriksa, dasar pedoman pelaksanaan lapangan, pendapat penyedia jasa, dan pendapat pengguna anggaran, PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan batasan evaluasi. Dari Tabel 5.2. juga terlihat bahwa simpangan baku faktor-faktor sistem gugur yang diperbandingkan dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) semuanya memiliki nilai kecil (antara 1 s.d 2) sehingga dapat dikatakan bahwa persebaran data tiga belas faktor ini relatif homogen. Nilai simpangan baku terkecil terdapat pada faktor hasil pekerjaan (1,11) dan yang terbesar terdapat pada faktor pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa (1,87). Tabel 5.2. dapat ditampilkan secara grafis pada Gambar 5.1. dibawah ini.



Gambar 5.1. Perbandingan Sistem Gugur dan Sistem Nilai (Daftar Simak Dan *Passing Grade*/Ambang Lulus)

Keterangan:

Faktor-Faktor: 1 = Waktu Evaluasi
 2 = Biaya Evaluasi
 3 = Hasil Pekerjaan
 4 = Keterperician Persyaratan
 5 = Ketepatan dalam memilih penyedia jasa
 6 = Hasil Evaluasi
 7 = Seleksi Peserta
 8 = Penentuan Pemenang
 9 = Jumlah Temuan Pemeriksa
 10 = Dasar Pedoman Pelaksanaan Lapangan
 11 = Pendapat Penyedia Jasa
 12 = Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan
 13 = Batasan Evaluasi

Nilai Perbandingan : 1 = Kurang Baik
 2 = Relatif Sama
 3 = Sedikit Lebih Baik
 4 = Lebih Baik

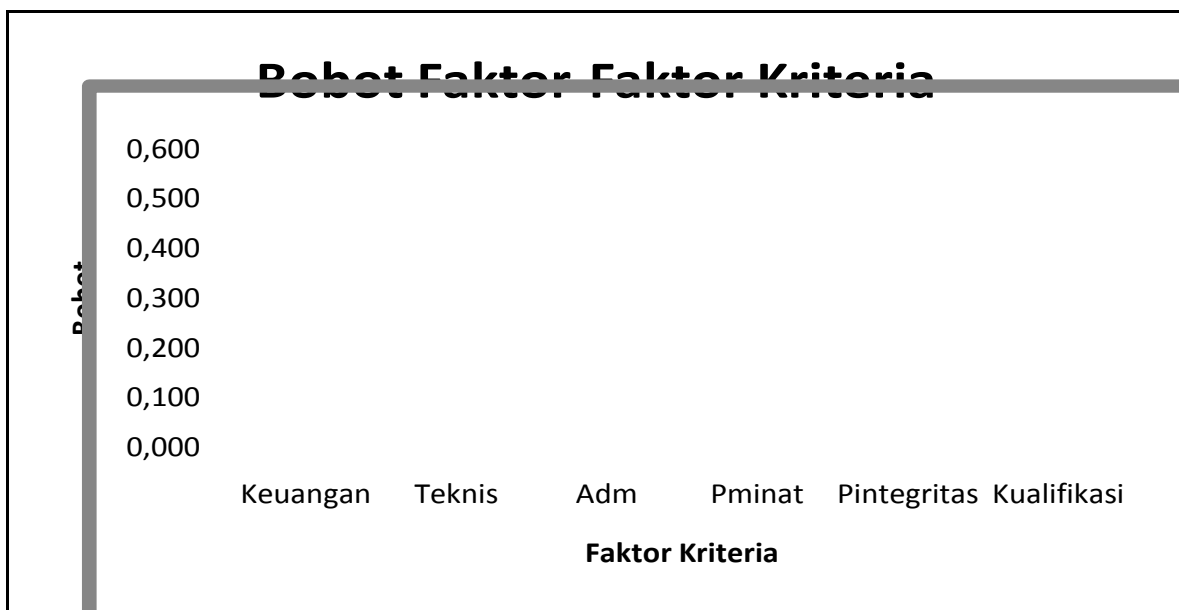
Gambar 5.1. menunjukkan bahwa dalam hal waktu evaluasi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) kurang baik sedangkan sistem gugur lebih baik. Dalam hal biaya evaluasi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) juga kurang baik dan sistem gugur lebih baik. Dalam hal hasil pekerjaan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik dan sistem gugur kurang baik. Dalam keterperincian persyaratan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik dan sistem gugur kurang baik. Dalam bidang ketepatan memilih penyedia jasa, hasil evaluasi, seleksi peserta, penentuan pemenang, jumlah temuan pemeriksa, dasar pedoman pelaksanaan lapangan, pendapat penyedia jasa, pendapat pengguna anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan batasan evaluasi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) lebih baik sedangkan sistem gugur kurang baik.

5.2. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Passing Grade/Ambang Lulus dan Daftar Simak

Terdapat 6 (enam) faktor dominan yang mempengaruhi *Passing Grade/* ambang lulus dan daftar simak, yaitu faktor keuangan, faktor teknis, faktor administrasi, faktor pernyataan minat, faktor pakta integritas dan faktor kualifikasi. Menurut hasil perhitungan AHP terhadap keenam faktor dominan mendapatkan hasil berupa bobot masing-masing faktor sebagai berikut :

1. Faktor keuangan mendapat bobot 0,551 (55,1%)
2. Faktor teknis mendapat bobot 0,184 (18,4%)
3. Faktor administrasi mendapat bobot 0,067 (6,7%)
4. Faktor pernyataan minat mendapat bobot 0,067 (6,7%)
5. Faktor pakta integritas mendapat 0,065 (6,5%)
6. Faktor kualifikasi mendapat bobot 0,067 (6,7%)

Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2. berikut ini.



Gambar 5.2. Bobot Faktor-Faktor Kriteria

Gambar 5.2. memperlihatkan bahwa bobot prioritas faktor tertinggi adalah faktor keuangan yaitu 0,551 disusul oleh faktor teknis dengan bobot 0,184. Faktor dominan ketiga memiliki bobot yang sama yaitu faktor administrasi, pernyataan minat, dan kualifikasi dengan bobot 0,067. Faktor dominan dengan bobot terendah yaitu pakta

integritas dengan bobot 0,065. Penjelasan mengenai keenam faktor yang mempengaruhi Passing Grade/ambang lulus dan daftar simak adalah sebagai berikut.

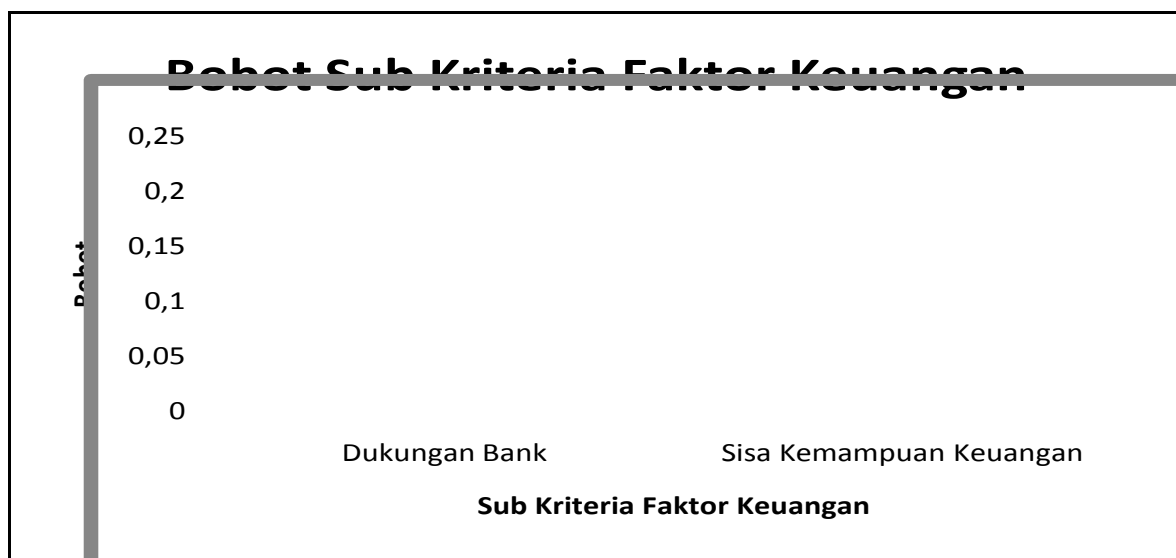
a. Faktor Keuangan

Faktor keuangan terdiri dari 2 (dua) sub kriteria yaitu :

- a. adanya dukungan bank dengan bobot 0,211 (58,61%) dan;
- b. sisa kemampuan keuangan dengan bobot 0,149 (41,39%).

Faktor keuangan penyedia barang/jasa harus didukung minimal 10% dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari bank umum. Faktor keuangan dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

- a. Evaluasi Harga Penawaran
- b. Evaluasi Kewajaran Harga

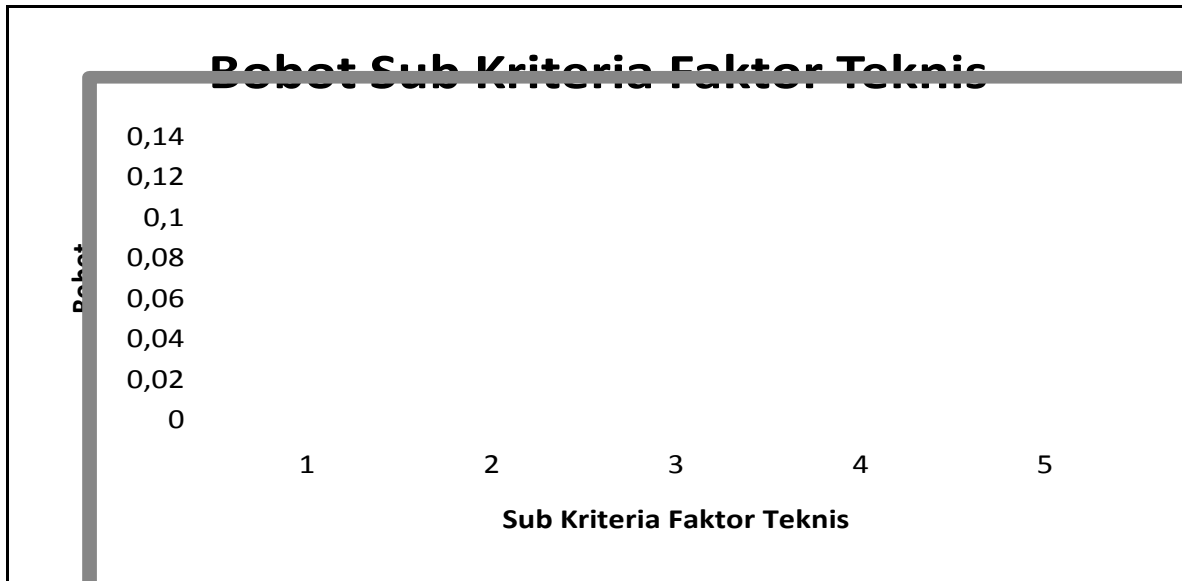


Gambar 5.3. Bobot Sub Kriteria Faktor Keuangan

b. Faktor teknis

Faktor teknis terdiri dari 5 (lima) sub kriteria yaitu:

- a. kemampuan dasar dengan bobot 0,0040 (1,08%);
- b. pengalaman perusahaan dengan bobot 0,118 (31,97%) ;
- c. personil (tenaga inti yang diperlukan) dengan bobot 0,097 (26,28%);
- d. peralatan yang dimiliki (minimal yang dimiliki) dengan bobot 0,081 (21,95%);
- e. metode pelaksanaan/ manajemen mutu yang diusulkan dengan bobot 0,069 (18,69%).



Gambar 5.4. Bobot Sub Kriteria Faktor Teknis

Keterangan:

- 1 = Kemampuan Dasar
- 2 = Pengalaman Perusahaan
- 3 = Personil (Tenaga Inti yang Diperlukan)
- 4 = Peralatan yang Dimiliki
- 5 = Metode Pelaksanaan/ Manajemen Mutu

Faktor teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi.

Sedangkan evaluasi teknis meliputi:

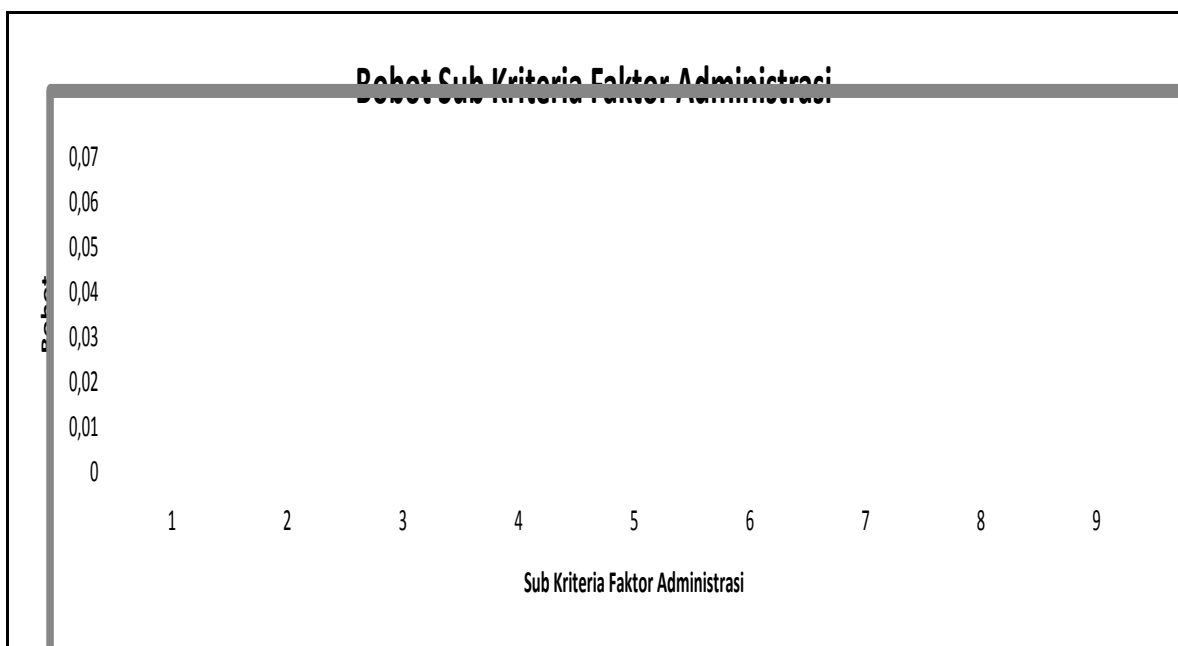
1. metode pelaksanaan/ manajemen mutu,
2. jadwal pelaksanaan,
3. spesifikasi teknis,
4. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan,
5. personil inti,
6. bagian pekerjaan yang disubkontrakkan,
7. syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang

c. Faktor Administrasi

Faktor administrasi mempunyai 9 (sembilan) sub kriteria yaitu:

- a. data administrasi umum dengan bobot 0,058 (21,40%);

- b. ijin usaha dengan bobot 0,049 (18,08%);
- c. landasan hukum pendirian perusahaan dengan bobot 0,041 (15,13%);
- d. adanya pengurus perusahaan dengan bobot 0,034 (12,55%);
- e. data keuangan dengan bobot 0,028 (10,33%);
- f. data personil tenaga ahli/ teknis yang diperlukan dengan bobot 0,023 (8,48);
- g. data peralatan yang dimiliki dengan bobot 0,017 (6,27);
- h. data pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir dengan bobot 0,013 (4,79);
- i. data pekerjaan yang sedang dilakukan dengan bobot 0,0080 (2,95%).



Gambar 5.5 Bobot Sub Kriteria Faktor Administrasi

Keterangan:

- 1 = Data Administrasi Umum
- 2 = Ijin Usaha
- 3 = Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
- 4 = Adanya Pengurus Perusahaan
- 5 = Data Keuangan
- 6 = Data Personil Tenaga Ahli
- 7 = Data Peralatan yang Dimiliki
- 8 = Data Pengalaman Perusahaan
- 9 = Data Pekerjaan yang Sedang Dilakukan

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi.

d. Faktor Pernyataan Minat

Pernyataan Minat ini dengan bobot 0,067(6,70%)Sebelum melakukan penawaran, para penyedia jasa diminta untuk membuat dan menandatangani pernyataan minat yang isinya menyatakan bahwa penyedia jasa berminat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa ini bersifat wajib dibuat oleh penyedia jasa . Contoh formulir pernyataan minat dapat dilihat dalam lampiran .

e. Faktor Pakta Integritas

Pakta integritas dengan bobot 0,551(55,1%) berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran, ini bersifat wajib untuk ditandatangani baik oleh pihak panitia maupun penyedia barang /jasa

f. Faktor Kualifikasi

Faktor Kualifikasi dengan bobot 0,067(6,70%) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 bila ada. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

5.3. Hasil Pemvalidasian Data Hasil Analisis pada Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Hasil validasi data analisis pada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang menerapkan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) menunjukkan bahwa dalam penentuan kemenangan/pemenang lelang, sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) masih mengedepankan faktor kemampuan

finansial, pengalaman perusahaan, personil tenaga ahli minimal dan peralatan kerja minimal yang harus dimiliki pelaksana pekerjaan atau penyedia barang/jasa .

Validasi data analisis selama tahun 2008-2009 menyebutkan bahwa faktor yang paling dominan adalah kemampuan finansial. Kemampuan finansial terdiri dari dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan. Responden berpendapat bahwa keberhasilan suatu pelelangan/pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan perusahaan tersebut.

Kemampuan keuangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh semua penyedia jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 /PRT/M/2007 bahwa perusahaan harus mempunyai dukungan/kemampuan keuangan minimal 10% dari pagu anggaran dan harus mendapatkan dukungan bank pemerintah/umum minimal 10% dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari nilai proyek tersebut.

Namun temuan-temuan proyek yang mendapatkan nilai kurang (D atau E) dan temuan pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK, tim audit) untuk kegiatan tahun 2006 s/d 2009 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan dengan volume rencana, juga jumlah alat kerja minimal dan personil tenaga ahli minimal yang dimiliki penyedia jasa kurang memadai untuk pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar pada pengadaan barang/jasa saat menggunakan sistem gugur juga terjadi pada saat pemberlakuan sistem nilai (*Passing Grade*/ambang lulus dan Daftar Simak). Sehingga peningkatan kualitas sistem evaluasi yang ada di 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Lingkungan Hidup sangat perlu diimbangi dengan komitmen semua pihak terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Penyedia Jasa/Barang supaya hasil pekerjaan tidak jauh menyimpang dari hasil evaluasi saat pengumuman pemenang lelang pengadaan barang/jasa.

Adanya temuan penyimpangan pelaksanaan menjadi dilema, karena meskipun selama proses pengadaan telah dilakukan penilaian dengan lengkap namun penyimpangan tetap masih terjadi. Berdasarkan identifikasi permasalahan temuan, ada beberapa tipe penyimpangan yang terjadi antara lain:

- a) Perbedaan antara volume pekerjaan perencanaan dengan volume pekerjaan di lapangan
- b) Tidak terpenuhinya standar minimal peralatan yang dipersyaratkan
- c) Tidak sesuainya tenaga ahli atau pelaksana teknis di lapangan
- d) Keterlambatan pelaksanaan

Tiga dari empat tipikal permasalahan tersebut semua sudah termasuk dalam indikator sistem nilai (*Passing Grade*/ambang lulus dan Daftar Simak). Alasan-alasan temuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan seperti terlampir pada Lampiran D.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan karakteristik sistem gugur yang diterapkan pada tahun 2006-2007 dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) yang telah diterapkan pada tahun 2008 – 2009 adalah bahwa sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) mempunyai dampak yang lebih baik dari segi hasil pekerjaan, keterperincian persyaratan, ketepatan memilih penyedia jasa, hasil evaluasi, seleksi peserta, penentuan pemenang, jumlah temuan pemeriksa, dasar pedoman pelaksanaan lapangan dan batasan evaluasi. Sistem gugur memberikan keuntungan terutama berkaitan dengan waktu evaluasi yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) dan biaya evaluasi yang lebih murah daripada sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus).
2. Faktor dominan yang mempengaruhi *passing grade*/ambang lulus dan daftar simak pada proses penentuan pemenang pekerjaan jasa pemborongan dengan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) meliputi faktor keuangan (55,1%) yang terdiri dari dukungan bank dan sisa kemampuan keuangan, faktor teknis (18,4%) dan administrasi (6,7%), Pernyataan Minat (6,7%), Pakta Integritas (6,5%) dan Kualifikasi (6,7%) dengan nilai *Inconsistency Ratio* sebesar 0,028 untuk jenis pekerjaan Jalan, Jembatan, Gedung dan Irigasi.
3. Hasil pemvalidasian analisis yang diterapkan pada sistem gugur pada tahun 2006-2007 dan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) yang telah diterapkan pada tahun 2008 – 2009 untuk kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dilakukan para *stakeholder* menunjukkan bahwa masih adanya penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan menjadi tantangan perbaikan sistem pengadaan barang/jasa di lokasi penelitian. Sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) yang telah diterapkan berdampak menurunkan tingkat permasalahan konstruksi dibandingkan sistem gugur. Meskipun demikian masih

sangat perlu diimbangi dengan komitmen semua pihak terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Penyedia Jasa/Barang supaya hasil pekerjaan tidak jauh menyimpang dari hasil evaluasi saat pengumuman pemenang lelang pengadaan barang/jasa.

6.2. Saran-saran

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Saran yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan belum diterapkannya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel maka penerapan evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) perlu mempertimbangkan pemeriksaan seberapa riil antara yang dituangkan dalam dokumen penawaran/administrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain pelaksanaan sistem nilai masih perlu diperbaiki terutama dalam hal jangka waktu evaluasi dan biaya evaluasi supaya dapat ditekan menjadi seefektif mungkin .
2. Telaah faktor penentu pemenang lelang juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan faktor keuangan perusahaan pada pelaksana pekerjaan, bukan sekedar administratif belaka. Untuk sistem nilai (daftar simak dan *passing grade*/ambang lulus) faktor keuangan terdiri dari Dukungan Bank dan Sisa Kemampuan Keuangan diharapkan dapat ditambah nilai ambang lulusnya dari 10 menjadi 20. Namun demikian perlu ada kajian khusus yang mendalam karena hal ini sulit dalam operasional pelaksanaannya. Perlu itikad baik untuk membangun sistem penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lokasi studi.
3. Saran dari penulis untuk pengambilan tesis yang akan datang agar lebih fokus dalam hal penerapan metode evaluasi penawaran dengan sistem Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah (BSG)/ BOT (*Built Operator Transfer*) yang diterapkan di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini lebih kompleks karena harus melibatkan tiga faktor utama yaitu pemerintah, investor dan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- DPU Pusat Pendidikan dan Pelatihan, (2005), *Modul 3 tentang Ketentuan umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
- Hardjowijono dan Muhammad, (2008), *Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. [www.lgsp.or.id/publications /index.cfm?fuseaction =throwpub&ID=2008](http://www.lgsp.or.id/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=2008)
- Hikam, A.S., Muhammad, (1996), *Demokrasi dan Civil Society*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 349/ KPPTS/ M/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi*, Jakarta: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2010), *Tindak Pidana Korupsi pada Kontrak Pengadaan* (Materi Seminar Nasional Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi di Universitas Kristen Satya Wacana), Jakarta
- Kurniawan, Lutfi, J.,dkk., 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans Malang
- Magnis Suseno, Frans, (1996), *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mandar, Agus, (2003), *Konsensus Sebagai Pilar Utama Local Good Governance*, Tesis Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Negeri Gajahmada, Yogyakarta
- Modul 1-5, (2001), *Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN dan BPKP, Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 5 Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Lump Sum*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bappenas, Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Temanggung,(2009), *Temanggung Dalam Angka 2009*, Bappeda, Temanggung

- Pemerintah Kabupaten Temanggung, (2009), *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kab. Temanggung No. 59 Tahun 2009*, Temanggung
- Pemerintah Kabupaten Temanggung, (2010), *Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55 Tahun 2010*
- Rufaidah, (2009), *Efisiensi Pembangunan Infrastruktur yang Dibangun Secara Bertahap Ditinjau dari Jenis Kontrak Pelaksanaan*, Tesis, Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saaty, (1994). *Analytical Hierarchy Process*, Proses Hierarky Analisis, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Bandung
- Suliantoro, Hery, (2008), *Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk Metode Evaluasi Penawaran dengan Sistem Nilai (Studi Kasus : Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur pada Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum)*, Prosiding INSAHP5, Teknik Industri UNDIP Semarang. ISBN : 978-979-97571-4-2
- Surat Perjanjian Kontrak RSUD Kab.Temanggung No. 050/10/2010 tanggal 28 Agustus 2010.
- Surat Perjanjian Kontrak BLH Kab. Temanggung No. 620.1/005/PPK.EMB/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010
- Swastha, Basu, dan Ibnu Sukoco, (1988), *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty Yogyakarta
- Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Temanggung, (2010), *Panduan Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kabupaten Temanggung Tahun 2010*, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Wibowo, Agung, (2002), *Konsep Dasar & Prosedur Pengadaan Barang/Jasa*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro
- Widodo, Erwin. (2008). *Evaluasi Metode Pengadaan e-commerce dengan Memanfaatkan AHP*, Prosiding INSAHP5 © Teknik Industri UNDIP Semarang, 14 Mei 2008 ISBN : 978-979-97571-4-2
- Widodo, Joko, (2001), *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia Surabaya

Lampiran C. Hasil Simulasi Data: Persepsi Perbedaan Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai

Waktu Evaluasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Relatif Sama	1	9,1	9,1	9,1
Kurang Baik	9	90,9	90,9	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Biaya Evaluasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Lebih Baik	10	100,0	100,0	100,0

Hasil Evaluasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	9	90,9	90,9	90,9
Lebih Baik	1	9,1	9,1	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Rincian Persyaratan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	10	100,0	100,0	100,0

Ketepatan Memilih Penyedia Jasa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	10	100,0	100,0	100,0

Hasil Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Baik	7	45,5	45,5	45,5
Relatif Sama	3	54,5	54,5	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Seleksi Peserta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Relatif Sama	1	9,1	9,1	9,1
Kurang Baik	9	90,9	90,9	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Penentuan Pemenang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	9	90,9	90,9	90,9
	Relatif Sama	1	9,1	9,1	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Jumlah Temuan Audit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	10	100,0	100,0	100,0

Dasar Pedoman Pelaksanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	8	81,8	81,8	81,8
	Relatif Sama	2	18,2	18,2	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Batasan Evaluasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	9	90,9	90,9	90,9
	Relatif Sama	1	9,1	9,1	100,0
	Total	10	100,0	100,0	

Pendapat Penyedia Barang/Jasa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	7	63,6	63,6	100,0
	Total	11	100,0	100,0	

Pendapat PENGGUNA ANGGARAN , PPK, PANITIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang Baik	3	18,2	18,2	90,9
	Total	11	100,0	100,0	

Lampiran E. Kuesioner Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

MAGISTER TEKNIK SIPIL

Jl. Hayam Wuruk No. 5 - 7 Semarang, Indonesia

Phone/Fax (024) 8311802

KUESIONER

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan Tesis pada Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, dengan judul PENERAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN DENGAN SISTEM GUGUR DAN SISTEM NILAI (DAFTAR SIMAK DAN *PASSING GRADE*/AMBANG LULUS) DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERACHY PROCESS* (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Temanggung), maka bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan keterangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pemenang lelang dengan menggunakan Daftar Simak dan *Passing Grade*(Amabang lulus). Dalam penelitian ini, sebagai *stakeholder* yang terlibat adalah panitia pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Temanggung, Penyedia Jasa yang ikut dalam proses lelang dan Pejabat pembuat komitmen serta jajaran dinas teknis terkait dengan pengadaan barang/jasa. Kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan anda mengisi kuesioner ini.

Peneliti : Dwi Sukarme, ST
Pembimbing I : Ir. M. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D
Pembimbing II : Jati Utomo Dwi Hatmoko,ST,MM,MSc,PhD

Keterangan Pengisian Kuesioner

Berilah tanda silang (X) pada uraian tentang faktor perbandingan antara *Passing Grade* (Ambang lulus) dan Daftar Simak pada proses penilaian peserta lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan kerja responden.

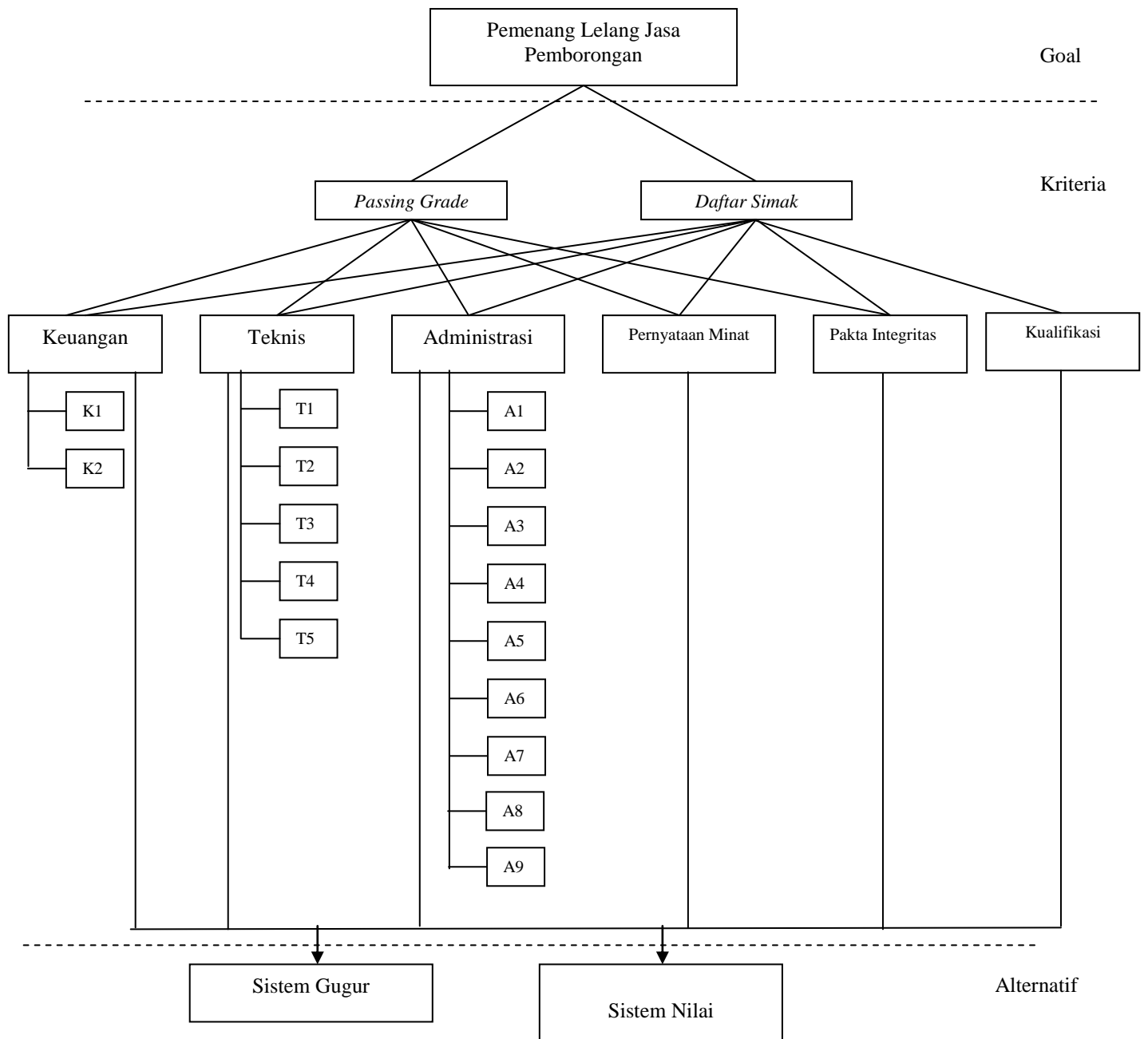
IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Instansi :
Jabatan :
Pendidikan :

PENERAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN DENGAN SISTEM GUGUR
DAN SISTEM NILAI (DAFTAR SIMAK DAN *PASSING GRADE*/AMBANG LULUS)
DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Temanggung)

PENGANTAR

Pengadaan pelelangan barang/jasa rawan terhadap pemerasan dalam jabatan: penyuaapan; gratifikasi; benturan-benturan kepentingan; dan penggelapan. Tindak pidana korupsi masih didominasi oleh kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kejadian tersebut ditemukan pada lembaga pemerintah dan Pemerintahan di daerah baik kabupaten maupun kota. Dinas Pekerjaan umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup di daerah, termasuk di Kabupaten Temanggung masih belum menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum khususnya dalam penggunaan Sistem *Passing Grade* (ambang lulus) dan daftar simak secara maksimal. Sehingga pelaksanaan pengadaan barang/ jasa kurang operasional dan kurang efektif. Selain itu juga karena masih banyaknya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), konflik dalam pelaksanaan pengadaan dan keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh panitia pengadaan pelelangan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itulah semangat mewujudkan *Good Governance* pada proses pengadaan barang/jasa menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Penerapan daftar Simak dan sistem *passing grade* (ambang lulus) sejauh ini belum pernah diuji keandalannya terhadap perwujudan *Good Governance* tersebut. Maka menjadi masalah yang amat penting bagi *stakeholder* yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mengukur faktor-faktor penting penentu *passing grade* dan daftar simak pada pelaksanaan penentuan pemenang pada jasa pemborongan.



KETERANGAN

1. NILAI AMBANG LULUS (*PASSING GRADE*)

Nilai ambang lulus (Passing Grade) adalah nilai batas yang digunakan sebagai instrumen penilaian rekanan yang ikut pada lelang kegiatan pengadaan barang/jasa. Komponen nilai *passing grade* terdiri dari:

1. Penilaian keuangan, terdiri dari: Dukungan Bank, Sisa Kemampuan Keuangan
2. Penilaian Teknis, terdiri dari: Kemampuan Dasar, Pengalaman Perusahaan, Personil, Peralatan dan Metode Pelaksanaan/Manajemen mutu.

2. DAFTAR SIMAK

Daftar simak adalah kumpulan buku yang digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan barang/jasa pemerintah, yang menyatakan bahwa Tujuan disusunnya. Daftar Simak di bidang pengadaan barang/jasa, dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrumen bagi segenap lapisan dan kekuatan masyarakat, agar dapat secara aktif berperan serta mencegah merajalelanya korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ada beberapa Parameter yang mendukung faktor –faktor untuk menentukan pemenang lelang, seperti di tunjukan dibawah ini :

Faktor	Kode	Keterangan
Keuangan	K1	Adanya Dukungan Bank
	K2	Sisa Kemampuan Keuangan
Teknis	T1	Kemampuan Dasar
	T2	Pengalaman Perusahaan
	T3	Personil (Tenaga inti yang diperlukan)
	T4	Peralatan Yang Dimiliki (Minimal yang dimiliki)
	T5	Metode Pelaksanaan /Manajemen Mutu Yang Diusulkan
Administrasi	A1	Data Administrasi Umum
	A2	Ijin Usaha
	A3	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	A4	Adanya Pengurus Perusahaan
	A5	Data Keuangan: Susunan Pemilik Saham, Pajak, Neraca Perusahaan Terakhir diketahui Akuntan Publik
	A6	Data Personil Tenaga Ahli/Teknis yang Diperlukan
	A7	Data Peralatan Yang Dimiliki
	A8	Data Pengalaman Perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir
	A9	Data Pekerjaan Yang Sedang Dilakukan
Pernyataan Minat	-	
Pakta Integritas	-	
Kualifikasi	-	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

TAHAP 1

Pada tahap satu, responden diminta untuk memberikan perbandingan berpasangan diantara kriteria yaitu *Passing Grade* (ambang lulus) dan *Daftar Simak*. Perbandingan ini diperlukan untuk mengetahui faktor penentu pemenang lelang. Nilai perbandingan berpasangan dengan berdasar pada tingkat kepentingannya antara *Passing Grade* (ambang lulus) dan *Daftar Simak*. Penjelasan dari skor tersebut adalah sebagai berikut :

skor 1 bila kedua faktor sama penting

skor 3 bila skill yang satu sedikit lebih penting daripada yang lain

skor 5 bila skill yang satu lebih penting daripada yang lain

skor 7 bila skill yang satu jauh lebih penting daripada yang lain

skor 9 bila skill yang satu mutlak lebih penting daripada yang lain

2, 4, 6, 8 nilai-nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan

Responden diminta untuk memberikan tanda silang (X) pada skor terpilih.

	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Passing Grade																		Daftar Simak
	<hr/>																	

TAHAP 2

Pada tahap selanjutnya responden diminta untuk memberikan perbandingan berpasangan antara alternatif faktor yang dapat mendukung peningkatan *Passing Grade*(ambang lulus) dan *Daftar Simak*.

Nilai perbandingan berpasangan dengan berdasar pada tingkat kepentingannya antara *certification, research, awareness, clearinghouse, coordination dan strandard & training*.

Penjelasan dari skor tersebut adalah sebagai berikut :

skor 1 bila kedua alternatif faktor sama penting

skor 3 bila alternatif faktor yang satu sedikit lebih penting daripada yang lain

skor 5 bila alternatif faktor yang satu lebih penting daripada yang lain

skor 7 bila alternatif faktor yang satu jauh lebih penting daripada yang lain

skor 9 bila alternatif faktor yang satu mutlak lebih penting daripada yang lain

2, 4, 6, 8 nilai-nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan

Responden diminta untuk memberikan tanda silang (X) pada skor terpilih.

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Kemampuan Dasar

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pengalaman Perusahaan

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peralatan yang dimiliki (minimal)

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Metode Pelaksanaan yg diusulkan

Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Kemampuan Dasar

Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pengalaman Perusahaan

Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)

Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Peralatan yang dimiliki (minimal)

Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Metode Pelaksanaan yg diusulkan

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	Pernyataan Minat
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	Pernyataan Minat
Adanya Dukungan Bank	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	Pakta Integritas
Sisa Kemampuan Keuangan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 	Pakta Integritas

Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki

Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pernyataan Minat
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pernyataan Minat
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pernyataan Minat
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pernyataan Minat
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pernyataan Minat

Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pakta Integritas
Pengalaman Perusahaan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pakta Integritas
Personil (Tenaga Inti yg diperlukan)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pakta Integritas
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pakta Integritas
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pakta Integritas
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Adm. Umum
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ijin Usaha
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Adanya Pengurus Perusahaan
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Keuangan
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Kemampuan Dasar	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Data Peralatan yg dimiliki

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Adm. Umum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ijin Usaha

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Adanya Pengurus Perusahaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Keuangan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Peralatan yg dimiliki

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Adm. Umum

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ijin Usaha

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Adanya Pengurus Perusahaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Keuangan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Data Peralatan yg dimiliki

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Adm. Umum
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Ijin Usaha
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Adanya Pengurus Perusahaan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Keuangan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Peralatan yang dimiliki (minimal)	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Peralatan yg dimiliki
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Adm. Umum
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Ijin Usaha
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Adanya Pengurus Perusahaan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Keuangan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Personil Tenaga Ahli/Tek. Yg diperlukan
Metode Pelaksanaan yg diusulkan	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Data Peralatan yg dimiliki

Kemampuan Dasar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernyataan Minat
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernyataan Minat
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernyataan Minat
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Peralatan yang dimiliki (minimal) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernyataan Minat
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Metode Pelaksanaan yg diusulkan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pernyataan Minat
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Kemampuan Dasar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakta Integritas
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Pengalaman Perusahaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakta Integritas
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Personil (Tenaga Inti yg diperlukan) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakta Integritas
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Peralatan yang dimiliki (minimal) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakta Integritas
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Metode Pelaksanaan yg diusulkan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakta Integritas
|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

LAMPIRAN F. Foto Responden



Foto 1. Peneliti dengan Responden (Direktur P.T. Bumi Mas Perdana)



Foto 2. Peneliti dengan Responden (Direktur CV. Handayani)



Foto 3. Peneliti dengan Responden (Direktur Utama CV. Architama)



Foto 4. Peneliti dengan Responden (Direktur CV. Asta Ghina)



Foto 5. Peneliti dengan Responden (Direktur CV Aditya)



Foto 6. Peneliti dengan Responden (Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung)



Foto 7. Peneliti dengan Responden (Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung)



Foto 8. Peneliti dengan Responden (Kepala Bidang RSUD Kab. Temanggung)



Foto 9. Peneliti dengan Responden (Direktur P.T. Mas Manggung Perdana)



Foto 10. Peneliti dengan Responden (Direktur CV Surya Perdana)



Foto 11. Responden Pengguna Bangunan (Wakasek Kurikulum SMPN 1 Wonoboyo)

LAMPIRAN G. Data Hasil Kuesioner

Waktu Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Waktu Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	-		X	-
2.	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	-		X	-
3.	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	-		X	-
4.	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	-		X	-
5.	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	-		X	-
6.	Dirut CV Aditya	-	-		X	-
7.	Dirut CV Handayani	-	-		X	-
8.	Dirut CV Asta Ghina	-	-		X	-
9.	Dirut CV Surya Perdana	-	-		X	-
10.	Dirut CV Architama	-	-	X		-
	Jumlah total	0	0	1	9	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Biaya Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Pembiayaan Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	-	-	X	-
2.	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	-	-	X	-
3.	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	-	-	X	-
4.	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	-	-	X	-
5.	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	-	-	X	-
6.	Dirut CV Aditya	-	-	-	X	-
7.	Dirut CV Handayani	-	-	-	X	-
8.	Dirut CV Asta Ghina	-	-	-	X	-
9.	Dirut CV Surya Perdana	-	-	-	X	-
10.	Dirut CV Architama	-	-	-	X	-
	Jumlah total	0	0	0	10	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Hasil Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Hasil Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	-	-	X	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	9	0	1	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Rincian Persyaratan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Rincian Persyaratan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	10	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

**Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa Sistem Gugur
terhadap Sistem Nilai**

No.	Nama Responden	Ketepatan Dalam Memilih Penyedia Jasa Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	10	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 10.

Sumber: Analisis, 2011

Hasil Pekerjaan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Hasil Pekerjaan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	-	X	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	-	X	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	-	X	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	-	X	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	-	X	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	-	X	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	4	6	0	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Seleksi Peserta Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Jumlah Peserta Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	-	X	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	9	1	0	0

Catatan: Jumlah responden 10.

Sumber: Analisis, 2011

Penentuan Pemenang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Penentuan Pemenang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	-	X	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	9	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

**Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK, Tim Audit)
Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai**

No.	Nama Responden	Jumlah Temuan Pemeriksa (BPK, BPKP, Kejaksaan, PPK, Tim Audit) Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	10	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Dasar Pedoman Pelaksanaan di Lapangan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Dasar Pedoman Pelaksanaan di Lapangan Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	-	X	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	-	X	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	8	2	0	0

Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

Pendapat Penyedia Jasa tentang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Pendapat Penyedia Jasa tentang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
2.	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
3.	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
4.	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
5.	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
6.	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
7.	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	7	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 7.

Sumber: Analisis, 2011

Pendapat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Penerima Pekerjaan tentang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Pendapat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Penerima Pekerjaan tentang Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2.	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3.	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	3	0	0	0

Catatan: Jumlah responden 3

Sumber: Analisis, 2011

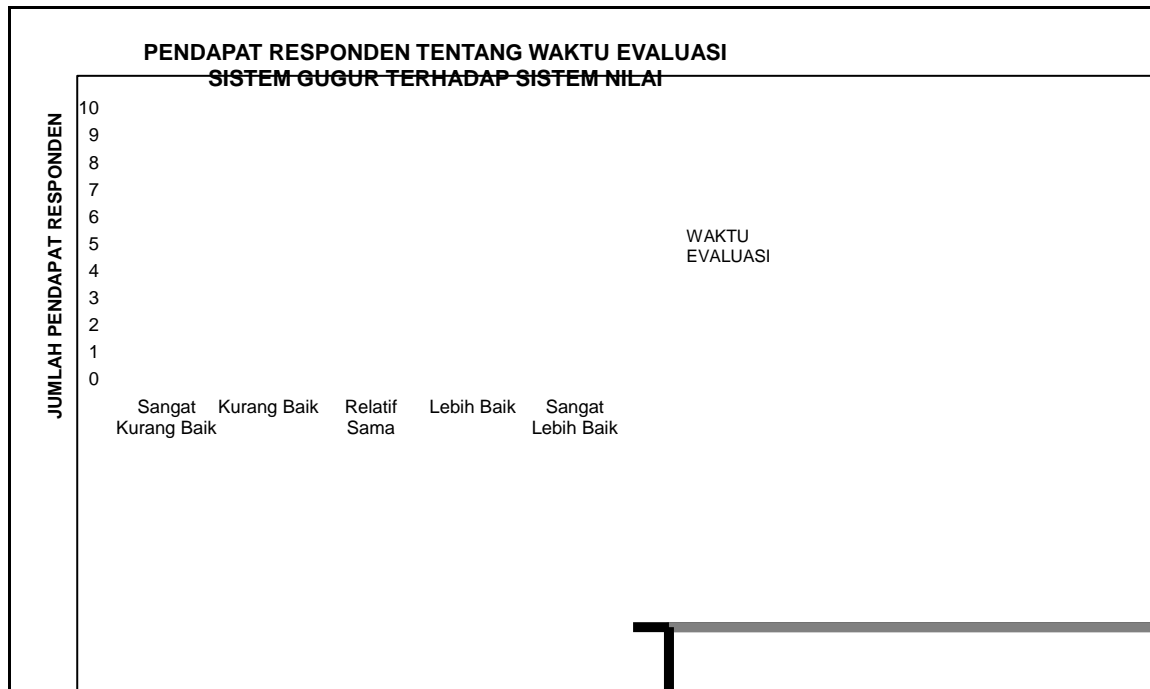
Batasan Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai

No.	Nama Responden	Batasan Evaluasi Sistem Gugur terhadap Sistem Nilai				
		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Relatif Sama	Lebih Baik	Sangat Lebih Baik
		1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
2	Kepala Bidang DPU Kab. Temanggung	-	X	-	-	-
3	Kepala Sub Bagian RSUD Kab. Tmg	-	X	-	-	-
4	Dirut PT Bumi Mas Perdana	-	X	-	-	-
5	Dirut PT Manggung Mas Perdana	-	X	-	-	-
6	Dirut CV Aditya	-	X	-	-	-
7	Dirut CV Handayani	-	X	-	-	-
8	Dirut CV Asta Ghina	-	X	-	-	-
9	Dirut CV Surya Perdana	-	X	-	-	-
10	Dirut CV Architama	-	X	-	-	-
	Jumlah total	0	10	0	0	0

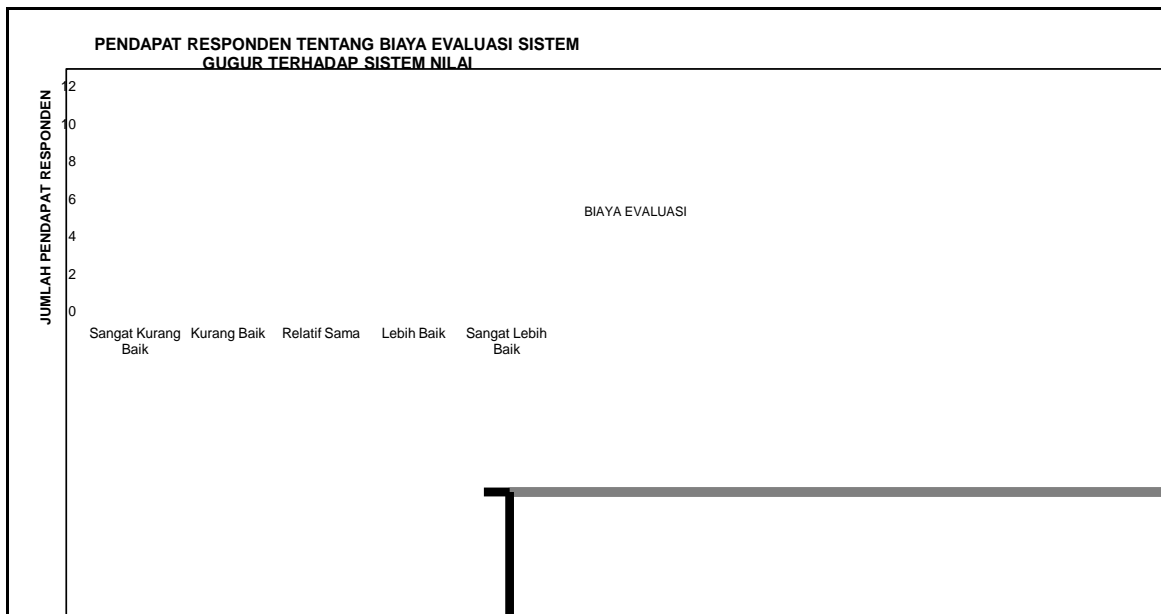
Catatan: Jumlah responden 10

Sumber: Analisis, 2011

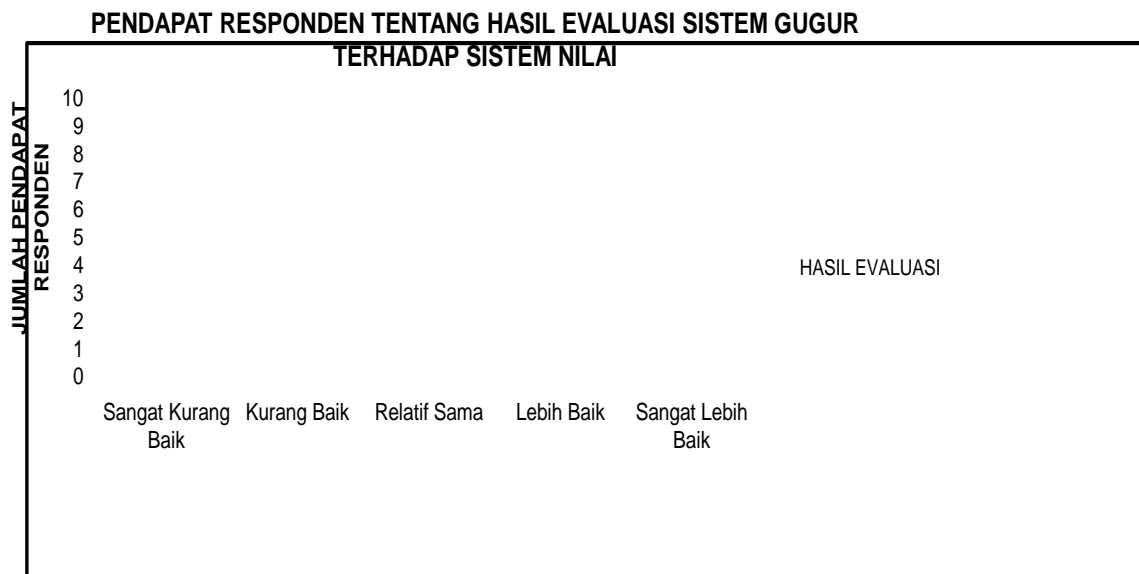
LAMPIRAN H. Grafik Hasil Kuesioner



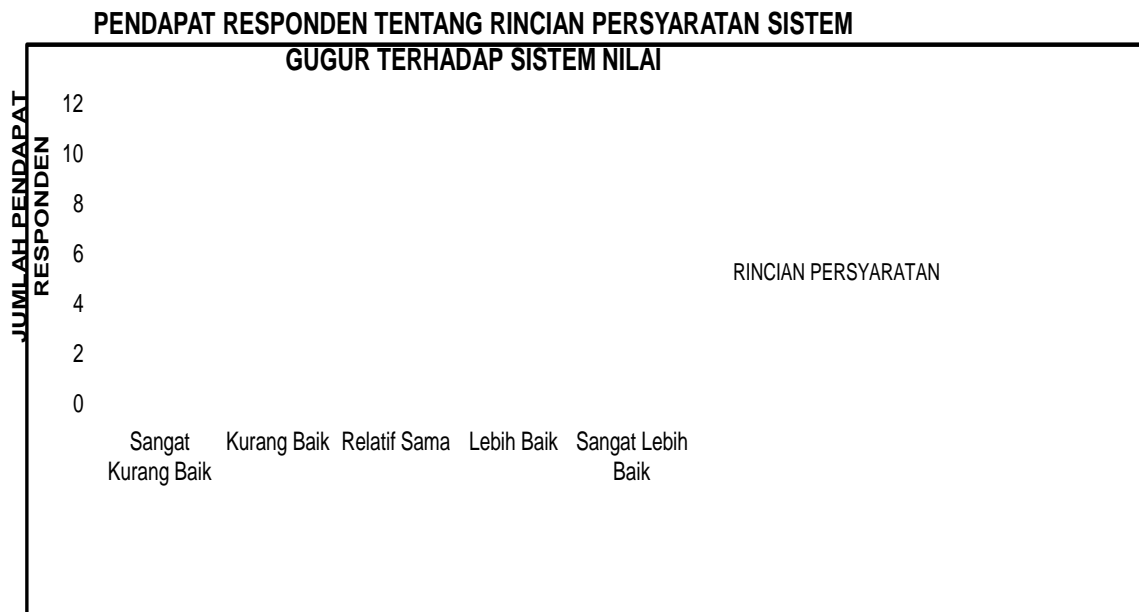
Gambar 1. Pendapat Responden Tentang Waktu Evaluasi Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



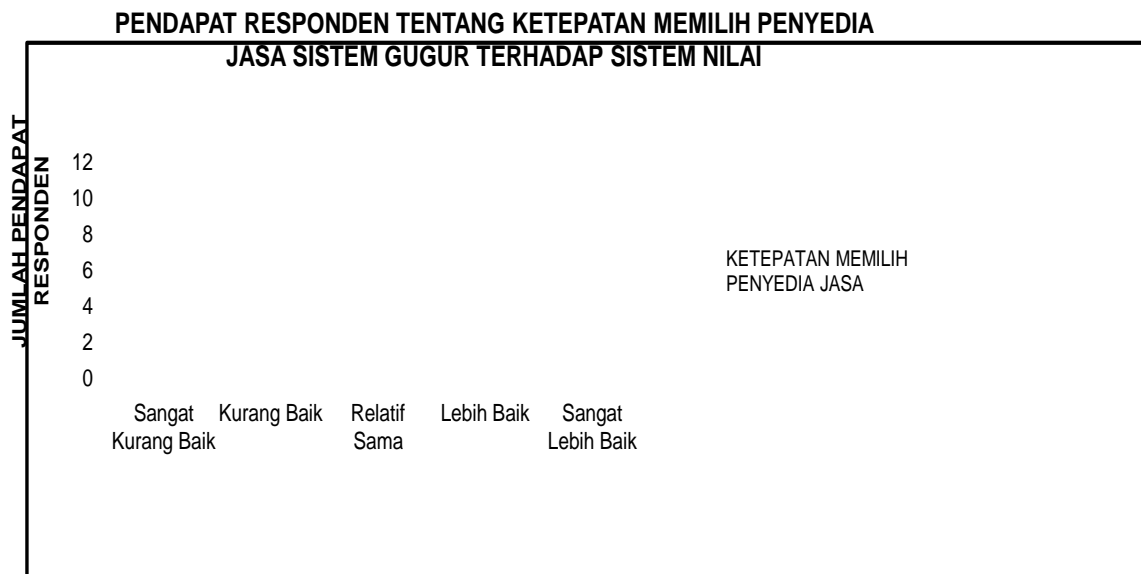
Gambar 2. Pendapat Responden Tentang Biaya Evaluasi Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



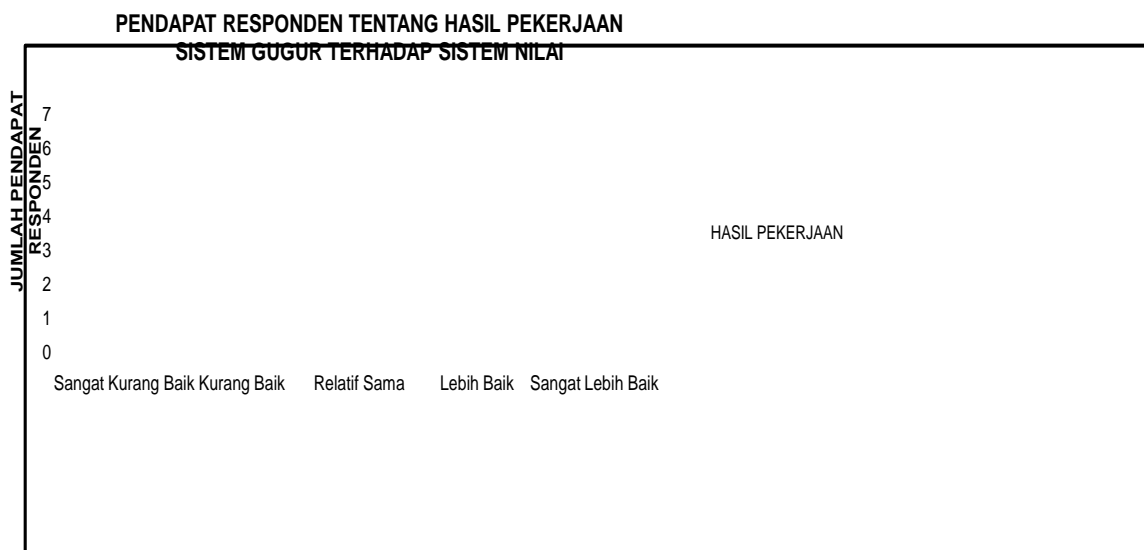
Gambar 3. Pendapat Responden Tentang Hasil Evaluasi Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



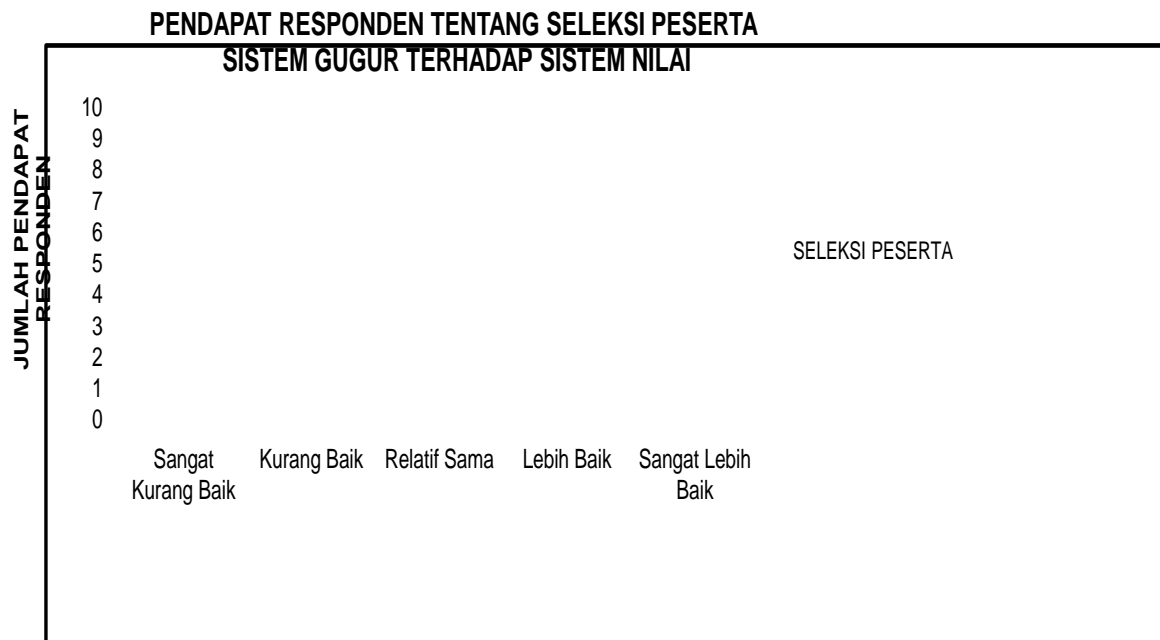
Gambar 4.. Pendapat Responden Tentang Rincian Persyaratan Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



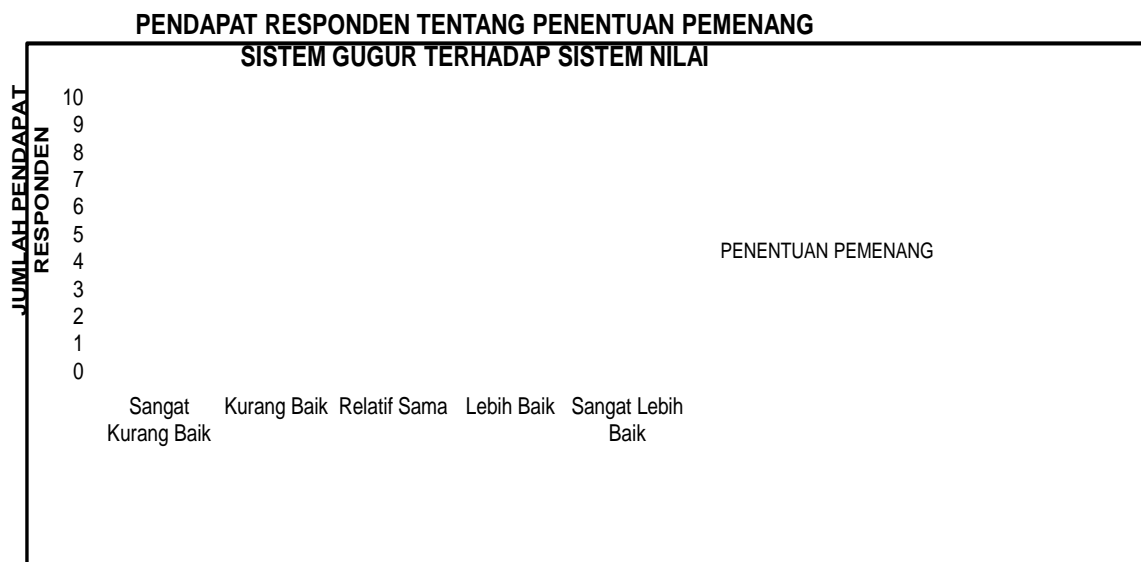
Gambar 5. Pendapat Responden Tentang Ketepatan Memilih Penyedia Jasa Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



Gambar 6. Pendapat Responden Tentang Hasil Pekerjaan Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



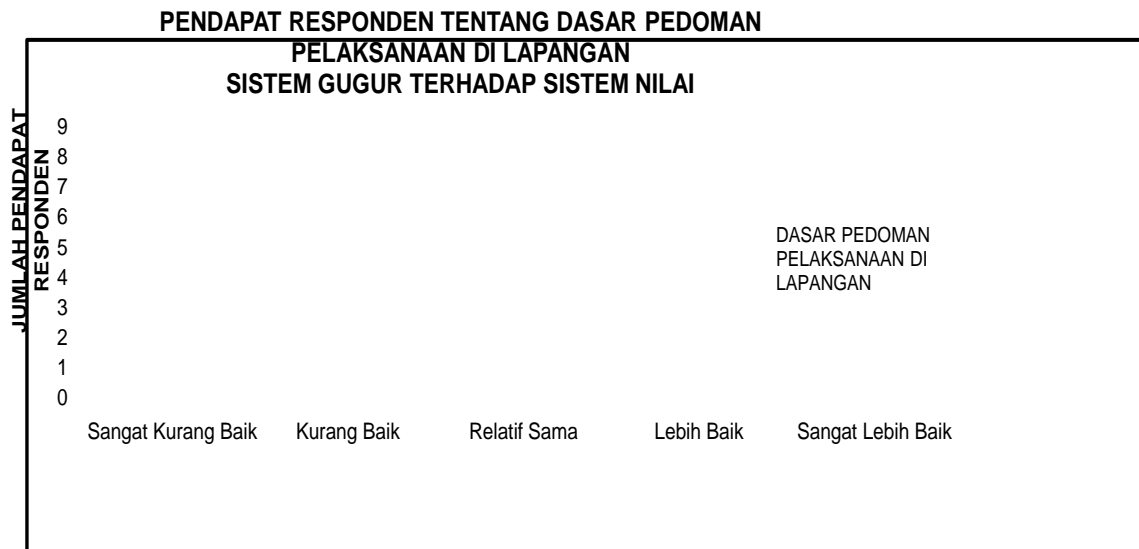
Gambar 7. Pendapat Responden Tentang Seleksi Peserta Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



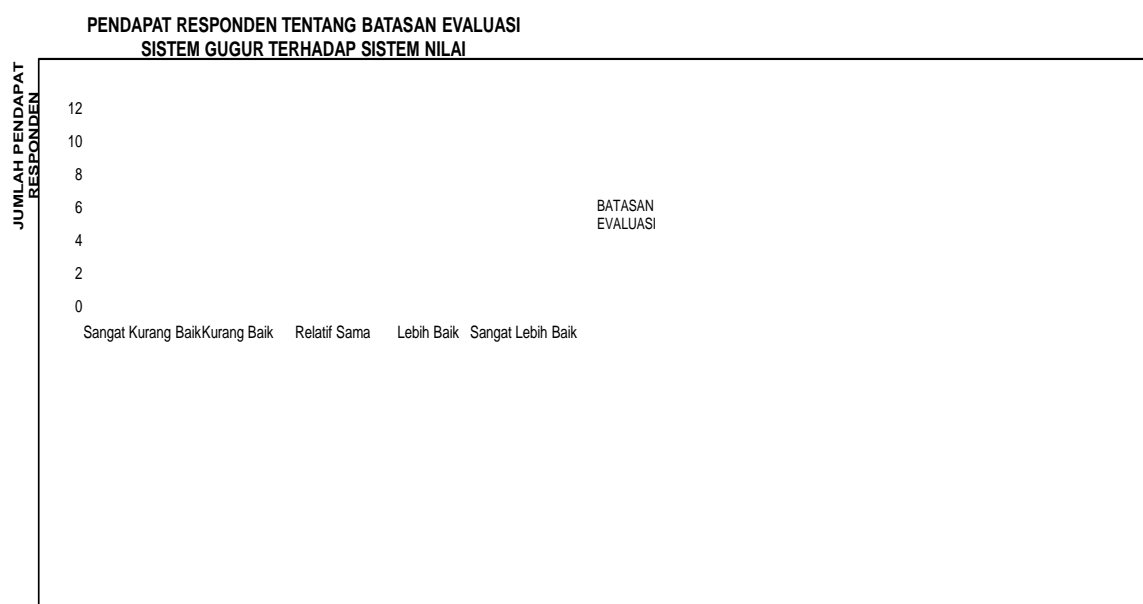
Gambar 8. Pendapat Responden Tentang Penentuan Pemenang Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



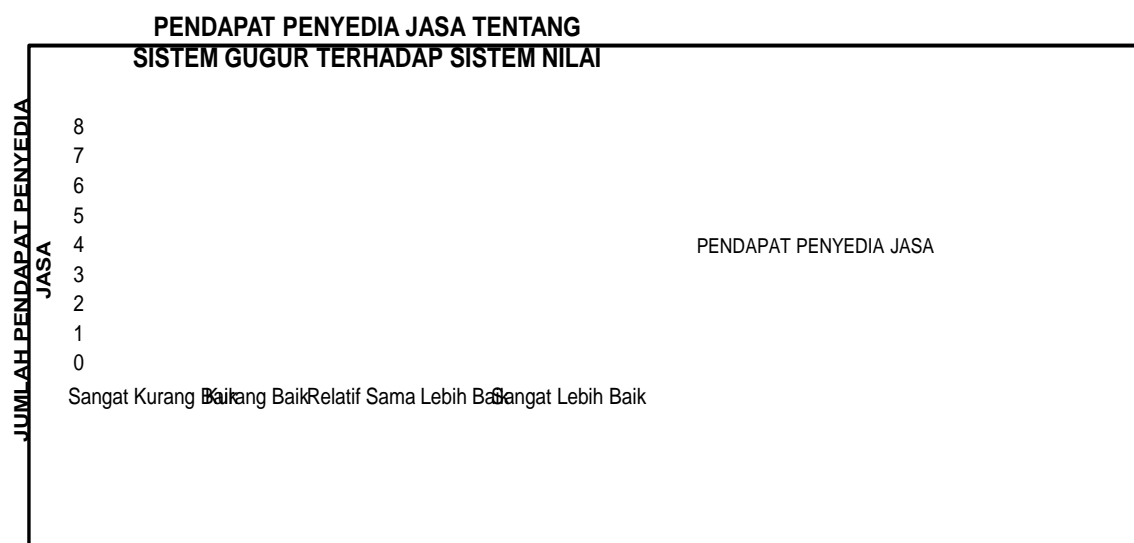
Gambar 9. Pendapat Responden Tentang Jumlah Temuan Pemeriksa Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



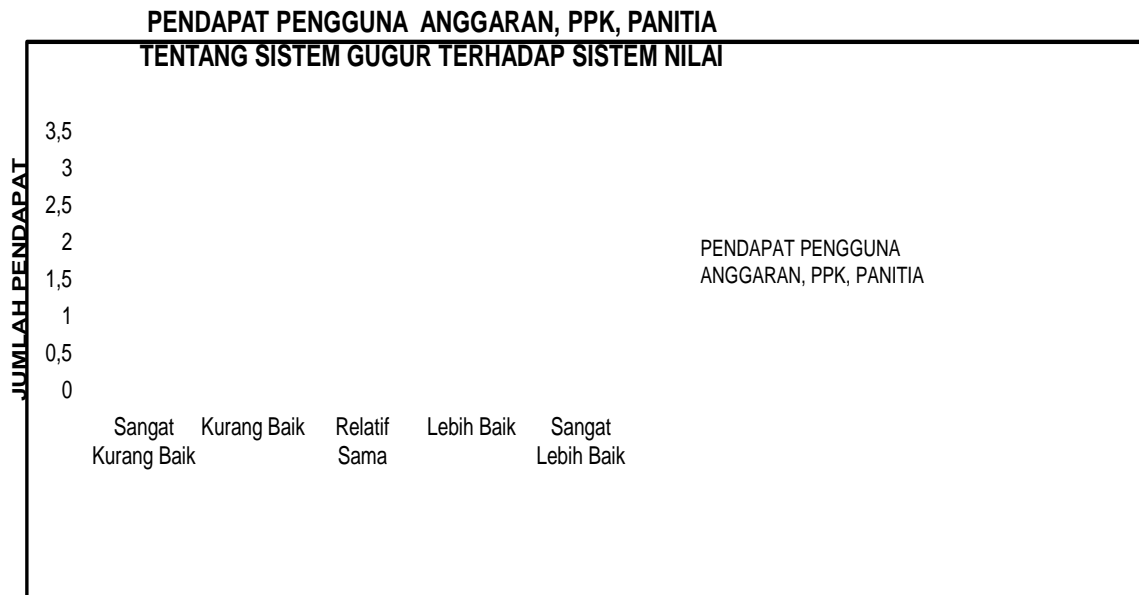
Gambar 10. Pendapat Responden Tentang Dasar Pedoman Pelaksanaan di Lapangan Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



Gambar 11. Pendapat Responden Tentang Batasan Evaluasi Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



Gambar 12. Pendapat Penyedia Jasa Tentang Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai



Gambar 13. Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Panitia Penerima Pekerjaan Tentang Sistem Gugur Terhadap Sistem Nilai

LAMPIRAN I. Responden Penelitian

Daftar Responden Penelitian di Lokasi Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi/Perusahaan	Pengalaman (tahun)
1	Ir. Sigit Suliantoro	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung selaku pengguna anggaran	Dinas Pekerjaan Umum	30
2	H.Sumaryana,S.Sos,MT	Kepala Bidang selaku Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum	15
3	Iga Gangga Sari,ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen	Rumah Sakit Umum Daerah	12
4	R. Sukarno	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	PT Bumi Mas Perdana	29
5	B.S Yodipati,SE	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	PT Manggung Mas Perdana	15
6	Bambang Tri Prastomo	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Aditya	25
7	Suprihati Noer R	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Handayani	23
8	Rohmad Slamet	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Asta Ghina	20
9	Suminto	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Surya Perdana	18
10	Trivena Proborini,ST	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Konsultan Perencanaan/ Pengawas)	CV Architama	10
11	Diana P.,SPd,Mpd	Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Selaku Pengguna Bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonobojo	7

LAMPIRAN J FORUM GROUP DISCUSSION

DAFTAR HADIR FORUM GROUP DISCUSSION

NO.	NAMA	JABATAN	DINAS	KET
1.	Ir. Sigit Suliantoro	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung selaku pengguna anggaran	Dinas Pekerjaan Umum	
2.	H.Sumaryana,S.Sos,MT	Kepala Bidang selaku Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum	
3.	Iga Gangga Sari,ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen	Rumah Sakit Umum Daerah	
4.	R. Sukarno	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	PT Bumi Mas Perdana	
5.	B.S Yodipati,SE	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	PT Manggung Mas Perdana	
6.	Bambang Tri Prastomo	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Aditya	
7.	Suprihati Noer R	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Handayani	
8.	Rohmad Slamet	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Asta Ghina	
9.	Suminto	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Kontraktor)	CV Surya Perdana	
10.	Trivena Proborini,ST	Direktur Utama selaku penyedia jasa/barang (Konsultan Perencanaan/ Pengawas)	CV Architama	
11.	Diana P.,SPd,Mpd	Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Selaku Pengguna Bangunan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonobojo	

BERITA ACARA FORUM GROUP DISCUSSION
PENERAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN DENGAN SISTEM GUGUR
DAN SISTEM NILAI (DAFTAR SIMAK DAN *PASSING GRADE/ AMBANG LULUS*)
DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Temanggung)

Penelit : Dwi Sukarme
Hari/ Tanggal : Senin, 9 Mei 2011
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Temanggung
Jumlah Peserta: 10 Respoden

SUSUNAN ACARA

- 1.Pemaparan tentang hasil pengumpulan data.
- 2.Diskusi dengan para responden/*stakeholders*
- 3.Pengambilan Kesimpulan

HASIL PEMAPARAN PENGUMPULAN DATA

1. Menurut pemaparan penelitian ini evaluasi penawaran pengadaan barang/ jasa yang ada di tesis ini sudah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
2. Menurut data yang ada pada tesis ini sudah sesuai dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah
3. Hasil dari penelitian ini evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem nilai (daftar simak dan ambang lulus) lebih baik dari pada sistem gugur.
4. Menurut penelitian ini faktor keuangan, faktor teknis, faktor administrasi, faktor pernyataan minat, faktor pakta integritas dan faktor kualifikasi yang mempengaruhi sistem nilai (daftar simak dan *passing grade/ambang lulus*)
5. Bahwa dalam penelitian ini penentuan kemenangan atau pemenang lelang dengan menggunakan evaluasi sistem nilai, faktor kemampuan finansial merupakan faktor yang paling besar nilai bobotnya.
6. Menurut daftar Temuan / Permasalahan pengadan Barang/Jasa di Tahun 2006 S/d 2009 faktor keuangan dan faktor teknis merupakan faktor yang paling banyak temuan / permasalahan di pelaksanaan proyek .

HASIL DISKUSI

1. Tesis dengan judul penerapan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur dan sistem nilai (daftar simak dan passing grade/ ambang lulus) dengan AHP sesuai dengan Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta daftar pustaka lainnya.
2. Data-data baik dari responden maupun daftar pustaka sudah cukup baik karena responden adalah yang menangani kegiatan pengadaan barang /jasa ada pengguna anggaran, PPK, panitia pengadaan barang/ jasa dan penyedia barang/jasa
3. Sistem nilai (daftar simak dan passing grade/ ambang lulus) yang di gunakan di Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan Pagu di bawah Rp.5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah) sangat efektif dibandingkan sistem gugur.
4. Faktor yang sering muncul dan berpengaruh di i pengadaan barang/ jasa adalah faktor - faktor keuangan, faktor teknis, faktor administrasi, faktor pernyataan minat, faktor pakta integritas dan faktor kualifikasi yang mempengaruhi sistem nilai (daftar simak dan passing grade/ambang lulus)
5. Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam rangka keberhasilan suatu proyek, terutama bagi perusahaan kecil, sangat tergantung dengan uang muka dari pemerintah .

KESIMPULAN

1. Sistem nilai (daftar simak dan ambang lulus/*passing grade*) lebih baik dan harus disertai dengan pembenahan-pembenahan atau perbaikan-perbaikan seperti dalam hal waktu evaluasi, biaya evaluasi, dan pelaksanaan lapangan yang masih harus tetap diawasi dengan baik dan benar.
2. Perlu adanya iktikad baik dari semua pihak diantaranya pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitme, panitia pengadaan barang/ jasa, penyedia barang/ jasa guna pelaksanaan pelelangan yang baik.
3. Diperlukan ketaatan hukum yang lebih baik dari semua pihak baik dari tim audit maupun dari stakeholder serta masyarakat.

LAMPIRAN K. SIMPANGAN BAKU FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERBANDINGKAN

Waktu Evaluasi

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	0	0
Relatif sama	3	1	3
Lebih baik	4	9	36
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 39$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{39}{10}$$

$$\bar{x} = 3,9$$

$$s^2 = \frac{(x - \bar{x})^2}{n}$$

$$= 1,4$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{(x - \bar{x})^2}}{n}$$

$$= \sqrt{1,4} = 1,18$$

Jadi simpangan baku waktu evaluasi adalah 1,18.

Biaya Evaluasi

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	0	0
Relatif sama	3	0	0
Lebih baik	4	10	40
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 40$

Biaya evaluasi	x_i	f	u	f	$u \cdot f$	$u = \frac{40}{10} = 4$
Sangat kurang baik	1	0	=	0		
Kurang baik	2	0	=	0		
Relatif sama	3	0	=	0		
Lebih baik	4	10	=	40		
Sangat lebih baik	5	0	=	0		

$$s^2 = \frac{(1 - 4)^2 + (2 - 4)^2 + (3 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (5 - 4)^2}{10}$$

$$= \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1}{10}$$

$$= \frac{15}{10} = 1,5$$

$$s = \sqrt{1,5}$$

$$= 1,22$$

Jadi simpangan baku data tentang biaya evaluasi adalah sebesar 1,22

Penentuan Pemenang

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	9	18
Relatif sama	3	1	3
Lebih baik	4	0	0
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 21$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

$$x = \frac{21}{10} = 2,1$$

$$s = \sqrt{1,4} = 1,18$$

Jadi simpangan baku faktor penentuan pemenang adalah 1,18

Jumlah temuan audit

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	10	20
Relatif sama	3	0	0
Lebih baik	4	0	0
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 20$

$$x = \frac{20}{10} = 2$$

$$s^2 = \frac{(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2 + (5-2)^2}{10}$$

$$= \frac{1 + 0 + 1 + 4 + 9}{10}$$

$$= \frac{15}{10} = 1,5$$

$$s = \sqrt{1,5} = 1,22$$

Jadi simpangan baku faktor jumlah temuan audit adalah 1,22

Dasar pedoman pelaksanaan lapangan

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	8	16
Relatif sama	3	2	6
Lebih baik	4	0	0
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 22$

$$x = \frac{22}{10} = 2,2$$

$$s = \sqrt{1,32} = 1,15$$

Jadi simpangan baku faktor dasar pedoman pelaksanaan lapangan adalah 1,15

Batasan evaluasi

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	9	18
Relatif sama	3	1	3
Lebih baik	4	0	0
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 21$

$$x = \frac{21}{10} = 2,1$$

$$s = \sqrt{1,4} = 1,183$$

Pendapat Penyedia Barang/ Jasa

Pilihan	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
Sangat kurang baik	1	0	0
Kurang baik	2	7	14
Relatif sama	3	0	0
Lebih baik	4	0	0
Sangat lebih baik	5	0	0
		$\sum f_i = 10$	$\sum x_i \cdot f_i = 14$

$$x = \frac{14}{7} = 2$$

$$s^2 = \frac{(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2 + (5-2)^2}{7}$$

$$= \frac{1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7}$$

$$= \frac{15}{7} = 2,1$$

$$s = \sqrt{2,1} = 1,45$$

Jadi simpangan baku faktor pendapat penyedia barang/ jasa adalah 1,45

Ketepatan memilih Penyedia Jasa

1	0
2	0
3	0
4	10
5	0

$$s = \sqrt{1,5}$$

Hasil Pekerjaan

1	0	=	0
2	7	=	14
3	3	=	9
4	0	=	0
5	0	=	0

23

$$x = \frac{23}{10} = 2,3$$

$$s^2 = \frac{(1 - 2,3)^2 + (2 - 2,3)^2 + (3 - 2,3)^2 + (4 - 2,3)^2 + (5 - 2,3)^2}{10}$$
$$= \frac{1,69 + 0,09 + 0,49 + 2,89 + 7,29}{10}$$

$$= \frac{12,45}{10} = 1,245$$

$$s = \sqrt{1,245}$$

Hasil pekerjaan

Xi	fi	=	
1	0	=	0
2	9	=	18
3	1	=	3
4	0	=	0
5	0	=	0

21

$$x = \frac{21}{10} = 2,1$$

$$s^2 = \frac{(1 - 2,1)^2 + (2 - 2,1)^2 + (3 - 2,1)^2 + (4 - 2,1)^2 + (5 - 2,1)^2}{10}$$
$$= \frac{1,21 + 0,01 + 0,81 + 3,61 + 8,41}{10}$$

$$= \frac{14,05}{10} = 1,4$$

$$s = \sqrt{1,4}$$

Hasil evaluasi

x1	f1	=	
1	0	=	0
2	9	=	18
3	0	=	0
4	1	=	4
5	0	=	0

$$x = \frac{22}{10} = 2,2$$

$$s^2 = \frac{(1 - 2,2)^2 + (2 - 2,2)^2 + (3 - 2,2)^2 + (4 - 2,2)^2 + (5 - 2,2)^2}{10}$$

$$= \frac{1,44 + 0,04 + 0,64 + 3,24 + 7,84}{10}$$

$$= \frac{13,2}{10} = 1,32$$

$$s = \sqrt{1,32}$$

Rincian Persyaratan

X1	f1
1	0
2	0
3	0
4	10
5	0

$$X = \frac{0 + 0 + 0 + 40 + 0}{10} = 4$$

$$s = \sqrt{1,5}$$

Pendapat Pengguna Anggaran, PPK, Panitia

X1	fi	=	
1	0	=	0
2	2	=	4
3	0	=	0
4	1	=	4
5	0	=	0

$$x = \frac{8}{3} = 2,66$$

$$s^2 = \frac{(1 - 2,66)^2 + (2 - 2,66)^2 + (3 - 2,66)^2 + (4 - 2,66)^2 + (4 - 2,66)^2 + (5 - 2,66)^2}{3}$$

$$= \frac{2,755 + 0,4356 + 0,1156 + 1,7956 + 7,84 + 5,4756}{3}$$

$$= \frac{10,5774}{3} = 3,5258$$

$$s = \sqrt{3,5258}$$

$$= 1,8777$$

**LAMPIRAN L. CONTOH FORMULIR PERNYATAAN MINAT MENGIKUTI
PENGADAAN BARANG/JASA**

**CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN
JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/ JASA LAINNYA**

**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi.....
Dan atas nama
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/ unit kerja....., tahun anggaran, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/ kegiatan:(nama pekerjaan/ kegiatan) sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

.....,20...

PT/CV/Firma/Koperasi
.....

(Nama Jelas)
Jabatan